



PEMERINTAH
KABUPATEN TAPIN

**PPAS
2023**

**PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Badan Keuangan dan Aset Daerah

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 900/084/BKAD/2022
170/909/DPRD-TPN/2022

TANGGAL : 19 September 2022

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM**
Jabatan : Bupati Tapin
Alamat Kantor : Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Tapin

2. a. Nama : **H. YAMANI, S.Ak**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tapin
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau
- b. Nama : **H. MIDPAY SYAHBANI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau
- c. Nama : **H. MUCHTAR**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Rantau, 19 September 2022

BUPATI TAPIN,

selaku,
PIHAK PERTAMA



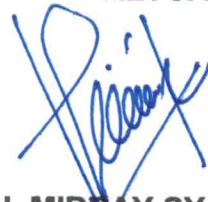
Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

selaku,
PIHAK KEDUA



**H. YAMANI, S.Ak
KETUA**



**H. MIDPAY SYAHBANI
WAKIL KETUA**



**H. MUCHTAR
WAKIL KETUA**



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang..... I – 1
 1.2. Tujuan..... I – 3
 1.3. Dasar Hukum..... I – 3

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

- 2.1. Rencana Penerimaan Daerah..... II – 1

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

- 3.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 III – 1
 3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 III – 4
 3.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2023 III – 6
 3.4. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
 Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023..... III - 7

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

- 4.1. Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan IV – 1
 4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga IV – 2

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

- 5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah V – 1
 5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan..... V – 2

BAB VI PENUTUP

- PENUTUP..... VI-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	BAB II
Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	BAB III
Tabel 3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.....	BAB III
Tabel 3.3. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....	BAB III
Tabel 3.4. Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	BAB III
Tabel 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan.....	BAB IV
Tabel 4.2. Plafon Anggaran Sementara untu Belanja Pegawai, Barang dan Jasa Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023.....	BAB IV
Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023.....	BAB V



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2023 merupakan periode ke lima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah berdasarkan ketentuan dijabarkan ke dalam RKPD yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 sebagai dokumen arah kebijakan penganggaran harus dapat menjawab permasalahan pembangunan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2023, yang telah ditetapkan dengan Peraturan BUPATI Tapin Nomor 19 TAHUN 2022 dengan mengacu pada Visi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 yaitu ***“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”***

Pada Visi Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 tersebut terdapat 5 (lima) kata kunci dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bersama : Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
2. Mewujudkan : Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan dicita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
3. Maju : Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
4. Sejahtera : Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan,



kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.

5. Agamis : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tapin tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

PPAS Tahun Anggaran 2023 adalah dokumen yang memuat Rencana Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Pembiayaan Daerah.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan PPAS adalah agar terjadi konsistensi antara proses perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan Rancangan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang efisien, efektif, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021(Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
18. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2023 tanggal 04 Juli 2022.

**BAB II****RENCANA PENERIMAAN DAERAH****2.1. Rencana Penerimaan Daerah**

Penerimaan Daerah tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Perencanaan Komponen Pendapatan Daerah diperkirakan sebesar Rp.857.858.945.526,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah diperkirakan Rp95.982.220.526,00 naik sebesar 24,72% dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.76.958.155.200,00.
- b. Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah diperkirakan sebesar Rp.761.876.725.000,00 mengalami penurunan sebesar 22,89% bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 988.012.669.000,00.

Komponen Perencanaan Penerimaan Pembiayaan Daerah diperkirakan Rp.501.594.735.336,00 mengalami penurunan sebesar 24,12% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp.661.045.895.844,00 dikarenakan tidak adanya anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah yang mana pada tahun 2022 Penerimaan Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp.23.657.565.000,00. Perincian Penerimaan Pembiayaan untuk masing masing dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.500.094.735.336,00 bila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp636.888.330.844,00 mengalami penurunan sebesar 21,48 %.
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada Rp1.500.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar 200% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp500.000.000,00.



Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari **tabel 2.1** dibawah ini.

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95,982,220,526
4.1.01	Pajak Daerah	20,595,000,000
4.1.02	Retribusi Daerah	4,652,465,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,000,000,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	65,734,755,526
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	761,876,725,000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	688,822,356,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73,054,369,000
	Jumlah Pendapatan	857,858,945,526
6	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	501,594,735,336
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	500,094,735,336
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,500,000,000

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95.982.220.526	
4.1.01	Pajak Daerah	20.595.000.000	
4.1.02	Retribusi Daerah	4.652.465.000	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	65.734.755.526	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	761.876.725.000	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	688.822.356.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.054.369.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	857.858.945.526	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	501.594.735.336	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	500.094.735.336	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	501.594.735.336	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.359.453.680.862	



BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Tapin Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.

3.1 Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2023

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 (tujuh) prioritas sebagai berikut :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pada prioritas ini, Pemerintah meinginkan pada tahun 2024 (kemiskinan ekstrem) bisa mencapai 0-1 persen, artinya tahun 2023 Pemerintah harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5-3 juta penduduk.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan. Pemerintah terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (human capital), selain melalui alokasi 20% anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik, Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian besar pada pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan. Khusus sektor kesehatan yang menjadi perhatian besar saat ini, Pemerintah Indonesia akan terus mengoptimalisasi capaian atas alokasi 5% anggaran untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan/sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional.
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan pekerjaan yang layak (decent job). Upaya Pemerintah dalam mengatasi pengangguran dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang meminimalisir akan terjadinya pengangguran. Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah



- dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas tenaga kerja, mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, pengembangan sektor informal, pengembangan program transmigrasi dan meningkatkan investasi .
4. Mendorong pemulihan dunia usaha. Pandemi COVID-19 sejak awal 2020 telah menekan dan menyebabkan penurunan di berbagai sektor, termasuk perekonomian. Dampak pandemi ini mengancam kelangsungan bisnis para pelaku usaha, di mana UMKM menjadi salah satu sektor yang mengalami pukulan terbesar. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk segera pulih dari imbas pandemi COVID-19. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam rangka pemulihan dan pemberdayaan dunia usaha. Upaya tersebut termasuk di antaranya pemberian insentif PEN, mendorong digitalisasi UMKM, memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro, meningkatkan akses permodalan dengan KUR, dan berbagai langkah pemberdayaan lainnya.
 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas. Melalui upaya revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan penguatan riset terapan diharapkan pada 2023, pertumbuhan industri pengolahan menjadi 5,4-5,9%, sehingga kontribusi industri terhadap PDB industri pengolahan dalam hal ini meningkat menjadi 20,6%.
 6. Ekonomi hijau. Green Economy atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Mengingat Indonesia akan mencapai net zero emission pada 2060, jadi pembangunan rendah karbon dalam hal ini transisi energi penting dalam rangka respon terhadap perubahan iklim
 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar ditujukan untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pelayanan dasar yang akan dibangun mencakup hunian layak, peningkatan akses ketenagalistrikan, layanan telekomunikasi untuk fasilitas umum, pengembangan sistem keselamatan lalu lintas, layanan transportasi perintis serta pembangunan waduk multi-purpose. Pemerintah telah berupaya



menyusun kombinasi strategi pembangunan yakni dengan menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Prioritas. pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan sejumlah PSN yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program dengan nilai investasi senilai Rp4.180 triliun.

Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 3.1** berikut

:

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Utara	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Utara	
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Utara	
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Utara	
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Nilai Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Nilai Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase keluarga pelaku usaha		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase perempuan yang terlibat di pemerintahan daerah		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase perkawinan usia anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Prosentase anggaran yang responsive gender pada belanja langsung APBD		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Prosentase keterlibatan perempuan di parlemen		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Prosentase pelaku usaha rumahan perempuan		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase keluarga pelaku usaha		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase perkawinan usia anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Capaian Kabupaten Layak Anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Rasio Kekerasan terhadap Anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase Pemustaka (pengunjung perpustakaan)		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Inovasi yang lolos penilaian seleksi skala nasional		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase SKPD binaan dengan kinerja pelayanan berkategori baik		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase SKPD binaan dengan nilai RB SKPD berkategori sangat baik		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase SKPD binaan dengan nilai SAKIP SKPD berkategori sangat baik		
				Sekretariat Daerah	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase SKPD dengan Tingkat Kematangan Level Tinggi		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual		
				Sekretariat Daerah	
			Persentasi Hasil Rekomendasi Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti		
				Sekretariat Daerah	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase BUMD yang sehat dan profitable		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase data dan informasi bidang perekonomian daerah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan perekonomian		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) di bidang perekonomian yang difasilitasi		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase paket pekerjaan yang dapat diselesaikan proses lelangnya		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase Penyerapan Anggaran		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	
			Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	
			Persentase Penyerapan Anggaran		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	
			Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Nilai Investasi		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase dokumen RUPM yang tersedia		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase rekomendasi PM (investor baru)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Pertumbuhan Penanaman Modal		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase investasi yang lolos izin lingkungan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase izin yang update		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase Pelaku Usaha yang berizin		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase perizinan yang diterbitkan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase terlaksananya SOP Pelayanan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase Penyerapan Anggaran		
				Kecamatan Tapin Selatan	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik		
				Kecamatan Bakarangan	
			Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu		
				Kecamatan Bakarangan	
			Persentase Penyerapan Anggaran		
				Kecamatan Bakarangan	
			Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD		
				Kecamatan Bakarangan	
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Bakarangan	
			Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	
			Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	
			Persentase Penyerapan Anggaran		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	
			Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Selatan	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Selatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase desa dengan administrasi yang baik		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik		
				Kecamatan Tapin Selatan	
			Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan		
				Kecamatan Tapin Selatan	



3.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 yaitu, **“Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan”**. Prioritas pembangunan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing . Kebijakan yang dilakukan yaitu peningkatan angka rata-rata lama sekolah, peningkatan indeks pembangunan pemuda, penurunan penyakit melalui GERMAS, pengendalian pravelensi stunting, penurunan angka pernikahan anak, peningkatan indeks pembangunan kebudayaan dan peningkatan prestasi olah raga.
2. Optimalisasi sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata. Kebijakan yang dilakukan adalah peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM dan pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas tenaga kerja, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis geopark, peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital dan peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah.
3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah. Kebijakan yang dilakukan yaitu pemenuhan pencapaian infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi, serta pengembangan kawasan prioritas dan pedesaan.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dengan kebijakan yaitu penguatan reformasi birokrasi, perencanaan penganggaran yang responsif gender dan inklusif.
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana. Adapun kebijakannya adalah pengelolaan perlindungan lingkungan hidup
6. Mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan sebagai Pendukung Food Estate. kebijakannya yaitu peningkatan peran Kalsel sebagai lumbung pangan Ibu Kota Negara (IKN) dan peningkatan konektivitas menuju Food Estate dan IKN.



Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 3.2** berikut :

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
54	02. Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata				
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Angka konsumsi daging per kapita		
				Dinas Pertanian	2.700.000.000
			Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)		
				Dinas Pertanian	2.700.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Bakarangan	4.270.500
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik		
				Kecamatan Bakarangan	4.270.500
			Persentase desa dengan administrasi yang baik		
				Kecamatan Bakarangan	4.270.500
			Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik		
				Kecamatan Bakarangan	4.270.500
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Bakarangan	4.270.500
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bakarangan	4.270.500
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bakarangan	4.270.500
55	03. Memperkuat Infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Meningkatkan akses air minum di Kabupaten Tapin		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000.000
			Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih1		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Terbangunan sarana dan prasarana persampahan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	304.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah di Kabupaten Tapin		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Pembangunan Gedung Kantor		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.525.000.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Terbangunnya gedung kantor		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Utara	303.281.000
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Utara	303.281.000
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	303.281.000
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	303.281.000
56	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik				
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			

				Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	95.577.200
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
				Dinas Perhubungan	3.879.420.000
67	01. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu		
				Dinas Pendidikan	165.995.227.434
			Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu.		
				Dinas Pendidikan	24.733.935
			Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan	165.995.227.434
			Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu.		
				Dinas Pendidikan	24.733.935
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		
				Dinas Pendidikan	166.019.961.369
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		
				Dinas Pendidikan	165.995.227.434
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.		
				Dinas Pendidikan	24.733.935
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan	10.858.756.539
			Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK		
				Dinas Pendidikan	1.774.531.034
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		
				Dinas Pendidikan	4.975.590.945
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		
				Dinas Pendidikan	10.858.756.539
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B		
				Dinas Pendidikan	1.774.531.034
			Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD		
				Dinas Pendidikan	4.975.590.945
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		
				Dinas Pendidikan	10.858.756.539
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B		
				Dinas Pendidikan	1.774.531.034
			Angka Putus Sekolah Dasar (SD)		
				Dinas Pendidikan	10.858.756.539
			Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP)		
				Dinas Pendidikan	1.774.531.034
			Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD		
				Dinas Pendidikan	4.975.590.945

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PNF		
				Dinas Pendidikan	452.944.000
			Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD		
				Dinas Pendidikan	10.858.756.539
			Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP		
				Dinas Pendidikan	1.774.531.034
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)		
				Dinas Pendidikan	4.975.590.945
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)		
				Dinas Pendidikan	10.858.756.539
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)		
				Dinas Pendidikan	1.774.531.034
			Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun yang mengikuti program Pendidikan Non Formal		
				Dinas Pendidikan	452.944.000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase Pendidik (Guru) yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV		
				Dinas Pendidikan	393.179.892
			Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan PAUD/PNF		
				Dinas Pendidikan	393.179.892
			Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SD		
				Dinas Pendidikan	393.179.892
			Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SMP		
				Dinas Pendidikan	393.179.892
			Rasio Guru Terhadap Siswa SD		
				Dinas Pendidikan	393.179.892
			Rasio Guru Terhadap Siswa SMP		
				Dinas Pendidikan	393.179.892
			Rasio Guru Terhadap Siswa TK		
				Dinas Pendidikan	393.179.892
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase ASN yang dilayani administrasi kepegawaiannya		
				Dinas Kesehatan	149.604.828
			Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu		
				Dinas Kesehatan	149.604.828
			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu		
				Dinas Kesehatan	149.604.828
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		
				Dinas Kesehatan	149.604.828
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		
				Dinas Kesehatan	149.604.828

				Dinas Kesehatan	74.472.380.103
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pelayanan Gizi Balita		
				Dinas Kesehatan	2.993.472.922
			Persentase Pelayanan Kesehatan Anak		
				Dinas Kesehatan	2.993.472.922
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu		
				Dinas Kesehatan	2.993.472.922
			Persentase PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
				Dinas Kesehatan	2.993.472.922
			Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat		
				Dinas Kesehatan	2.993.472.922
			Persentase Penduduk menggunakan Sarana Air Bersih		
				Dinas Kesehatan	2.993.472.922

				Dinas Kesehatan	16.368.034.836
			Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat		
				Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	61.250.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Desa yang memiliki bidan		
				Dinas Kesehatan	2.401.200.000
			Persentase Kebutuhan Sumberdaya manusia kesehatan		
				Dinas Kesehatan	2.401.200.000
			Persentase SDM yang kompeten (memiliki STR)		
				Dinas Kesehatan	2.401.200.000
			Rasio Jumlah Bidan terhadap jumlah penduduk		
				Dinas Kesehatan	2.401.200.000

				Dinas Kesehatan	55.925.150
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		
				Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.984.755.256
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
				Dinas Kesehatan	112.920.087
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
				Dinas Kesehatan	278.511.212
			Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri		
				Dinas Kesehatan	278.511.212
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	278.511.212
			Persentase UKBM (Posyandu) yang dibentuk dan aktif di desa / kelurahan		
				Dinas Kesehatan	278.511.212

				Dinas Kesehatan	155.653.035
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	558.031.840

				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.617.530.855

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Tercapainya Normalisasi/ Restorasi Sungai		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.405.000.000

				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.375.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Meningkatkan akses air minum di Kabupaten Tapin		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.211.327.509
			Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih1		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.211.327.509
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Terbangunan sarana dan prasarana persampahan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.696.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah di Kabupaten Tapin		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.950.000.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Pembangunan Gedung Kantor		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.915.412.471
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Terbangunnya gedung kantor		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.400.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	144.597.500.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.265.390

				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	140.287.400
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.367.620.244

				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.732.379.573
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.124.905.590
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.571.719.448
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.635.462.323
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	123.517.750
			Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	583.888.500
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase penurunan kawasan kumuh		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.285.520.750
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Persentase peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	81.920.750
			Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	81.920.750
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (KRB)		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16.885.111.600
			Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16.885.111.600
			Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16.885.111.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja		
				Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	8.744.316

				Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	7.715.108.227
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan Tepat Waktu		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.833.620.485
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	238.001.236
			Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.316.725.098
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih		
				Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	3.007.946.428
			Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
				Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	3.007.946.428
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3		
				Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	3.140.335.928
			Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan		
				Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	3.007.946.428
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Memastikan Pasca Bencana tertangani		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.307.650

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	626.471.714
			Menurunkan Indeks Risiko Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300.871.140
			Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	126.882.140
			Persentase daerah terdampak bencana yang pulih		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	173.989.000
			Persentase Desa Tangguh Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	173.989.000
			Tertanganinya Kebakaran Hutan dan Lahan yang di Bakar		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	325.600.574
			Tertanganinya Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terbakar		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	325.600.574
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran		
				Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	446.953.729
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar		
				Dinas Sosial	9.488.232
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik		
				Dinas Sosial	806.740.293
			Persentase pelayanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar		
				Dinas Sosial	5.939.578
			Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar		
				Dinas Sosial	1.077.501.509
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil		
				Dinas Sosial	1.413.692.259

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial		
				Dinas Sosial	5.077.710.674
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial		
				Dinas Sosial	43.953.150
			Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi dalam permodalan		
				Dinas Sosial	1.546.840.712
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Dinas Sosial	184.878.920
			Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani		
				Dinas Sosial	218.244.410
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam kondisi baik		
				Dinas Sosial	47.544.318
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Meningkatnya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Dinas Tenaga Kerja	22.381.700

				Dinas Tenaga Kerja	4.990.886.733
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		
				Dinas Tenaga Kerja	640.730.738
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat		
				Dinas Tenaga Kerja	640.730.738
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		
				Dinas Tenaga Kerja	640.730.738
			Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		
				Dinas Tenaga Kerja	640.730.738

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Rasio lowongan kerja dengan pencari kerja		
				Dinas Tenaga Kerja	640.730.738

				Dinas Tenaga Kerja	15.341.650
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat		
				Dinas Tenaga Kerja	2.979.160.326
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		
				Dinas Tenaga Kerja	2.979.160.326
			Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		
				Dinas Tenaga Kerja	2.979.160.326

				Dinas Tenaga Kerja	656.583.840
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		
				Dinas Tenaga Kerja	35.122.508
			Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		
				Dinas Tenaga Kerja	35.122.508

				Dinas Tenaga Kerja	168.984.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.603.584.872
			Nilai Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.981.777
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.618.566.649
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.618.566.649

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.981.062
			Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.981.062
			Persentase keluarga pelaku usaha		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.981.062
			Persentase perempuan yang terlibat di pemerintahan daerah		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.981.062
			Persentase perkawinan usia anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.981.062
			Prosentase anggaran yang responsive gender pada belanja langsung APBD		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	206.181.103
			Prosentase keterlibatan perempuan di parlemen		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	206.181.103
			Prosentase pelaku usaha rumahan perempuan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	206.181.103
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.400.410
			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.400.410
			Persentase keluarga pelaku usaha		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.400.410
			Persentase perkawinan usia anak		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.400.410
			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	117.958.944
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	407.002.574
			Persentase keluarga pelaku usaha		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	407.002.574
			Persentase perkawinan usia anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	407.002.574
			Prosentase perkawinan Usia anak di Kabupaten Tapin		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	522.392.318
			Prosetase keluarga yang dibina		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	522.392.318
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			Persentase data SIMFONI dan SIGA yang terinput		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	122.743.390
			Prosentase SKPD yang menggunakan Buku Data Terpilah Gender dan Anak sebagai salah satu bahan dalam Penyusunan Anggaran dan PPRG SKPD		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	122.743.390
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Capaian Kabupaten Layak Anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	510.814.355
			Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.153.251

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	510.814.355
			Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	510.814.355
			Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	510.814.355
			Persentase keluarga pelaku usaha		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.153.251
			Persentase pelaku usaha rumahan perempuan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.153.251
			Persentase perempuan yang terlibat di pemerintahan daerah		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.153.251
			Persentase perkawinan usia anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.153.251
			Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	510.814.355
			Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	510.814.355
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.912.541
			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.912.541
			Rasio Kekerasan terhadap Anak		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	62.276.578
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Dinas Ketahanan Pangan	2.486.503.848

				Dinas Ketahanan Pangan	1.481.674.022
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Ketersediaan Pangan Utama		
				Dinas Ketahanan Pangan	453.329.367
			Persentase pangan yang aman dikonsumsi		
				Dinas Ketahanan Pangan	453.329.367

				Dinas Ketahanan Pangan	1.352.433.834
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Ketersediaan Pangan Utama		
				Dinas Ketahanan Pangan	53.507.200
			Persentase pangan yang aman dikonsumsi		
				Dinas Ketahanan Pangan	53.507.200

				Dinas Ketahanan Pangan	89.638.542
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			

				Dinas Ketahanan Pangan	79.932.000
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
			Persentase advokasi pertanahan yang berhasil		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	169.635.700
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
			Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.000.305.900

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	366.644.950
			Persentase penataan administrasi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	366.644.950
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun		
				Dinas Lingkungan Hidup	34.301.936
			Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang wajib disusun		
				Dinas Lingkungan Hidup	278.210.812
			Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun		
				Dinas Lingkungan Hidup	3.872.658.556
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		
				Dinas Lingkungan Hidup	34.301.936
			Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik		
				Dinas Lingkungan Hidup	8.319.462.452
			Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik		
				Dinas Lingkungan Hidup	292.486.208
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		
				Dinas Lingkungan Hidup	8.646.250.596
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah		
				Dinas Lingkungan Hidup	919.926.604
			Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu		
				Dinas Lingkungan Hidup	919.926.604
			Persentase Rekomendasi Dokumen Lingkungan yang Ditindaklanjuti		
				Dinas Lingkungan Hidup	919.926.604
			Persentase Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan yang Dikendalikan		
				Dinas Lingkungan Hidup	919.926.604
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Lingkungan Hidup	919.926.604
			Status Mutu Air		
				Dinas Lingkungan Hidup	919.926.604
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah		
				Dinas Lingkungan Hidup	1.149.773.524
			Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati		
				Dinas Lingkungan Hidup	1.149.773.524
			Persentase Parameter Air Permukaan yang diuji Sesuai Baku Mutu		
				Dinas Lingkungan Hidup	1.529.562.164
			Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku		
				Dinas Lingkungan Hidup	1.149.773.524
			Persentase parameter kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu		
				Dinas Lingkungan Hidup	379.788.640
			Persentase Parameter Kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu		
				Dinas Lingkungan Hidup	1.149.773.524
			Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu		
				Dinas Lingkungan Hidup	1.149.773.524
			Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025		
				Dinas Lingkungan Hidup	1.529.562.164
			Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid sesuai SNI dan ISO 17025		
				Dinas Lingkungan Hidup	235.888.225
			Persentase parameter udara yang diuji sesuai baku mutu		
				Dinas Lingkungan Hidup	379.788.640
			Persentase Parameter Udara yang diuji sesuai baku mutu		
				Dinas Lingkungan Hidup	1.149.773.524
			Persentase penurunan emisi gas rumah kaca di business as usual		
				Dinas Lingkungan Hidup	143.900.415
			Persentase Penurunan emisi gas rumah kaca di business as usual		
				Dinas Lingkungan Hidup	235.888.225

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Status Mutu Air		
				Dinas Lingkungan Hidup	1.149.773.524
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati		
				Dinas Lingkungan Hidup	2.505.288.671
			Persentase Luas ruang terbuka hijau (RTH) 3 kecamatan di Kabupaten Tapin		
				Dinas Lingkungan Hidup	2.505.288.671
			Persentase Pertambahan populasi bekantan di kawasan bernilai penting		
				Dinas Lingkungan Hidup	2.505.288.671
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase cakupan area pelayanan		
				Dinas Lingkungan Hidup	22.488.127
			Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan		
				Dinas Lingkungan Hidup	22.488.127
			Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan		
				Dinas Lingkungan Hidup	58.588.019
			Persentase volume sampah yang tertangani		
				Dinas Lingkungan Hidup	22.488.127
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaranair		
				Dinas Lingkungan Hidup	29.944.145
			Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran udara		
				Dinas Lingkungan Hidup	29.944.145
			Persentase MHA yang ditetapkan haknya		
				Dinas Lingkungan Hidup	29.944.145
			Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air		
				Dinas Lingkungan Hidup	29.944.145

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara		
				Dinas Lingkungan Hidup	29.944.145
			Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan		
				Dinas Lingkungan Hidup	29.944.145
			Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi		
				Dinas Lingkungan Hidup	29.944.145
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
			Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas		
				Dinas Lingkungan Hidup	42.607.700
			Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya		
				Dinas Lingkungan Hidup	131.299.867
			Persentase Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan peningkatan kapasitas		
				Dinas Lingkungan Hidup	88.692.167
			Persentase MHA yang ditetapkan haknya		
				Dinas Lingkungan Hidup	88.692.167
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup	52.750.418
			Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati		
				Dinas Lingkungan Hidup	52.750.418
			Persentase MHA yang ditetapkan haknya		
				Dinas Lingkungan Hidup	52.750.418
			Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku		
				Dinas Lingkungan Hidup	52.750.418
			Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu		
				Dinas Lingkungan Hidup	52.750.418
			Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan		
				Dinas Lingkungan Hidup	52.750.418
			Status Mutu Air		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Lingkungan Hidup	52.750.418
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang dilakukan fasilitasi dan pembinaan mendapatkan penghargaan		
				Dinas Lingkungan Hidup	589.818.215
			Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku		
				Dinas Lingkungan Hidup	589.818.215
			Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu		
				Dinas Lingkungan Hidup	589.818.215
			Persentase sekolah yang menjadi sekolah adiwiyata		
				Dinas Lingkungan Hidup	589.818.215
			Status Mutu Air		
				Dinas Lingkungan Hidup	589.818.215
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		
				Dinas Lingkungan Hidup	41.068.582
			Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air		
				Dinas Lingkungan Hidup	41.068.582
			Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara		
				Dinas Lingkungan Hidup	41.068.582
			Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi		
				Dinas Lingkungan Hidup	41.068.582
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase areal publik bebas sampah		
				Dinas Lingkungan Hidup	5.389.688.517
			Persentase cakupan area pelayanan		
				Dinas Lingkungan Hidup	10.779.377.034
			Persentase jumlah desa/kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah		
				Dinas Lingkungan Hidup	5.389.688.517
			Persentase jumlah fasilitas pengelolaan sampah (bank sampah, TPS 3R, rumah kompos) yang beroperasi aktif		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Lingkungan Hidup	5.389.688.517
			Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan		
				Dinas Lingkungan Hidup	5.389.688.517
			Persentase sampah yang dikurangi		
				Dinas Lingkungan Hidup	5.389.688.517
			Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu (siang hari)		
				Dinas Lingkungan Hidup	5.389.688.517
			Persentase volume sampah yang ditangani		
				Dinas Lingkungan Hidup	5.389.688.517
			Persentase volume sampah yang tertangani		
				Dinas Lingkungan Hidup	5.389.688.517
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Kategori Minimal Hasil Evaluasi SAKIP		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.357.232
			Persentase Aset Tercatat		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	156.228.229
			Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat/keahlian sesuai dengan jabatannya		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.721.252.064
			Persentase Pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.721.252.064
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.995.499.559
			Persentase Penyerapan Anggaran		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.298.947.680
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			IKM terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.004.764
			IKM Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	288.695.732
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			IKM Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	435.942.607
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase Jumlah Instansi Yang Bekerjasama dalam Bidang Pelayanan Kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	121.499.200
			Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	121.499.200
			Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Kependudukan yang diterbitkan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.819.540
			Tingkat Akurasi Data Orang lahir, mati, pindah, dan datang		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	194.155.662
			Tingkat Akurasi Data Perorangan Pada Kartu Keluarga		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	194.155.662
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.957.369.804
			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.705.939.876
			Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.540.812
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	275.200.421
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	227.743.626
			Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	92.682.656
		PROGRAM PENATAAN DESA			
			Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.222.666
			Persentase PKK aktif		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.222.666
			Persentase posyandu aktif		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.222.666
			Program Penataan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.222.666
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.222.666
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
			Persentase BUMDes menghasilkan laba		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.885.260.491
			Persentase BUMDes yang aktif		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.885.260.491
			Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.885.260.491
			Persentase PKK aktif		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.885.260.491
			Persentase posyandu aktif		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.885.260.491
			Program Peningkatan Kerjasama Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.885.260.491
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.885.260.491
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase BUMDES yang aktif		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.133.484.628
			Persentase Bumdes yang menghasilkan laba		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.133.484.628
			Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.133.484.628
			Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.133.484.628
			Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.133.484.628
			Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.133.484.628
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase Bumdes yang aktif		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.019.385.982
			Persentase Bumdes yang menghasilkan laba		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.019.385.982
			Persentase PKK aktif		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.012.923.988
			Persentase posyandu aktif		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.012.923.988
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.019.385.982
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90%		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.170.454.083
			Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.170.454.083
			Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.170.454.083
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	413.533.436
			Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	413.533.436
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 Tahun)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	744.478.936
			Persentase Peserta KB Aktif MKJP		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	744.478.936
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.184.954.844
			Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.184.954.844
			Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.184.954.844
			Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.184.954.844
			Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.184.954.844
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Dinas Perhubungan	613.861.568
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
				Dinas Perhubungan	46.512.740
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Dinas Perhubungan	172.375.937
			Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Dinas Perhubungan	209.050.000
			Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
				Dinas Perhubungan	3.163.968.795

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase angkutan umum yang memiliki izin trayek		
				Dinas Perhubungan	55.418.760
			Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar		
				Dinas Perhubungan	55.418.760
			Persentase penurunan rasio kecelakaan lalu-lintas darat terhadap jumlah kendaraan bermotor		
				Dinas Perhubungan	55.418.760
			Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
				Dinas Perhubungan	115.150.000
			Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
				Dinas Perhubungan	542.372.218
			Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
				Dinas Perhubungan	199.913.880
			Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
				Dinas Perhubungan	339.692.600
			Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		
				Dinas Perhubungan	89.974.440
			Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
				Dinas Perhubungan	158.878.014
			Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		
				Dinas Perhubungan	81.743.250
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar		
				Dinas Perhubungan	135.174.220
			Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		
				Dinas Perhubungan	929.413.916
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	5.854.165.323

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase Layanan Informasi Berbasis TI		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	1.599.980.550
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	2.606.551.172
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase Koperasi Aktif		
				Dinas Perindustrian	17.070.900
			Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat		
				Dinas Perindustrian	17.070.900
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Persentase Koperasi Aktif		
				Dinas Perindustrian	20.387.694
			Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat		
				Dinas Perindustrian	20.387.694
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Persentase Koperasi Aktif		
				Dinas Perindustrian	51.866.250
			Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat		
				Dinas Perindustrian	51.866.250
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Mikro		
				Dinas Perindustrian	75.426.311
			Persentase UMKM Yang Memilikiizin Usaha		
				Dinas Perindustrian	75.426.311
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.850.204.665
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Nilai Investasi		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	393.625.521
			Persentase dokumen RUPM yang tersedia		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	294.166.595
			Persentase rekomendasi PM (investor baru)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	294.166.595
			Pertumbuhan Penanaman Modal		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	294.166.595
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Nilai Investasi		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.425.140
			Persentase jenis investasi/promosi yang dipublikasikan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.425.140
			Persentase stakeholder yang menggunakan informasi/promosi investasi yang dipublikasikan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.425.140
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	742.944.046
			Persentase investasi yang lolos izin lingkungan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	742.944.046
			Persentase izin yang update		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	742.944.046
			Persentase Pelaku Usaha yang berizin		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	742.944.046
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	742.944.046
			Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	742.944.046
			Persentase perizinan yang diterbitkan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	742.944.046
			Persentase terlaksananya SOP Pelayanan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	742.944.046
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Nilai Investasi		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.048.475
			Persentase pelaku usaha yang memiliki izin		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.048.475
			Persentase Perumbuhan Investasi		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.048.475
			Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.048.475
			Persentase Rasio angka kerja yang terserap terhadap nilai investasi		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.048.475
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang update		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.359.160
			Persentase perizinan yang diterbitkan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.359.160
			Persentase terlaksananya SOP Pelayanan		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.359.160
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	1.107.525.631
			Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	2.930.925.452
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	14.469.504
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	324.179.456
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	128.165.628
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	865.517.676
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	1.224.966.403
			Persentase organisasi kepemudaan yang aktif		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	1.224.966.403
			Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	1.255.463.221
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Jumlah Cabang Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	2.075.869.470
			Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	2.075.869.470

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	961.128.830
			Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	6.986.900.859
			Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	1.567.865.394
			Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	1.060.161.054
			Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	2.075.869.470
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase organisasi kepemudaan yang aktif		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	1.041.754.948
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Persentase Layanan Data Statistik Sektoral yang disajikan		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	95.627.800
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Persentase Layanan Pengamanan Informasi dan Persandian		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	100.518.197
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan ASN Disudpar		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.386.969.177
			Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	77.337.053
			Persentase Jasa Penunjang yang tersedia		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	251.671.000
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.232.460.358
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	93.072.134

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.335.650
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	65.086.548
			Persentase Pemangku Adat Dayak yang Aktif		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	326.812.008
			Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	65.086.548
			Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	65.086.548
			Persentase Sanggar/Seni Budaya yang mengikuti event seni dan budaya		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	583.495.380
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
			Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	523.286.080
			Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	523.286.080
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	22.556.436
			Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	170.235.200
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	130.073.892
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.088.316.225
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	765.814.608
			Persentase Pemustaka (pengunjung perpustakaan)		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	765.814.608
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	374.828.184
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84.609.394
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		
				Dinas Perikanan	67.586.760
			Jumlah Waktu penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Dinas Perikanan	1.093.426.017
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor dan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		
				Dinas Perikanan	650.975.188
			Waktu Pengadaan peralatan gedung kantor		
				Dinas Perikanan	428.451.852
			waktu penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Dinas Perikanan	4.065.612.301
			waktu Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Dinas Perikanan	313.776.400
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya		
				Dinas Perikanan	195.188.220
			Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Perikanan	195.188.220
			Presentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas		
				Dinas Perikanan	195.188.220

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Waktu pemanfaatan sumberdaya perairan (bulan)		
				Dinas Perikanan	47.506.082
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Bulan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
				Dinas Perikanan	1.756.741.801
			Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya		
				Dinas Perikanan	22.730.000
			Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Perikanan	22.730.000
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Perikanan	156.634.988
			Presentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas		
				Dinas Perikanan	156.634.988
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			jumlah waktu Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		
				Dinas Perikanan	5.783.834
			Jumlah Waktu pengolahan informasi data atas hasil perikanan (Bulan)		
				Dinas Perikanan	54.395.010
			Jumlah Waktu Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan		
				Dinas Perikanan	418.221.677
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase destinasi pariwisata yang terpelihara dengan baik		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	397.397.584
			Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	72.565.000
			Persentase sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang terpenuhi		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	369.740.940
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	875.609.082
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Persentase Pokdarwis yang mengikuti pelatihan/bimtek kepariwisataan		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	60.398.534
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	677.615.318
			Persentase pelaku usaha yang mengikuti pelatihan/bimtek usaha pariwisata		
				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26.043.820
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP		
				Dinas Pertanian	16.867.266.290
			Persentase Aset yang tercatat		
				Dinas Pertanian	16.867.266.290
			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu		
				Dinas Pertanian	16.867.266.290
			Persentase penyerapan Anggaran SKPD		
				Dinas Pertanian	16.867.266.290
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Dinas Pertanian	16.867.266.290
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		
				Dinas Pertanian	16.867.266.290
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Angka konsumsi daging per kapita		
				Dinas Pertanian	702.000.000
			Jumlah Produksi Daging (Ton)		
				Dinas Pertanian	1.066.692.440
			Jumlah Produksi Telur (Ton)		
				Dinas Pertanian	1.066.692.440
			Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)		
				Dinas Pertanian	702.000.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Peningkatan Produksi Daging (%)		
				Dinas Pertanian	1.066.692.440
			Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)		
				Dinas Pertanian	1.066.692.440
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Angka konsumsi daging per kapita		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Jumlah luas lahan fungsional		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Jumlah luas lahan fungsional yang ditanami (Ha)		
				Dinas Pertanian	8.300.800.000
			Luas Panen Bawang Merah		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Luas Panen Cabe Rawit Hiyung		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Luas Panen Jagung		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Luas Panen Jeruk		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Luas Panen Kedelai		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Luas Panen Padi		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Persentase Kelas Kelompok Tani Madya		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Persentase lahan sawah fungsional yang terairi		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Persentase penyakit hewan yang tertangani		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Populasi kambing		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Populasi sapi		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Populasi unggas		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Produktivitas Bawang Merah		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Produktivitas Cabe Rawit		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Produktivitas Jagung		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Produktivitas Jeruk		
				Dinas Pertanian	39.600.000
			Produktivitas Kedelai		
				Dinas Pertanian	39.600.000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Angka konsumsi daging per kapita		
				Dinas Pertanian	66.000.000
			Jumlah Waktu Pelaksanaan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		
				Dinas Pertanian	5.956.500
			Jumlah Waktu Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		
				Dinas Pertanian	571.962.500
			Jumlah Waktu Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				Dinas Pertanian	24.000.000
			Persentase penyakit hewan yang tertangani		
				Dinas Pertanian	66.000.000
			Populasi kambing		
				Dinas Pertanian	66.000.000
			Populasi sapi		
				Dinas Pertanian	66.000.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Populasi unggas		
				Dinas Pertanian	66.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Jumlah kemitraan pemasaran hasil hortikultura		
				Dinas Pertanian	126.000.000
			Luas Panen Jagung		
				Dinas Pertanian	126.000.000
			Luas Panen Kedelai		
				Dinas Pertanian	126.000.000
			Luas Panen Padi		
				Dinas Pertanian	126.000.000
			Luas Tanaman Karet		
				Dinas Pertanian	126.000.000
			Luas Tanaman Sawit		
				Dinas Pertanian	126.000.000
			Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan		
				Dinas Pertanian	126.000.000
			Persentase Kelas Kelompok Tani Madya		
				Dinas Pertanian	126.000.000
			Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hortikultura		
				Dinas Pertanian	126.000.000
			Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis		
				Dinas Pertanian	126.000.000
			Produktivitas Jagung		
				Dinas Pertanian	126.000.000
			Produktivitas Kedelai		
				Dinas Pertanian	126.000.000
			Produktivitas Padi		
				Dinas Pertanian	126.000.000
			Produktivitas Tanaman Karet		
				Dinas Pertanian	126.000.000
			Produktivitas Tanaman Sawit		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pertanian	126.000.000
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Luas Tanaman Karet		
				Dinas Pertanian	43.200.000
			Luas Tanaman Sawit		
				Dinas Pertanian	43.200.000
			Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan		
				Dinas Pertanian	43.200.000
			Produktivitas Tanaman Karet		
				Dinas Pertanian	43.200.000
			Produktivitas Tanaman Sawit		
				Dinas Pertanian	43.200.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Kelas Kelompok Tani Madya		
				Dinas Pertanian	491.500.000
			Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis		
				Dinas Pertanian	491.500.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP Dinas Perdagangan		
				Dinas Perdagangan	11.213.210
			Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian ASN		
				Dinas Perdagangan	11.213.210
			Persentase Penyerapan Anggaran		
				Dinas Perdagangan	11.213.210

				Dinas Perdagangan	5.172.851.799
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		
				Dinas Perdagangan	49.407.304
			Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang		
				Dinas Perdagangan	49.407.304
			Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perdagangan	49.407.304
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah		
				Dinas Perdagangan	2.886.308.074
			Persentase informasi harga Barang Pokok dan Penting yang akurat		
				Dinas Perdagangan	2.886.308.074
			Persentase pasar tradisional yang dibangun		
				Dinas Perdagangan	2.886.308.074
			Persentase pasar tradisional yang direvitalisasi		
				Dinas Perdagangan	2.886.308.074
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI		
				Dinas Perdagangan	2.886.308.074
			Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar		
				Dinas Perdagangan	2.886.308.074

				Dinas Perdagangan	151.255.802
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah		
				Dinas Perdagangan	61.415.630
			Persentase Informasi Harga Barang Pokok dan Penting yang Akurat		
				Dinas Perdagangan	61.415.630
			Persentase pasar tradisional yang dibangun		
				Dinas Perdagangan	61.415.630
			Persentase pasar tradisional yang direvitalisasi		
				Dinas Perdagangan	61.415.630
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI		
				Dinas Perdagangan	61.415.630
			Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar		
				Dinas Perdagangan	61.415.630

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perdagangan	14.999.952
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipasarkan		
				Dinas Perdagangan	173.105.215
			Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang		
				Dinas Perdagangan	173.105.215
			Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan		
				Dinas Perdagangan	173.105.215
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah		
				Dinas Perdagangan	224.966.294
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI		
				Dinas Perdagangan	224.966.294
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipasarkan		
				Dinas Perdagangan	305.939.920
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Rata-rata capaian kinerja kegiatan		
				Dinas Perindustrian	7.500.189

				Dinas Perindustrian	4.995.337.573
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia		
				Dinas Perindustrian	731.031.362
			Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka		
				Dinas Perindustrian	731.031.362
			Persentase bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia		
				Dinas Perindustrian	731.031.362
			Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka		
				Dinas Perindustrian	731.031.362
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka		
				Dinas Perindustrian	63.995.342
			Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka		
				Dinas Perindustrian	63.995.342
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka		
				Dinas Perindustrian	143.350.512
			Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka		
				Dinas Perindustrian	143.350.512
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu		
				Sekretariat Daerah	37.972.000
			Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana kedinasan Kdh/Wkdh		
				Sekretariat Daerah	1.773.285.328
			Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian		
				Sekretariat Daerah	20.588.484.857
			Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Sekretariat Daerah	36.788.571.172
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		
				Sekretariat Daerah	21.915.681.686
			Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana		
				Sekretariat Daerah	18.948.639.693
			Jumlah Inovasi yang lolos penilaian seleksi skala nasional		
				Sekretariat Daerah	200.245.797
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin		
				Sekretariat Daerah	37.972.000
			Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu		
				Sekretariat Daerah	37.972.000
			Persentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilayani		
				Sekretariat Daerah	37.972.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan		
				Sekretariat Daerah	37.972.000
			Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu		
				Sekretariat Daerah	37.972.000
			Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran		
				Sekretariat Daerah	37.972.000
			Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%		
				Sekretariat Daerah	20.588.484.857
			Persentase SKPD binaan dengan kinerja pelayanan berkategori baik		
				Sekretariat Daerah	200.245.797
			Persentase SKPD binaan dengan nilai RB SKPD berkategori sangat baik		
				Sekretariat Daerah	200.245.797
			Persentase SKPD binaan dengan nilai SAKIP SKPD berkategori sangat baik		
				Sekretariat Daerah	200.245.797
			Persentase SKPD dengan Tingkat Kematangan Level Tinggi		
				Sekretariat Daerah	200.245.797
			Tingkat efisiensi penggunaan anggaran		
				Sekretariat Daerah	20.588.484.857

				Sekretariat Daerah	1.193.138.363
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu		
				Sekretariat Daerah	168.310.394
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual		
				Sekretariat Daerah	33.907.856.768
			Persentase Capaian Penerapan SPM Kabupaten Tapin		
				Sekretariat Daerah	168.310.394
			Persentase informasi pembangunan daerah terhadap publik melalui media massa dan media elektronik		
				Sekretariat Daerah	168.310.394
			persentase kebijakan administrasi pemerintahan yang ditindak lanjuti		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Sekretariat Daerah	168.310.394
			Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel		
				Sekretariat Daerah	168.310.394
			Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu		
				Sekretariat Daerah	168.310.394
			Persentase kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel		
				Sekretariat Daerah	168.310.394
			Persentase Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) SKPD		
				Sekretariat Daerah	168.310.394
			Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah (Perda/Perbup/ SK) yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar		
				Sekretariat Daerah	321.452.340
			Persentase Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang ditinjau lanjuti SKPD		
				Sekretariat Daerah	168.310.394
			Persentase Usulan Raperda/Perbup/Kepbup yang diharmonisasi		
				Sekretariat Daerah	168.310.394
			Persentasi Batas Wilayah Kabuapten yang Terselesaikan		
				Sekretariat Daerah	168.310.394
			Persentasi Hasil Rekomendasi Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti		
				Sekretariat Daerah	33.907.856.768
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase BUMD yang sehat dan profitable		
				Sekretariat Daerah	91.165.800
			Persentase data dan informasi bidang perekonomian daerah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan perekonomian		
				Sekretariat Daerah	159.998.300
			Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) di bidang perekonomian yang difasilitasi		
				Sekretariat Daerah	91.165.800
			Persentase paket pekerjaan yang dapat diselesaikan proses lelangnya		
				Sekretariat Daerah	91.165.800

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement		
				Sekretariat Daerah	165.054.976
			Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu		
				Sekretariat Daerah	91.165.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD		
				Sekretariat DPRD	16.288.527.200
			Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu		
				Sekretariat DPRD	27.844.494.321
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)		
				Sekretariat DPRD	4.630.926.900
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD		
				Sekretariat DPRD	11.815.628.610
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kepada Anggota DPRD		
				Sekretariat DPRD	29.670.000
			Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		
				Sekretariat DPRD	530.953.143
			Persentase Naskah Akademik yang terfasilitasi		
				Sekretariat DPRD	530.953.143
			Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu		
				Sekretariat DPRD	530.953.143
			Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu		
				Sekretariat DPRD	530.953.143
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Rata-rata capaian kinerja kegiatan bappelitbang		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	915.280.648
			Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	9.874.898.953

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Indeks Kualitas Perencanaan		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.909.789.421
			Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921
			Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	552.755.265
			Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921
			Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921
			Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921
			Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921
			Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921
			Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921
			Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921
			Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921
			Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2.462.544.686
			Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2.462.544.686
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Indeks Kualitas Perencanaan		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.028.339.800
			Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	546.398.300
			Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.028.339.800
			Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.028.339.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.797.990.262
			Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%		
				Badan Pendapatan Daerah	8.859.255.029
			Persentase efisiensi penggunaan anggaran		
				Badan Pendapatan Daerah	8.859.255.029
			Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran		
				Badan Pendapatan Daerah	8.859.255.029

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat		
				Badan Pendapatan Daerah	8.859.255.029
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.204.136.020
			Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.204.136.020
			Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.204.136.020
			Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.204.136.020
			Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan		
				Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	101.096.982.100
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.248.850.250
			Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.248.850.250
			Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.248.850.250
			Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.248.850.250
			Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi		
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.248.850.250
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
				Badan Pendapatan Daerah	2.186.157.733
			Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun		
				Badan Pendapatan Daerah	2.186.157.733
			Persentase Penerimaan Piutang Daerah		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Pendapatan Daerah	2.186.157.733
			Persentase peningkatan objek pajak baru		
				Badan Pendapatan Daerah	2.186.157.733
			Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah		
				Badan Pendapatan Daerah	2.186.157.733
			Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah		
				Badan Pendapatan Daerah	4.372.315.466
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.543.126.953
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	944.654.219
			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	944.654.219
			Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	944.654.219

				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.236.712.144
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	517.709.931
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	264.361.576
			Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.141.382.736
			Persentase hasil kelitbangan yang disitasi		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	434.842.576
			Persentase hasil kelitbangan yang disitasi0		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	706.540.160
			Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	264.361.576
			Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	264.361.576
			Persentase rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	264.361.576
			Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD:		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	264.361.576
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Inspektorat	2.358.046.047
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Inspektorat	336.792.294
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Inspektorat	517.404.932
			Persentase pengadaan BMD dalam kondisi baik		
				Inspektorat	1.188.090
			Rata-rata capaian kinerja kegiatan		
				Inspektorat	8.450.499.726

				Inspektorat	502.136.380
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
				Inspektorat	955.425.280
			Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu		
				Inspektorat	2.955.393.280
			Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu		
				Inspektorat	2.955.393.280
			Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu		
				Inspektorat	2.955.393.280
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu		
				Inspektorat	2.955.393.280
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu		
				Inspektorat	2.955.393.280
			Persentase Self Assessment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3		
				Inspektorat	2.955.393.280
			Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3		
				Inspektorat	2.955.393.280
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Pendampingan dan Asistensi		
				Inspektorat	1.085.880.470
			Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu		
				Inspektorat	28.290.873
			Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat		
				Inspektorat	28.290.873
			Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu		
				Inspektorat	28.290.873
			Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu		
				Inspektorat	28.290.873
			Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu		
				Inspektorat	28.290.873

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu		
				Inspektorat	28.290.873
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu		
				Inspektorat	28.290.873
			Persentase Self Assessment per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3		
				Inspektorat	28.290.873
			Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3		
				Inspektorat	28.290.873
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik		
				Kecamatan Piani	2.811.060.395
			Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu		
				Kecamatan Piani	2.811.060.395
			Persentase Penyerapan Anggaran		
				Kecamatan Piani	2.811.060.395
			Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD		
				Kecamatan Piani	2.811.060.395
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Piani	2.811.060.395
			Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik		
				Kecamatan Tapin Selatan	3.546.567.590
			Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu		
				Kecamatan Tapin Selatan	3.546.567.590
			Persentase Penyerapan Anggaran		
				Kecamatan Tapin Selatan	3.546.567.590
			Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD		
				Kecamatan Tapin Selatan	3.546.567.590
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Tapin Selatan	3.546.567.590
			Persentase Aset dengan kondisi yang baik		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Binuang	3.965.015.746
			Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu		
				Kecamatan Binuang	3.965.015.746
			Persentase Penyerapan Anggaran		
				Kecamatan Binuang	3.965.015.746
			Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD		
				Kecamatan Binuang	3.965.015.746
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Binuang	3.965.015.746
			Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik		
				Kecamatan Bungur	2.806.980.406
			Persentase Aset Yang Baik		
				Kecamatan Bungur	8.611.560
			Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu		
				Kecamatan Bungur	2.815.591.966
			Persentase Penyerapan Anggaran		
				Kecamatan Bungur	2.815.591.966
			Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD		
				Kecamatan Bungur	2.815.591.966
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Bungur	2.815.591.966
			Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik		
				Kecamatan Tapin Utara	5.462.538.925
			Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu		
				Kecamatan Tapin Utara	5.462.538.925
			Persentase Penyerapan Anggaran		
				Kecamatan Tapin Utara	5.462.538.925
			Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD		
				Kecamatan Tapin Utara	5.462.538.925
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Tapin Utara	5.462.538.925
			Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Bakarangan	2.897.484.285
			Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu		
				Kecamatan Bakarangan	2.897.484.285
			Persentase Penyerapan Anggaran		
				Kecamatan Bakarangan	2.897.484.285
			Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD		
				Kecamatan Bakarangan	2.897.484.285
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Bakarangan	2.897.484.285
			12		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	49.722.696
			persentase aset dengan kondisi baik		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	531.738.446
			Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	1.970.598.337
			Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	2.502.336.783
			persentase penyerapan anggaran		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	531.738.446
			Persentase Penyerapan Anggaran		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	1.970.598.337
			persentase sarana dan prasarana yang di butuhkan SKPD		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	346.253.940
			Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	1.970.598.337
			persentase sarana dan prasaran yang di butuhkan SKPD		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	185.484.506
			persentase unit kerja yang mendapatkan pelayan administrasi perkantoran		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	346.253.940
			persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	135.761.810
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Candi Laras Selatan	1.970.598.337
			persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	49.722.696

				Kecamatan Candi Laras Selatan	144.440.616
				Kecamatan Candi Laras Utara	2.692.173.990
			Persentase Aset Dengan Kondisi Baik		
				Kecamatan Hatungun	2.708.042.405
			Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu		
				Kecamatan Hatungun	2.708.042.405
			Persentase Penyerapan Anggaran		
				Kecamatan Hatungun	2.708.042.405
			Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD		
				Kecamatan Hatungun	2.708.042.405
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Hatungun	2.708.042.405

				Kecamatan Salam Babaris	2.858.253.823
			Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik		
				Kecamatan Tapin Tengah	2.664.859.507
			Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu		
				Kecamatan Tapin Tengah	2.664.859.507
			Persentase Penyerapan Anggaran		
				Kecamatan Tapin Tengah	2.664.859.507
			Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD		
				Kecamatan Tapin Tengah	2.664.859.507
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Tapin Tengah	2.664.859.507
			Persentase Aset Dengan Kondisi Baik		
				Kecamatan Lokpaikat	7.498.684
			Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik		
				Kecamatan Lokpaikat	3.568.716.910

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu		
				Kecamatan Lokpaikat	3.298.328.403
			Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu0		
				Kecamatan Lokpaikat	277.887.191
			Persentase Penyerapan Anggaran		
				Kecamatan Lokpaikat	3.434.615.594
			Persentase Penyerapan Anggaran 100 Persen 3 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelay		
				Kecamatan Lokpaikat	141.600.000
			Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan SKPD		
				Kecamatan Lokpaikat	7.498.684
			Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD		
				Kecamatan Lokpaikat	3.568.716.910
			Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Lokpaikat	7.498.684
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Lokpaikat	3.427.116.910
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Piani	43.433.280
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Piani	43.433.280
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Piani	43.433.280
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Piani	43.433.280
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Selatan	36.233.280
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Selatan	36.233.280
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Selatan	36.233.280

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Selatan	36.233.280
			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan		
				Kecamatan Binuang	36.226.000
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimla B		
				Kecamatan Binuang	36.226.000
			Persentase Pengaduan Masyakat yang diselesaikan		
				Kecamatan Binuang	36.226.000
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan		
				Kecamatan Binuang	36.226.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Bungur	41.148.000
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Bungur	41.148.000
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bungur	41.148.000
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bungur	41.148.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Utara	39.735.600
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Utara	39.735.600
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	39.735.600
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	39.735.600
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Bakarangan	36.298.320
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Bakarangan	36.298.320
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bakarangan	36.298.320

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bakarangan	36.298.320

				Kecamatan Candi Laras Selatan	36.233.280
				Kecamatan Candi Laras Utara	79.200.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Hatungun	36.233.280
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Hatungun	36.233.280
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Hatungun	36.233.280
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Hatungun	36.233.280

				Kecamatan Salam Babaris	72.000.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Tengah	41.327.880
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
				Kecamatan Tapin Tengah	82.655.760
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Tengah	41.327.880
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Tengah	41.327.880
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Tengah	41.327.880
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Lokpaikat	43.200.000
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Lokpaikat	43.200.000
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Lokpaikat	43.200.000
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Lokpaikat	43.200.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Piani	267.623.408
			Persentase desa dengan administrasi yang baik		
				Kecamatan Piani	260.039.208
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Piani	260.039.208
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Piani	7.584.200
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Piani	267.623.408
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Piani	267.623.408
			Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik		
				Kecamatan Piani	260.039.208
			Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan		
				Kecamatan Piani	260.039.208
			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Selatan	669.999.700
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Selatan	358.767.176
			Persentase desa dengan administrasi yang baik		
				Kecamatan Tapin Selatan	220.776.852
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Selatan	1.028.766.876
			Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan		
				Kecamatan Tapin Selatan	220.776.852
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Selatan	669.999.700
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Tapin Selatan	358.767.176
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Selatan	669.999.700
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Selatan	358.767.176
			Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik		
				Kecamatan Tapin Selatan	220.776.852
			Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan		
				Kecamatan Tapin Selatan	220.776.852
			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan		
				Kecamatan Benuang	2.366.723.263
			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan		
				Kecamatan Benuang	113.716.186
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Benuang	2.480.439.449
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan		
				Kecamatan Benuang	113.716.186
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan		
				Kecamatan Benuang	2.366.723.263
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan		
				Kecamatan Benuang	2.480.439.449
			Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik		
				Kecamatan Benuang	113.716.186
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Bungur	123.904.300
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Bungur	123.904.300
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bungur	123.904.300
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bungur	123.904.300

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik		
				Kecamatan Bungur	117.508.100
			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Utara	319.437.300
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Utara	2.409.277.316
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Utara	911.152.116
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Utara	1.817.562.500
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	319.437.300
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	2.409.277.316
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	319.437.300
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	2.409.277.316
			Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik		
				Kecamatan Tapin Utara	103.136.316
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Bakarangan	171.779.536
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Bakarangan	171.779.536
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bakarangan	171.779.536
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bakarangan	171.779.536
			Persentase desa dengan administrasi yang baik		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	128.716.224
			Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Candi Laras Selatan	128.716.224

				Kecamatan Candi Laras Selatan	15.848.438
			Persentase desa dengan administrasi yang baik		
				Kecamatan Candi Laras Utara	165.347.790
			Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan		
				Kecamatan Candi Laras Utara	165.347.790

				Kecamatan Candi Laras Utara	13.283.250
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Hatungun	130.080.423
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Hatungun	130.080.423
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Hatungun	130.080.423
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Hatungun	7.000.666
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan 100		
				Kecamatan Hatungun	123.079.757
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan		
				Kecamatan Hatungun	123.079.757
			Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan		
				Kecamatan Hatungun	123.079.757
			Persentase desa dengan administrasi yang baik		
				Kecamatan Salam Babaris	111.673.708
			Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan		
				Kecamatan Salam Babaris	111.673.708

				Kecamatan Salam Babaris	5.184.740
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Tapin Tengah	312.654.570
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Tengah	312.654.570
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Tengah	312.654.570
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Tengah	312.654.570
			0Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Lokpaikat	6.851.100
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Lokpaikat	901.690.612
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Lokpaikat	238.541.712
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Lokpaikat	670.000.000
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan		
				Kecamatan Lokpaikat	670.000.000
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Lokpaikat	238.541.712
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan		
				Kecamatan Lokpaikat	670.000.000
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Lokpaikat	238.541.712
			Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik		
				Kecamatan Lokpaikat	231.690.612
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Piani	9.932.500
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Piani	9.932.500
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Piani	9.932.500

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Piani	9.932.500
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Selatan	2.999.776
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Selatan	2.999.776
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Selatan	2.999.776
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Selatan	2.999.776
			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan		
				Kecamatan Binuang	4.417.500
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Binuang	4.417.500
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan		
				Kecamatan Binuang	4.417.500
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan		
				Kecamatan Binuang	4.417.500
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Bungur	3.198.100
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Bungur	3.198.100
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bungur	3.198.100
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bungur	3.198.100
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Utara	2.959.500
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Utara	2.959.500
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	2.959.500

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	2.959.500
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Bakarangan	5.131.800
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Bakarangan	5.131.800
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bakarangan	5.131.800

				Kecamatan Candi Laras Selatan	10.799.608
				Kecamatan Candi Laras Utara	15.584.350
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Hatungun	7.000.666
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Hatungun	7.000.666
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Hatungun	7.000.666
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Hatungun	7.000.666

				Kecamatan Salam Babaris	5.751.240
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Tengah	4.757.200
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal		
				Kecamatan Tapin Tengah	4.757.200
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Tengah	4.757.200
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Tengah	4.757.200
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Piani	38.754.800

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Piani	38.754.800
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Piani	38.754.800
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Piani	38.754.800
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Selatan	40.620.900
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Selatan	40.620.900
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Selatan	40.620.900
			0Indeks Kepuasan Masyakat dalam Pelayanan		
				Kecamatan Binuang	23.065.490
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Binuang	23.065.490
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan		
				Kecamatan Binuang	23.065.490
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan		
				Kecamatan Binuang	23.065.490
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Bungur	25.256.950
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Bungur	25.256.950
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bungur	25.256.950
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bungur	25.256.950
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Utara	9.787.900
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Utara	9.787.900

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	9.787.900
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	9.787.900
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Bakarangan	25.122.600
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Bakarangan	25.122.600
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bakarangan	25.122.600
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bakarangan	25.122.600

				Kecamatan Candi Laras Selatan	28.742.724
				Kecamatan Candi Laras Utara	43.049.400
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Hatungun	33.500.630
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Hatungun	33.500.630
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Hatungun	33.500.630
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Hatungun	33.500.630

				Kecamatan Salam Babaris	56.837.820
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Tengah	40.984.400
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal		
				Kecamatan Tapin Tengah	40.984.400
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Tengah	40.984.400
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Tapin Tengah	40.984.400
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Lokpaikat	26.797.530
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Lokpaikat	26.797.530
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Lokpaikat	26.797.530
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Lokpaikat	26.797.530
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Piani	62.848.480
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik		
				Kecamatan Piani	62.848.480
			Persentase desa dengan administrasi yang baik		
				Kecamatan Piani	62.848.480
			Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik		
				Kecamatan Piani	62.848.480
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Piani	62.848.480
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Piani	62.848.480
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Piani	62.848.480
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Selatan	15.023.664
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik		
				Kecamatan Tapin Selatan	15.023.664
			Persentase desa dengan administrasi yang baik		
				Kecamatan Tapin Selatan	15.023.664
			Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik		
				Kecamatan Tapin Selatan	15.023.664

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Selatan	15.023.664
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Selatan	15.023.664
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Selatan	15.023.664
			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan		
				Kecamatan Binuang	18.968.000
			Persentase desa dengan administrasi yang baik		
				Kecamatan Binuang	18.968.000
			Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik		
				Kecamatan Binuang	18.968.000
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Binuang	18.968.000
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan		
				Kecamatan Binuang	18.968.000
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan		
				Kecamatan Binuang	18.968.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Bungur	26.962.500
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik		
				Kecamatan Bungur	26.962.500
			Persentase desa dengan administrasi yang baik		
				Kecamatan Bungur	26.962.500
			Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik		
				Kecamatan Bungur	26.962.500
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Bungur	26.962.500
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bungur	26.962.500
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bungur	26.962.500

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Utara	26.850.900
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik		
				Kecamatan Tapin Utara	26.850.900
			Persentase desa dengan administrasi yang baik		
				Kecamatan Tapin Utara	26.850.900
			Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik		
				Kecamatan Tapin Utara	26.850.900
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Utara	26.850.900
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	26.850.900
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Utara	26.850.900
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Bakarangan	20.940.000
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik		
				Kecamatan Bakarangan	20.940.000
			Persentase desa dengan administrasi yang baik		
				Kecamatan Bakarangan	20.940.000
			Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik		
				Kecamatan Bakarangan	20.940.000
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Bakarangan	20.940.000
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bakarangan	20.940.000
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Bakarangan	20.940.000
			Persentase desa dengan administrasi yang baik		
				Kecamatan Candi Laras Selatan	234.492.984
				Kecamatan Candi Laras Utara	51.102.582
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Hatungun	26.501.665
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik		
				Kecamatan Hatungun	26.501.665
			Persentase desa dengan administrasi yang baik		
				Kecamatan Hatungun	26.501.665
			Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik		
				Kecamatan Hatungun	26.501.665
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Hatungun	26.501.665
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Hatungun	26.501.665
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Hatungun	26.501.665
			Persentase desa dengan administrasi yang baik		
				Kecamatan Salam Babaris	26.670.754
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Tapin Tengah	29.271.000
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik		
				Kecamatan Tapin Tengah	29.271.000
			Persentase Desa dengan Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Tengah	29.271.000
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Tapin Tengah	29.271.000
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Tengah	29.271.000
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Tapin Tengah	29.271.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
				Kecamatan Lokpaikat	42.273.422
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik		
				Kecamatan Lokpaikat	42.273.422
			Persentase desa dengan administrasi yang baik		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Lokpaikat	42.273.422
			Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik		
				Kecamatan Lokpaikat	42.273.422
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B		
				Kecamatan Lokpaikat	42.273.422
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Lokpaikat	42.273.422
			Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
				Kecamatan Lokpaikat	42.273.422
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.822.739.898
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	216.638.100
			Persentase Kehadiran Masyarakat yang diundang dalam Mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	216.638.100
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.303.091.980
			Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.303.091.980
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase Ormas yang terdata		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	68.422.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	163.859.500
			Persentase masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	163.859.500
			Persentase Ormas yang terdata		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	163.859.500
			Persentase terlaksananya rakor FKUB		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	163.859.500
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	254.914.900
			Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang ditangani		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	254.914.900



3.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kelima dari periode RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Dengan memperhatikan berbagai isu strategis dan permasalahan yang mendesak di Kabupaten Tapin tahun 2022 khususnya tentang pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), serta dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, serta RKP Tahun 2023 (RPJMN 2020-2024) yang memuat program prioritas pembangunan nasional, maka Tema RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2023 yaitu :

Tema RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Untuk Perekonomian Berkelanjutan “ dengan prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas daya manusia dalam rangka mendukung pelayanan publik;
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
3. Penguatan infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian berkelanjutan;

Pengembangan kawasan strategis potensial.Selanjutnya prioritas pembangunan Nasional diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tapin. Adapun sinergitas program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap prioritas pembangunan Nasional yang dituangkan dalam PPAS tahun 2023 dapat terlihat pada **tabel 3.3** sebagai berikut :

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan kualitas dan profesionalitas pelayanan publik						

			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
			Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
					Dinas Perhubungan	3.879.420.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Kecamatan Salam Babaris	199.800.000	
2	Penguatan Infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian						

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
			Meningkatkan akses air minum di Kabupaten Tapin				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000.000	
			Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih1				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
			Terbangunan sarana dan prasarana persampahan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	304.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
			Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah di Kabupaten Tapin				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
			Pembangunan Gedung Kantor				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.625.000.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
			Terbangunnya gedung kantor				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.000.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Pemerataan Pelayanan Dasar untuk meningkatkan kualitas SDM							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu				
				Dinas Pendidikan		165.995.227.434		
				Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu.				
				Dinas Pendidikan		24.733.935		
				Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu				
				Dinas Pendidikan		165.995.227.434		
				Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu.				
				Dinas Pendidikan		24.733.935		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				
				Dinas Pendidikan		166.019.961.369		
				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran				
				Dinas Pendidikan		165.995.227.434		
				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.				
				Dinas Pendidikan		24.733.935		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan		10.858.756.539		
				Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK				
				Dinas Pendidikan		1.774.531.034		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD				
				Dinas Pendidikan		4.975.590.945		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A				
				Dinas Pendidikan		10.858.756.539		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B				
				Dinas Pendidikan		1.774.531.034		
				Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD				
				Dinas Pendidikan		4.975.590.945		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pendidikan	10.858.756.539	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B			
					Dinas Pendidikan	1.774.531.034	
				Angka Putus Sekolah Dasar (SD)			
					Dinas Pendidikan	10.858.756.539	
				Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
					Dinas Pendidikan	1.774.531.034	
				Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD			
					Dinas Pendidikan	4.975.590.945	
				Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PNF			
					Dinas Pendidikan	452.944.000	
				Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD			
					Dinas Pendidikan	10.858.756.539	
				Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP			
					Dinas Pendidikan	1.774.531.034	
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)			
					Dinas Pendidikan	4.975.590.945	
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)			
					Dinas Pendidikan	10.858.756.539	
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)			
					Dinas Pendidikan	1.774.531.034	
				Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun yang mengikuti program Pendidikan Non Formal			
					Dinas Pendidikan	452.944.000	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
				Persentase Pendidik (Guru) yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV			
					Dinas Pendidikan	393.179.892	
				Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan PAUD/PNF			
					Dinas Pendidikan	393.179.892	
				Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SD			
					Dinas Pendidikan	393.179.892	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SMP			
					Dinas Pendidikan	393.179.892	
				Rasio Guru Terhadap Siswa SD			
					Dinas Pendidikan	393.179.892	
				Rasio Guru Terhadap Siswa SMP			
					Dinas Pendidikan	393.179.892	
				Rasio Guru Terhadap Siswa TK			
					Dinas Pendidikan	393.179.892	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase ASN yang dilayani administrasi kepegawaiannya			
					Dinas Kesehatan	149.604.828	
				Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu			
					Dinas Kesehatan	149.604.828	
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu			
					Dinas Kesehatan	149.604.828	
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
					Dinas Kesehatan	149.604.828	
				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Kesehatan	149.604.828	

					Dinas Kesehatan	74.472.380.103	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Persentase Pelayanan Gizi Balita			
					Dinas Kesehatan	2.993.472.922	
				Persentase Pelayanan Kesehatan Anak			
					Dinas Kesehatan	2.993.472.922	
				Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu			
					Dinas Kesehatan	2.993.472.922	
				Persentase PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	2.993.472.922	
				Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat			
					Dinas Kesehatan	2.993.472.922	
				Persentase Penduduk menggunakan Sarana Air Bersih			
					Dinas Kesehatan	2.993.472.922	

					Dinas Kesehatan	16.368.034.836	
				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat			
					Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	61.250.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentase Desa yang memiliki bidan			
					Dinas Kesehatan	2.401.200.000	
				Persentase Kebutuhan Sunberdaya manusia kesehatan			
					Dinas Kesehatan	2.401.200.000	
				Persentase SDM yang kompeten (memiliki STR)			
					Dinas Kesehatan	2.401.200.000	
				Rasio Jumlah Bidan terhadap jumlah penduduk			
					Dinas Kesehatan	2.401.200.000	

					Dinas Kesehatan	55.925.150	
				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran			
					Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.984.755.256	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
					Dinas Kesehatan	112.920.087	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
					Dinas Kesehatan	278.511.212	
				Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri			
					Dinas Kesehatan	278.511.212	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	278.511.212	
				Persentase UKBM (Posyandu) yang dibentuk dan aktif di desa / kelurahan			
					Dinas Kesehatan	278.511.212	

					Dinas Kesehatan	155.653.035	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	558.031.840	

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.774.119.955	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Tercapainya Normalisasi/ Restorasi Sungai			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.405.000.000	

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.375.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				Meningkatkan akses air minum di Kabupaten Tapin			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.211.327.509	
				Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih1			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.211.327.509	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
				Terbangunan sarana dan prasarana persampahan			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.696.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah di Kabupaten Tapin			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.950.000.000		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Pembangunan Gedung Kantor					
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.915.412.471		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Terbangunnya gedung kantor					
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.400.000.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten					
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	144.597.500.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)					
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.265.390		

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	140.287.400		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang					
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.367.620.244		

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.732.379.573		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu					
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.124.905.590		
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.571.719.448	
				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.635.462.323	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten			
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	123.517.750	
				Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten			
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	783.759.250	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				Persentase penurunan kawasan kumuh			
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.285.520.750	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
				Persentase peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni			
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6.739.811.500	
				Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani			
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6.739.811.500	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
				Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (KRB)			
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16.936.041.600	
				Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16.936.041.600	
				Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik			
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16.936.041.600	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja			
					Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	8.744.316	

					Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	7.784.398.179	
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan Tepat Waktu			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.833.620.485	
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	238.001.236	
				Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.316.725.098	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih			
					Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	3.007.946.428	
				Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
					Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	3.007.946.428	
				Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3			
					Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	3.140.335.928	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan			
					Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	3.007.946.428	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
			Memastikan Pasca Bencana tertangani				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.307.650	
			Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	626.471.714	
			Menurunkan Indeks Risiko Bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300.871.140	
			Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	126.882.140	
			Persentase daerah terdampak bencana yang pulih				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	173.989.000	
			Persentase Desa Tangguh Bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	173.989.000	
			Tertanganinya Kebakaran Hutan dan Lahan yang di Bakar				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	325.600.574	
			Tertanganinya Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terbakar				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	325.600.574	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	446.953.729		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar				
					Dinas Sosial	9.488.232		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik				
					Dinas Sosial	806.740.293		
				Persentase pelayanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar				
					Dinas Sosial	3.238.289.962		
				Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar				
					Dinas Sosial	1.077.501.509		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil				
					Dinas Sosial	1.413.692.259		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial				
					Dinas Sosial	5.077.710.674		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial				
					Dinas Sosial	43.953.150		
				Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi dalam permodalan				
					Dinas Sosial	1.546.840.712		
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				
					Dinas Sosial	184.878.920		
				Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani				
					Dinas Sosial	218.244.410		
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam kondisi baik			
					Dinas Sosial	47.544.318	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Meningkatnya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
					Dinas Tenaga Kerja	22.381.700	

					Dinas Tenaga Kerja	4.990.886.733	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			
					Dinas Tenaga Kerja	640.730.738	
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat			
					Dinas Tenaga Kerja	640.730.738	
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan			
					Dinas Tenaga Kerja	640.730.738	
				Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan			
					Dinas Tenaga Kerja	640.730.738	
				Rasio lowongan kerja dengan pencari kerja			
					Dinas Tenaga Kerja	640.730.738	

					Dinas Tenaga Kerja	15.341.650	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat			
					Dinas Tenaga Kerja	2.979.160.326	
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan			
					Dinas Tenaga Kerja	2.979.160.326	
				Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan			
					Dinas Tenaga Kerja	2.979.160.326	

					Dinas Tenaga Kerja	656.583.840	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)			
					Dinas Tenaga Kerja	35.122.508	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek			
					Dinas Tenaga Kerja	35.122.508	

					Dinas Tenaga Kerja	168.984.700	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai Kepuasan Masyarakat			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.603.584.872	
				Nilai Kepuasan Masyarakat			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.981.777	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.618.566.649	
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.618.566.649	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.981.062	
				Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.981.062	
				Persentase keluarga pelaku usaha			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.981.062	
				Persentase perempuan yang terlibat di pemerintahan daerah			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.981.062	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase perkawinan usia anak			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.981.062	
				Prosentase anggaran yang responsive gender pada belanja langsung APBD			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	206.181.103	
				Prosentase keterlibatan perempuan di parlemen			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	206.181.103	
				Prosentase pelaku usaha rumahan perempuan			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	206.181.103	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.400.410	
				Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.400.410	
				Persentase keluarga pelaku usaha			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.400.410	
				Persentase perkawinan usia anak			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.400.410	
				Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	117.958.944	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
				Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	407.002.574	
				Persentase keluarga pelaku usaha			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	407.002.574	
				Persentase perkawinan usia anak			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	407.002.574	
				Prosentase perkawinan Usia anak di Kabupaten Tapin			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	522.392.318	
				Prosetase keluarga yang dibina			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	522.392.318	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
				Persentase data SIMFONI dan SIGA yang terinput			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	122.743.390	
				Prosentase SKPD yang menggunakan Buku Data Terpilah Gender dan Anak sebagai salah satu bahan dalam Penyusunan Anggaran dan PPRG SKPD			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	122.743.390	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				Capaian Kabupaten Layak Anak			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	510.814.355	
				Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.153.251	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	510.814.355	
				Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	510.814.355	
				Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	510.814.355	
				Persentase keluarga pelaku usaha			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.153.251	
				Persentase pelaku usaha rumahan perempuan			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.153.251	
				Persentase perempuan yang terlibat di pemerintahan daerah			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.153.251	
				Persentase perkawinan usia anak			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.153.251	
				Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	510.814.355	
				Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	510.814.355	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
				Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.912.541	
				Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.912.541	
				Rasio Kekerasan terhadap Anak			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	62.276.578	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
					Dinas Ketahanan Pangan	2.486.503.848	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
					Dinas Ketahanan Pangan	72.647.229	

					Dinas Ketahanan Pangan	1.481.674.022	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Ketersediaan Pangan Utama			
					Dinas Ketahanan Pangan	453.329.367	
				Persentase pangan yang aman dikonsumsi			
					Dinas Ketahanan Pangan	453.329.367	

					Dinas Ketahanan Pangan	1.352.433.834	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
				Ketersediaan Pangan Utama			
					Dinas Ketahanan Pangan	53.507.200	
				Persentase pangan yang aman dikonsumsi			
					Dinas Ketahanan Pangan	53.507.200	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	

					Dinas Ketahanan Pangan	89.638.542		
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					

					Dinas Ketahanan Pangan	79.932.000		
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
				Persentase advokasi pertanahan yang berhasil				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	169.635.700		
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					
				Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.000.305.900		
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					
				Persentase cakupan data penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	366.644.950		
				Persentase penataan administrasi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	366.644.950		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun				
					Dinas Lingkungan Hidup	34.301.936		
				Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang wajib disusun				
					Dinas Lingkungan Hidup	278.210.812		
				Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Lingkungan Hidup	3.872.658.556	
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
					Dinas Lingkungan Hidup	34.301.936	
				Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik			
					Dinas Lingkungan Hidup	8.319.462.452	
				Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik			
					Dinas Lingkungan Hidup	292.486.208	
				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Lingkungan Hidup	8.646.250.596	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah			
					Dinas Lingkungan Hidup	919.926.604	
				Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu			
					Dinas Lingkungan Hidup	919.926.604	
				Persentase Rekomendasi Dokumen Lingkungan yang Ditindaklanjuti			
					Dinas Lingkungan Hidup	919.926.604	
				Persentase Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan yang Dikendalikan			
					Dinas Lingkungan Hidup	919.926.604	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
					Dinas Lingkungan Hidup	919.926.604	
				Status Mutu Air			
					Dinas Lingkungan Hidup	919.926.604	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Lingkungan Hidup	1.149.773.524	
				Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati			
					Dinas Lingkungan Hidup	1.149.773.524	
				Persentase Parameter Air Permukaan yang diuji Sesuai Baku Mutu			
					Dinas Lingkungan Hidup	1.529.562.164	
				Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Krlteria Baku			
					Dinas Lingkungan Hidup	1.149.773.524	
				Persentase parameter kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu			
					Dinas Lingkungan Hidup	379.788.640	
				Persentase Parameter Kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu			
					Dinas Lingkungan Hidup	1.149.773.524	
				Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu			
					Dinas Lingkungan Hidup	1.149.773.524	
				Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025			
					Dinas Lingkungan Hidup	1.529.562.164	
				Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid sesuai SNI dan ISO 17025			
					Dinas Lingkungan Hidup	235.888.225	
				Persentase parameter udara yang diuji sesuai baku mutu			
					Dinas Lingkungan Hidup	379.788.640	
				Persentase Parameter Udara yang diuji sesuai baku mutu			
					Dinas Lingkungan Hidup	1.149.773.524	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase penurunan emisi gas rumah kaca di business as usual			
					Dinas Lingkungan Hidup	143.900.415	
				Persentase Penurunan emisi gas rumah kaca di business as usual			
					Dinas Lingkungan Hidup	235.888.225	
				Status Mutu Air			
					Dinas Lingkungan Hidup	1.149.773.524	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
				Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati			
					Dinas Lingkungan Hidup	2.505.288.671	
				Persentase Luas ruang terbuka hijau (RTH) 3 kecamatan di Kabupaten Tapin			
					Dinas Lingkungan Hidup	2.505.288.671	
				Persentase Pertambahan populasi bekantan di kawasan bernilai penting			
					Dinas Lingkungan Hidup	2.505.288.671	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
				Persentase cakupan area pelayanan			
					Dinas Lingkungan Hidup	22.488.127	
				Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan			
					Dinas Lingkungan Hidup	22.488.127	
				Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan			
					Dinas Lingkungan Hidup	58.588.019	
				Persentase volume sampah yang tertangani			
					Dinas Lingkungan Hidup	22.488.127	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
				Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaranair			
					Dinas Lingkungan Hidup	29.944.145	
				Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran udara			
					Dinas Lingkungan Hidup	29.944.145	
				Persentase MHA yang ditetapkan haknya			
					Dinas Lingkungan Hidup	29.944.145	
				Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air			
					Dinas Lingkungan Hidup	29.944.145	
				Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara			
					Dinas Lingkungan Hidup	29.944.145	
				Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan			
					Dinas Lingkungan Hidup	29.944.145	
				Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi			
					Dinas Lingkungan Hidup	29.944.145	
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				
				Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas			
					Dinas Lingkungan Hidup	42.607.700	
				Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya			
					Dinas Lingkungan Hidup	131.299.867	
				Persentase Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan peningkatan kapasitas			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Lingkungan Hidup	88.692.167	
				Persentase MHA yang ditetapkan haknya			
					Dinas Lingkungan Hidup	88.692.167	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup			
					Dinas Lingkungan Hidup	52.750.418	
				Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati			
					Dinas Lingkungan Hidup	52.750.418	
				Persentase MHA yang ditetapkan haknya			
					Dinas Lingkungan Hidup	52.750.418	
				Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku			
					Dinas Lingkungan Hidup	52.750.418	
				Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu			
					Dinas Lingkungan Hidup	52.750.418	
				Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan			
					Dinas Lingkungan Hidup	52.750.418	
				Status Mutu Air			
					Dinas Lingkungan Hidup	52.750.418	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang dilakukan fasilitasi dan pembinaan mendapatkan penghargaan			
					Dinas Lingkungan Hidup	589.818.215	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Krlteria Baku			
					Dinas Lingkungan Hidup	589.818.215	
				Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu			
					Dinas Lingkungan Hidup	589.818.215	
				Persentase sekolah yang menjadi sekolah adiwiyata			
					Dinas Lingkungan Hidup	589.818.215	
				Status Mutu Air			
					Dinas Lingkungan Hidup	589.818.215	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti			
					Dinas Lingkungan Hidup	41.068.582	
				Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air			
					Dinas Lingkungan Hidup	41.068.582	
				Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara			
					Dinas Lingkungan Hidup	41.068.582	
				Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi			
					Dinas Lingkungan Hidup	41.068.582	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				Persentase areal publik bebas sampah			
					Dinas Lingkungan Hidup	5.389.688.517	
				Persentase cakupan area pelayanan			
					Dinas Lingkungan Hidup	10.779.377.034	
				Persentase jumlah desa/kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Lingkungan Hidup	5.389.688.517		
				Persentase jumlah fasilitas pengelolaan sampah (bank sampah, TPS 3R, rumah kompos) yang beroperasi aktif				
					Dinas Lingkungan Hidup	5.389.688.517		
				Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan				
					Dinas Lingkungan Hidup	5.389.688.517		
				Persentase sampah yang dikurangi				
					Dinas Lingkungan Hidup	5.389.688.517		
				Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu (siang hari)				
					Dinas Lingkungan Hidup	5.389.688.517		
				Persentase volume sampah yang ditangani				
					Dinas Lingkungan Hidup	5.389.688.517		
				Persentase volume sampah yang tertangani				
					Dinas Lingkungan Hidup	5.389.688.517		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Kategori Minimal Hasil Evaluasi SAKIP				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.357.232		
				Persentase Aset Tercatat				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	156.228.229		
				Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat/keahlian sesuai dengan jabatannya				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.721.252.064		
				Persentase Pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.721.252.064		
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.995.499.559	
				Persentase Penyerapan Anggaran			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.297.449.780	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
				IKM terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.004.764	
				IKM Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	288.695.732	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
				IKM Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	435.942.607	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Persentase Jumlah Instansi Yang Bekerjasama dalam Bidang Pelayanan Kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	121.499.200	
				Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	121.499.200	
				Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Kependudukan yang diterbitkan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.819.540	
				Tingkat Akurasi Data Orang lahir, mati, pindah, dan datang			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	194.155.662	
				Tingkat Akurasi Data Perorangan Pada Kartu Keluarga			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	194.155.662	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.957.369.804	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.705.939.876	
				Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.540.812	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	275.200.421	
				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	227.743.626	
				Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	92.682.656	
			PROGRAM PENATAAN DESA				
				Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.222.666	
				Persentase PKK aktif			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.222.666	
				Persentase posyandu aktif			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.222.666	
				Program Penataan Desa			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.222.666	
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.222.666	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				
				Persentase BUMDes menghasilkan laba			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.885.260.491	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase BUMDes yang aktif			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.885.260.491	
				Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.885.260.491	
				Persentase PKK aktif			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.885.260.491	
				Persentase posyandu aktif			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.885.260.491	
				Program Peningkatan Kerjasama Desa			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.885.260.491	
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.885.260.491	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase BUMDES yang aktif			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.133.484.628	
				Persentase Bumdes yang menghasilkan laba			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.133.484.628	
				Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.133.484.628	
				Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.133.484.628	
				Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.133.484.628	
				Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.133.484.628		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase Bumdes yang aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.019.385.982		
				Persentase Bumdes yang menghasilkan laba				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.019.385.982		
				Persentase PKK aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.012.923.988		
				Persentase posyandu aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.012.923.988		
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.019.385.982		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90%				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.170.454.083		
				Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.170.454.083		
				Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.170.454.083		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	413.533.436		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	413.533.436	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
				Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 Tahun)			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	744.478.936	
				Persentase Peserta KB Aktif MKJP			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	744.478.936	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
				Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.184.954.844	
				Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.184.954.844	
				Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.184.954.844	
				Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.184.954.844	
				Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja			
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.184.954.844	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
					Dinas Perhubungan	719.017.537	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
					Dinas Perhubungan	46.512.740		
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Perhubungan	172.375.937		
				Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Perhubungan	209.050.000		
				Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
					Dinas Perhubungan	3.163.968.795		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Persentase angkutan umum yang memiliki izin trayek				
					Dinas Perhubungan	55.418.760		
				Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar				
					Dinas Perhubungan	55.418.760		
				Persentase penurunan rasio kecelakaan lalu-lintas darat terhadap jumlah kendaraan bermotor				
					Dinas Perhubungan	55.418.760		
				Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				
					Dinas Perhubungan	115.150.000		
				Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
					Dinas Perhubungan	542.372.218		
				Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
					Dinas Perhubungan	199.913.880		
				Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				
					Dinas Perhubungan	339.692.600		
				Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				
					Dinas Perhubungan	89.974.440		
				Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
					Dinas Perhubungan	158.878.014		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			
					Dinas Perhubungan	81.743.250	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
				Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar			
					Dinas Perhubungan	135.174.220	
				Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			
					Dinas Perhubungan	929.413.916	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	5.854.165.323	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Persentase Layanan Informasi Berbasis TI			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.599.980.550	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	2.606.551.172	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
				Persentase Koperasi Aktif			
					Dinas Perindustrian	17.070.900	
				Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat			
					Dinas Perindustrian	17.070.900	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
				Persentase Koperasi Aktif			
					Dinas Perindustrian	20.387.694	
				Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat			
					Dinas Perindustrian	20.387.694	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
				Persentase Koperasi Aktif			
					Dinas Perindustrian	51.866.250	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat			
					Dinas Perindustrian	51.866.250	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
				Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Mikro			
					Dinas Perindustrian	75.426.311	
				Persentase UMKM Yang Memilikilzin Usaha			
					Dinas Perindustrian	75.426.311	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.850.204.665	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
				Nilai Investasi			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	393.625.521	
				Persentase dokumen RUPM yang tersedia			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	294.166.595	
				Persentase rekomendasi PM (investor baru)			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	294.166.595	
				Pertumbuhan Penanaman Modal			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	294.166.595	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
				Nilai Investasi			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.425.140	
				Persentase jenis investasi/promosi yang dipublikasikan			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.425.140	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase stakeholder yang menggunakan informasi/promosi investasi yang dipublikasikan			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.425.140	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	742.944.046	
				Persentase investasi yang lolos izin lingkungan			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	742.944.046	
				Persentase izin yang update			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	742.944.046	
				Persentase Pelaku Usaha yang berizin			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	742.944.046	
				Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	742.944.046	
				Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	742.944.046	
				Persentase perizinan yang diterbitkan			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	742.944.046	
				Persentase terlaksananya SOP Pelayanan			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	742.944.046	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
				Nilai Investasi			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.048.475	
				Persentase pelaku usaha yang memiliki izin			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.048.475	
				Persentase Perumbuhan Investasi			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.048.475	
				Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.048.475	
				Persentase Rasio angka kerja yang terserap terhadap nilai investasi			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.048.475	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
				Persentase data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang update			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.359.160	
				Persentase perizinan yang diterbitkan			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.359.160	
				Persentase terlaksananya SOP Pelayanan			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.359.160	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi			
					Dinas Pemuda dan Olahraga	1.107.525.631	
				Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemuda dan Olahraga	2.930.925.452	
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi			
					Dinas Pemuda dan Olahraga	14.469.504	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			
					Dinas Pemuda dan Olahraga	324.179.456	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik			
					Dinas Pemuda dan Olahraga	128.165.628	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			
					Dinas Pemuda dan Olahraga	865.517.676	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi			
					Dinas Pemuda dan Olahraga	1.224.966.403	
				Persentase organisasi kepemudaan yang aktif			
					Dinas Pemuda dan Olahraga	1.224.966.403	
				Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
					Dinas Pemuda dan Olahraga	1.255.463.221	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
				Jumlah Cabang Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional			
					Dinas Pemuda dan Olahraga	2.075.869.470	
				Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional			
					Dinas Pemuda dan Olahraga	2.075.869.470	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
					Dinas Pemuda dan Olahraga	961.128.830	
				Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			
					Dinas Pemuda dan Olahraga	6.986.900.859	
				Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
					Dinas Pemuda dan Olahraga	1.567.865.394	
				Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
					Dinas Pemuda dan Olahraga	1.060.161.054	
				Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik			
					Dinas Pemuda dan Olahraga	2.075.869.470	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
				Persentase organisasi kepemudaan yang aktif			
					Dinas Pemuda dan Olahraga	1.041.754.948	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
				Persentase Layanan Data Statistik Sektoral yang disajikan			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	95.627.800	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Persentase Layanan Pengamanan Informasi dan Persandian			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	100.518.197	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks kepuasan pelayanan ASN Disudpar			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.386.969.177	
				Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	77.337.053	
				Persentase Jasa Penunjang yang tersedia			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	251.671.000	
				Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.232.460.358	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	93.072.134	
				Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.335.650	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
				Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	65.086.548	
				Persentase Pemangku Adat Dayak yang Aktif			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	326.812.008	
				Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	65.086.548	
				Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	65.086.548	
				Persentase Sanggar/Seni Budaya yang mengikuti event seni dan budaya			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	583.495.380	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
				Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	523.286.080	
				Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	523.286.080	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	22.556.436	
				Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	170.235.200	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
				Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	130.073.892	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.088.316.225	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	765.814.608	
				Persentase Pemustaka (pengunjung perpustakaan)			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	765.814.608	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	374.828.184	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84.609.394	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			
					Dinas Perikanan	67.586.760	
				Jumlah Waktu penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
					Dinas Perikanan	1.093.426.017	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor dan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			
					Dinas Perikanan	925.539.466	
				Waktu Pengadaan peralatan gedung kantor			
					Dinas Perikanan	428.451.852	
				waktu penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					Dinas Perikanan	4.065.612.301	
				waktu Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					Dinas Perikanan	313.776.400	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya			
					Dinas Perikanan	195.188.220	
				Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap			
					Dinas Perikanan	195.188.220	
				Presentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas			
					Dinas Perikanan	195.188.220	
				Waktu pemanfaatan sumberdaya perairan (bulan)			
					Dinas Perikanan	47.506.082	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Jumlah Bulan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
					Dinas Perikanan	1.756.741.801	
				Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya			
					Dinas Perikanan	22.730.000	
				Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap			
					Dinas Perikanan	22.730.000	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
				Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap			
					Dinas Perikanan	156.634.988	
				Presentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas			
					Dinas Perikanan	156.634.988	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
				jumlah waktu Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perikanan	5.783.834	
				Jumlah Waktu pengolahan informasi data atas hasil perikanan (Bulan)			
					Dinas Perikanan	54.395.010	
				Jumlah Waktu Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan			
					Dinas Perikanan	418.221.677	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Persentase destinasi pariwisata yang terpelihara dengan baik			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	397.397.584	
				Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	72.565.000	
				Persentase sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang terpenuhi			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	369.740.940	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	875.609.082	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
				Persentase Pokdarwis yang mengikuti pelatihan/bimtek kepariwisataan			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	60.398.534	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	677.615.318	
				Persentase pelaku usaha yang mengikuti pelatihan/bimtek usaha pariwisata			
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26.043.820	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP			
					Dinas Pertanian	16.867.266.290	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Aset yang tercatat			
					Dinas Pertanian	16.867.266.290	
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu			
					Dinas Pertanian	16.867.266.290	
				Persentase penyerapan Anggaran SKPD			
					Dinas Pertanian	16.867.266.290	
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
					Dinas Pertanian	16.867.266.290	
				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Pertanian	16.867.266.290	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Angka konsumsi daging per kapita			
					Dinas Pertanian	702.000.000	
				Jumlah Produksi Daging (Ton)			
					Dinas Pertanian	1.066.692.440	
				Jumlah Produksi Telur (Ton)			
					Dinas Pertanian	1.066.692.440	
				Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)			
					Dinas Pertanian	702.000.000	
				Persentase Peningkatan Produksi Daging (%)			
					Dinas Pertanian	1.066.692.440	
				Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)			
					Dinas Pertanian	1.066.692.440	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Angka konsumsi daging per kapita			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Jumlah luas lahan fungsional			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Jumlah luas lahan fungsional yang ditanami (Ha)			
					Dinas Pertanian	8.300.800.000	
				Luas Panen Bawang Merah			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Luas Panen Cabe Rawit Hiyung			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Luas Panen Jagung			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Luas Panen Jeruk			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Luas Panen Kedelai			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Luas Panen Padi			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Persentase Kelas Kelompok Tani Madya			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Persentase lahan sawah fungsional yang terairi			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Persentase penyakit hewan yang tertangani			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Populasi kambing			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Populasi sapi			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Populasi unggas			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Produktivitas Bawang Merah			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Produktivitas Cabe Rawit			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Produktivitas Jagung			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Produktivitas Jeruk			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pertanian	39.600.000	
				Produktivitas Kedelai			
					Dinas Pertanian	39.600.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				Angka konsumsi daging per kapita			
					Dinas Pertanian	66.000.000	
				Jumlah Waktu Pelaksanaan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			
					Dinas Pertanian	5.956.500	
				Jumlah Waktu Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			
					Dinas Pertanian	571.962.500	
				Jumlah Waktu Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			
					Dinas Pertanian	24.000.000	
				Persentase penyakit hewan yang tertangani			
					Dinas Pertanian	66.000.000	
				Populasi kambing			
					Dinas Pertanian	66.000.000	
				Populasi sapi			
					Dinas Pertanian	66.000.000	
				Populasi unggas			
					Dinas Pertanian	66.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Jumlah kemitraan pemasaran hasil hortikultura			
					Dinas Pertanian	126.000.000	
				Luas Panen Jagung			
					Dinas Pertanian	126.000.000	
				Luas Panen Kedelai			
					Dinas Pertanian	126.000.000	
				Luas Panen Padi			
					Dinas Pertanian	126.000.000	
				Luas Tanaman Karet			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pertanian	126.000.000	
				Luas Tanaman Sawit			
					Dinas Pertanian	126.000.000	
				Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan			
					Dinas Pertanian	126.000.000	
				Persentase Kelas Kelompok Tani Madya			
					Dinas Pertanian	126.000.000	
				Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hortikultura			
					Dinas Pertanian	126.000.000	
				Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis			
					Dinas Pertanian	126.000.000	
				Produktivitas Jagung			
					Dinas Pertanian	126.000.000	
				Produktivitas Kedelai			
					Dinas Pertanian	126.000.000	
				Produktivitas Padi			
					Dinas Pertanian	126.000.000	
				Produktivitas Tanaman Karet			
					Dinas Pertanian	126.000.000	
				Produktivitas Tanaman Sawit			
					Dinas Pertanian	126.000.000	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
				Luas Tanaman Karet			
					Dinas Pertanian	43.200.000	
				Luas Tanaman Sawit			
					Dinas Pertanian	43.200.000	
				Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan			
					Dinas Pertanian	43.200.000	
				Produktivitas Tanaman Karet			
					Dinas Pertanian	43.200.000	
				Produktivitas Tanaman Sawit			
					Dinas Pertanian	43.200.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentase Kelas Kelompok Tani Madya				
					Dinas Pertanian	491.500.000		
				Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis				
					Dinas Pertanian	491.500.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP Dinas Perdagangan				
					Dinas Perdagangan	11.213.210		
				Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian ASN				
					Dinas Perdagangan	11.213.210		
				Persentase Penyerapan Anggaran				
					Dinas Perdagangan	11.213.210		

					Dinas Perdagangan	5.172.851.799		
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB				
					Dinas Perdagangan	49.407.304		
				Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang				
					Dinas Perdagangan	49.407.304		
				Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan				
					Dinas Perdagangan	49.407.304		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Persentase Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah				
					Dinas Perdagangan	2.886.308.074		
				Persentase informasi harga Barang Pokok dan Penting yang akurat				
					Dinas Perdagangan	2.886.308.074		
				Persentase pasar tradisional yang dibangun				
					Dinas Perdagangan	2.886.308.074		
				Persentase pasar tradisional yang direvitalisasi				
					Dinas Perdagangan	2.886.308.074		
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Perdagangan	2.886.308.074		
				Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar				
					Dinas Perdagangan	2.886.308.074		

					Dinas Perdagangan	151.255.802		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Persentase Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah				
					Dinas Perdagangan	61.415.630		
				Persentase Informasi Harga Barang Pokok dan Penting yang Akurat				
					Dinas Perdagangan	61.415.630		
				Persentase pasar tradisional yang dibangun				
					Dinas Perdagangan	61.415.630		
				Persentase pasar tradisional yang direvitalisasi				
					Dinas Perdagangan	61.415.630		
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI				
					Dinas Perdagangan	61.415.630		
				Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar				
					Dinas Perdagangan	61.415.630		

					Dinas Perdagangan	14.999.952		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipasarkan				
					Dinas Perdagangan	173.105.215		
				Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang				
					Dinas Perdagangan	173.105.215		
				Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan				
					Dinas Perdagangan	173.105.215		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Persentase Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah				
					Dinas Perdagangan	224.966.294		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI				
					Dinas Perdagangan	224.966.294		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipasarkan				
					Dinas Perdagangan	305.939.920		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Rata-rata capaian kinerja kegiatan				
					Dinas Perindustrian	7.500.189		

					Dinas Perindustrian	4.995.337.573		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia				
					Dinas Perindustrian	731.031.362		
				Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka				
					Dinas Perindustrian	731.031.362		
				Persentase bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia				
					Dinas Perindustrian	731.031.362		
				Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka				
					Dinas Perindustrian	731.031.362		
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka				
					Dinas Perindustrian	63.995.342		
				Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka				
					Dinas Perindustrian	63.995.342		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka				
					Dinas Perindustrian	143.350.512		
				Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka				
					Dinas Perindustrian	143.350.512		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sekretariat Daerah	37.972.000	
				Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana kedinasan Kdh/Wkdh			
					Sekretariat Daerah	1.773.285.328	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian			
					Sekretariat Daerah	20.588.484.857	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Sekretariat Daerah	36.788.571.172	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			
					Sekretariat Daerah	21.915.681.686	
				Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana			
					Sekretariat Daerah	18.948.639.693	
				Jumlah Inovasi yang lolos penilaian seleksi skala nasional			
					Sekretariat Daerah	200.245.797	
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin			
					Sekretariat Daerah	37.972.000	
				Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu			
					Sekretariat Daerah	37.972.000	
				Persentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilayani			
					Sekretariat Daerah	37.972.000	
				Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan			
					Sekretariat Daerah	37.972.000	
				Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu			
					Sekretariat Daerah	37.972.000	
				Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran			
					Sekretariat Daerah	37.972.000	
				Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%			
					Sekretariat Daerah	20.588.484.857	
				Persentase SKPD binaan dengan kinerja pelayanan berkategori baik			
					Sekretariat Daerah	200.245.797	
				Persentase SKPD binaan dengan nilai RB SKPD berkategori sangat baik			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Sekretariat Daerah	200.245.797		
				Persentase SKPD binaan dengan nilai SAKIP SKPD berkategori sangat baik				
					Sekretariat Daerah	200.245.797		
				Persentase SKPD dengan Tingkat Kematangan Level Tinggi				
					Sekretariat Daerah	200.245.797		
				Tingkat efisiensi penggunaan anggaran				
					Sekretariat Daerah	20.588.484.857		

					Sekretariat Daerah	1.193.138.363		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu				
					Sekretariat Daerah	168.310.394		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual				
					Sekretariat Daerah	33.907.856.768		
				Persentase Capaian Penerapan SPM Kabupaten Tapin				
					Sekretariat Daerah	168.310.394		
				Persentase informasi pembangunan daerah terhadap publik melalui media massa dan media elektronik				
					Sekretariat Daerah	168.310.394		
				persentase kebijakan administrasi pemerintahan yang ditindak lanjuti				
					Sekretariat Daerah	168.310.394		
				Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel				
					Sekretariat Daerah	168.310.394		
				Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu				
					Sekretariat Daerah	168.310.394		
				Persentase kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel				
					Sekretariat Daerah	168.310.394		
				Persentase Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) SKPD				
					Sekretariat Daerah	168.310.394		
				Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sekretariat Daerah	321.452.340	
				Persentase Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang ditinjau lanju ti SKPD			
					Sekretariat Daerah	168.310.394	
				Persentase Usulan Raperda/Perbup/Keppup yang diharmonisasi			
					Sekretariat Daerah	168.310.394	
				Persentasi Batas Wilayah Kabuapten yang Terselesaikan			
					Sekretariat Daerah	168.310.394	
				Persentasi Hasil Rekomendasi Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan yang ditindaklanju ti			
					Sekretariat Daerah	33.907.856.768	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase BUMD yang sehat dan profitable			
					Sekretariat Daerah	91.165.800	
				Persentase data dan informasi bidang perekonomian daerah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan perekonomian			
					Sekretariat Daerah	159.998.300	
				Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) di bidang perekonomian yang difasilitasi			
					Sekretariat Daerah	91.165.800	
				Persentase paket pekerjaan yang dapat diselesaikan proses lelangnya			
					Sekretariat Daerah	91.165.800	
				Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement			
					Sekretariat Daerah	165.054.976	
				Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu			
					Sekretariat Daerah	91.165.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD			
					Sekretariat DPRD	16.288.527.200	
				Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu			
					Sekretariat DPRD	27.844.494.321	
				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)			
					Sekretariat DPRD	4.630.926.900	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD				
					Sekretariat DPRD	11.815.628.610		
				Indeks Kepuasan Pelayanan Kepada Anggota DPRD				
					Sekretariat DPRD	29.670.000		
				Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD				
					Sekretariat DPRD	530.953.143		
				Persentase Naskah Akademik yang terfasilitasi				
					Sekretariat DPRD	530.953.143		
				Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu				
					Sekretariat DPRD	530.953.143		
				Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu				
					Sekretariat DPRD	530.953.143		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Rata-rata capaian kinerja kegiatan bappelitbang				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	915.280.648		
				Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	9.874.898.953		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Indeks Kualitas Perencanaan				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.909.789.421		
				Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921	
				Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	552.755.265	
				Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921	
				Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921	
				Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921	
				Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921	
				Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921	
				Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921	
				Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921	
				Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921	
				Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.667.276.921	
				Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2.462.544.686	
				Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2.462.544.686	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Indeks Kualitas Perencanaan			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.028.339.800	
				Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	546.398.300	
				Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.028.339.800	
				Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.028.339.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.797.990.262	
				Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%			
					Badan Pendapatan Daerah	8.859.255.029	
				Persentase efisiensi penggunaan anggaran			
					Badan Pendapatan Daerah	8.859.255.029	
				Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran			
					Badan Pendapatan Daerah	8.859.255.029	
				Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat			
					Badan Pendapatan Daerah	8.859.255.029	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.204.136.020	
				Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.204.136.020	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.204.136.020	
				Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.204.136.020	
				Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan			
					Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	101.096.982.100	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.248.850.250	
				Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.248.850.250	
				Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.248.850.250	
				Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.248.850.250	
				Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.248.850.250	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah			
					Badan Pendapatan Daerah	2.186.157.733	
				Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Pendapatan Daerah	2.186.157.733	
				Persentase Penerimaan Piutang Daerah			
					Badan Pendapatan Daerah	2.186.157.733	
				Persentase peningkatan objek pajak baru			
					Badan Pendapatan Daerah	2.186.157.733	
				Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah			
					Badan Pendapatan Daerah	2.186.157.733	
				Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah			
					Badan Pendapatan Daerah	4.372.315.466	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.543.126.953	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	944.654.219	
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	944.654.219	
				Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	944.654.219	

					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.236.712.144	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	517.709.931	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	264.361.576	
				Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.141.382.736	
				Persentase hasil kelitbangan yang disitasi			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	434.842.576	
				Persentase hasil kelitbangan yang disitasi0			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	706.540.160	
				Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	264.361.576	
				Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	264.361.576	
				Persentase rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	264.361.576	
				Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD:			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	264.361.576	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					Inspektorat	2.358.046.047	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Inspektorat	336.792.294	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Inspektorat	517.404.932	
			Persentase pengadaan BMD dalam kondisi baik				
					Inspektorat	1.188.090	
			Rata-rata capaian kinerja kegiatan				
					Inspektorat	8.450.499.726	

					Inspektorat	502.136.380	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
					Inspektorat	955.425.280	
			Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu				
					Inspektorat	2.955.393.280	
			Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu				
					Inspektorat	2.955.393.280	
			Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu				
					Inspektorat	2.955.393.280	
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Inspektorat	2.955.393.280	
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu			
					Inspektorat	2.955.393.280	
				Persentase Self Assessment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3			
					Inspektorat	2.955.393.280	
				Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3			
					Inspektorat	2.955.393.280	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				Pendampingan dan Asistensi			
					Inspektorat	1.085.880.470	
				Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu			
					Inspektorat	28.290.873	
				Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat			
					Inspektorat	28.290.873	
				Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu			
					Inspektorat	28.290.873	
				Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu			
					Inspektorat	28.290.873	
				Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu			
					Inspektorat	28.290.873	
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu			
					Inspektorat	28.290.873	
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu			
					Inspektorat	28.290.873	
				Persentase Self Assessment per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3			
					Inspektorat	28.290.873	
				Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Inspektorat	28.290.873		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik				
					Kecamatan Piani	2.811.060.395		
				Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu				
					Kecamatan Piani	2.811.060.395		
				Persentase Penyerapan Anggaran				
					Kecamatan Piani	2.811.060.395		
				Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD				
					Kecamatan Piani	2.811.060.395		
				Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
					Kecamatan Piani	2.811.060.395		
				Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik				
					Kecamatan Tapin Selatan	3.546.567.590		
				Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu				
					Kecamatan Tapin Selatan	3.546.567.590		
				Persentase Penyerapan Anggaran				
					Kecamatan Tapin Selatan	3.546.567.590		
				Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD				
					Kecamatan Tapin Selatan	3.546.567.590		
				Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
					Kecamatan Tapin Selatan	3.546.567.590		
				Persentase Aset dengan kondisi yang baik				
					Kecamatan Binuang	3.965.015.746		
				Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu				
					Kecamatan Binuang	3.965.015.746		
				Persentase Penyerapan Anggaran				
					Kecamatan Binuang	3.965.015.746		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD			
					Kecamatan Binuang	3.965.015.746	
				Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Kecamatan Binuang	3.965.015.746	
				Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik			
					Kecamatan Bungur	2.806.980.406	
				Persentase Aset Yang Baik			
					Kecamatan Bungur	8.611.560	
				Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu			
					Kecamatan Bungur	2.815.591.966	
				Persentase Penyerapan Anggaran			
					Kecamatan Bungur	2.815.591.966	
				Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD			
					Kecamatan Bungur	2.815.591.966	
				Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Kecamatan Bungur	2.815.591.966	
				Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik			
					Kecamatan Tapin Utara	5.462.538.925	
				Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu			
					Kecamatan Tapin Utara	5.462.538.925	
				Persentase Penyerapan Anggaran			
					Kecamatan Tapin Utara	5.462.538.925	
				Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD			
					Kecamatan Tapin Utara	5.462.538.925	
				Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Kecamatan Tapin Utara	5.462.538.925	
				Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik			
					Kecamatan Bakarangan	2.897.484.285	
				Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Bakarangan	2.897.484.285	
				Persentase Penyerapan Anggaran			
					Kecamatan Bakarangan	2.897.484.285	
				Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD			
					Kecamatan Bakarangan	2.897.484.285	
				Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Kecamatan Bakarangan	2.897.484.285	
				12			
					Kecamatan Candi Laras Selatan	49.722.696	
				persentase aset dengan kondisi baik			
					Kecamatan Candi Laras Selatan	531.738.446	
				Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik			
					Kecamatan Candi Laras Selatan	1.970.598.337	
				Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu			
					Kecamatan Candi Laras Selatan	2.502.336.783	
				persentase penyerapan anggaran			
					Kecamatan Candi Laras Selatan	531.738.446	
				Persentase Penyerapan Anggaran			
					Kecamatan Candi Laras Selatan	1.970.598.337	
				persentase sarana dan prasarana yang di butuhkan SKPD			
					Kecamatan Candi Laras Selatan	346.253.940	
				Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD			
					Kecamatan Candi Laras Selatan	1.970.598.337	
				persentase sarana dan prasaran yang di butuhkan SKPD			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Candi Laras Selatan	185.484.506	
				persentase unit kerja yang mendapatkan pelayan administrasi perkantoran			
					Kecamatan Candi Laras Selatan	346.253.940	
				persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran			
					Kecamatan Candi Laras Selatan	135.761.810	
				Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Kecamatan Candi Laras Selatan	1.970.598.337	
				persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran			
					Kecamatan Candi Laras Selatan	49.722.696	

					Kecamatan Candi Laras Selatan	144.440.616	
					Kecamatan Candi Laras Utara	2.692.173.990	
				Persentase Aset Dengan Kondisi Baik			
					Kecamatan Hatungun	2.707.042.021	
				Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu			
					Kecamatan Hatungun	2.707.042.021	
				Persentase Penyerapan Anggaran			
					Kecamatan Hatungun	2.707.042.021	
				Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD			
					Kecamatan Hatungun	2.707.042.021	
				Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Kecamatan Hatungun	2.707.042.021	

					Kecamatan Salam Babaris	2.658.453.823	
				Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Tapin Tengah	2.664.859.507	
				Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu			
					Kecamatan Tapin Tengah	2.664.859.507	
				Persentase Penyerapan Anggaran			
					Kecamatan Tapin Tengah	2.664.859.507	
				Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD			
					Kecamatan Tapin Tengah	2.664.859.507	
				Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Kecamatan Tapin Tengah	2.664.859.507	
				Persentase Aset Dengan Kondisi Baik			
					Kecamatan Lokpaikat	7.498.684	
				Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik			
					Kecamatan Lokpaikat	3.568.716.910	
				Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu			
					Kecamatan Lokpaikat	3.298.328.403	
				Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu0			
					Kecamatan Lokpaikat	277.887.191	
				Persentase Penyerapan Anggaran			
					Kecamatan Lokpaikat	3.434.615.594	
				Persentase Penyerapan Anggaran 100 Persen 3 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelay			
					Kecamatan Lokpaikat	141.600.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan SKPD			
					Kecamatan Lokpaikat	7.498.684	
				Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD			
					Kecamatan Lokpaikat	3.568.716.910	
				Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Kecamatan Lokpaikat	7.498.684	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Kecamatan Lokpaikat	3.427.116.910	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Piani	43.433.280	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Piani	43.433.280	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Piani	43.433.280	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Piani	43.433.280	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Tapin Selatan	36.233.280	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Tapin Selatan	36.233.280	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Selatan	36.233.280	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Selatan	36.233.280	
				Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan			
					Kecamatan Binuang	36.226.000	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimla B			
					Kecamatan Binuang	36.226.000	
				Persentase Pengaduan Masyakat yang diselesaikan			
					Kecamatan Binuang	36.226.000	
				Persentase Rekomendasi yang diselesaikan			
					Kecamatan Binuang	36.226.000	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Bungur	41.148.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Bungur	41.148.000	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bungur	41.148.000	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bungur	41.148.000	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Tapin Utara	39.735.600	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Tapin Utara	39.735.600	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Utara	39.735.600	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Utara	39.735.600	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Bakarangan	36.298.320	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Bakarangan	36.298.320	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bakarangan	36.298.320	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bakarangan	36.298.320	

					Kecamatan Candi Laras Selatan	36.233.280	
					Kecamatan Candi Laras Utara	79.200.000	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Hatungun	36.233.280	
				Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Hatungun	36.233.280	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Hatungun	36.233.280	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Hatungun	36.233.280	

					Kecamatan Salam Babaris	72.000.000	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Tapin Tengah	41.327.880	
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
					Kecamatan Tapin Tengah	82.655.760	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Tapin Tengah	41.327.880	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Tengah	41.327.880	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Tengah	41.327.880	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Lokpaikat	43.200.000	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Lokpaikat	43.200.000	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Lokpaikat	43.200.000	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Lokpaikat	43.200.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Piani	267.623.408	
				Persentase desa dengan administrasi yang baik			
					Kecamatan Piani	260.039.208	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Piani	260.039.208	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Piani	7.584.200	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Piani	267.623.408	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Piani	267.623.408	
				Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik			
					Kecamatan Piani	260.039.208	
				Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan			
					Kecamatan Piani	260.039.208	
				Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan			
					Kecamatan Tapin Selatan	669.999.700	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Tapin Selatan	358.767.176	
				Persentase desa dengan administrasi yang baik			
					Kecamatan Tapin Selatan	220.776.852	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Tapin Selatan	1.028.766.876	
				Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan			
					Kecamatan Tapin Selatan	220.776.852	
				Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Selatan	669.999.700	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Selatan	358.767.176	
				Persentase Rekomendasi yang diselesaikan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Tapin Selatan	669.999.700	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Selatan	358.767.176	
				Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik			
					Kecamatan Tapin Selatan	220.776.852	
				Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan			
					Kecamatan Tapin Selatan	220.776.852	
				Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan			
					Kecamatan Binuang	2.366.723.263	
				Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan			
					Kecamatan Binuang	113.716.186	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Binuang	2.480.439.449	
				Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan			
					Kecamatan Binuang	113.716.186	
				Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan			
					Kecamatan Binuang	2.366.723.263	
				Persentase Rekomendasi yang diselesaikan			
					Kecamatan Binuang	2.480.439.449	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik			
					Kecamatan Binuang	113.716.186	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Bungur	123.904.300	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Bungur	123.904.300	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bungur	123.904.300	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bungur	123.904.300	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik			
					Kecamatan Bungur	117.508.100	
				Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan			
					Kecamatan Tapin Utara	319.437.300	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Tapin Utara	2.409.277.316	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Tapin Utara	911.152.116	
				Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Tapin Utara	1.817.562.500	
				Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Utara	319.437.300	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Utara	2.409.277.316	
				Persentase Rekomendasi yang diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Utara	319.437.300	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Utara	2.409.277.316	
				Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik			
					Kecamatan Tapin Utara	103.136.316	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Bakarangan	171.779.536	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Bakarangan	171.779.536	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bakarangan	171.779.536	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bakarangan	171.779.536	
				Persentase desa dengan administrasi yang baik			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Candi Laras Selatan	128.716.224	
				Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan			
					Kecamatan Candi Laras Selatan	128.716.224	

					Kecamatan Candi Laras Selatan	15.848.438	
				Persentase desa dengan administrasi yang baik			
					Kecamatan Candi Laras Utara	165.347.790	
				Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan			
					Kecamatan Candi Laras Utara	165.347.790	

					Kecamatan Candi Laras Utara	13.283.250	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Hatungun	130.080.423	
				Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Hatungun	130.080.423	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Hatungun	130.080.423	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Hatungun	7.000.666	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan 100			
					Kecamatan Hatungun	123.079.757	
				Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan			
					Kecamatan Hatungun	123.079.757	
				Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan			
					Kecamatan Hatungun	123.079.757	
				Persentase desa dengan administrasi yang baik			
					Kecamatan Salam Babaris	111.673.708	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan			
					Kecamatan Salam Babaris	111.673.708	

					Kecamatan Salam Babaris	5.184.740	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Tapin Tengah	312.654.570	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Tapin Tengah	312.654.570	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Tengah	312.654.570	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Tengah	312.654.570	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Lokpaikat	6.851.100	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Lokpaikat	901.690.612	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Lokpaikat	238.541.712	
				Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Lokpaikat	670.000.000	
				Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan			
					Kecamatan Lokpaikat	670.000.000	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Lokpaikat	238.541.712	
				Persentase Rekomendasi yang diselesaikan			
					Kecamatan Lokpaikat	670.000.000	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Lokpaikat	238.541.712	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik			
					Kecamatan Lokpaikat	231.690.612	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Piani	9.932.500	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Piani	9.932.500	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Piani	9.932.500	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Piani	9.932.500	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Tapin Selatan	2.999.776	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Tapin Selatan	2.999.776	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Selatan	2.999.776	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Selatan	2.999.776	
				Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan			
					Kecamatan Binuang	4.417.500	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Binuang	4.417.500	
				Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan			
					Kecamatan Binuang	4.417.500	
				Persentase Rekomendasi yang diselesaikan			
					Kecamatan Binuang	4.417.500	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Bungur	3.198.100	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Bungur	3.198.100	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bungur	3.198.100	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bungur	3.198.100	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Tapin Utara	2.959.500	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Tapin Utara	2.959.500	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Utara	2.959.500	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Utara	2.959.500	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Bakarangan	5.131.800	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Bakarangan	5.131.800	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bakarangan	5.131.800	

					Kecamatan Candi Laras Selatan	10.799.608	
					Kecamatan Candi Laras Utara	15.584.350	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Hatungun	7.000.666	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Hatungun	7.000.666	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Hatungun	7.000.666	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Hatungun	7.000.666	

					Kecamatan Salam Babaris	5.751.240	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
					Kecamatan Tapin Tengah	4.757.200	
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal		
					Kecamatan Tapin Tengah	4.757.200	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
					Kecamatan Tapin Tengah	4.757.200	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
					Kecamatan Tapin Tengah	4.757.200	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
					Kecamatan Piani	38.754.800	
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
					Kecamatan Piani	38.754.800	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		
					Kecamatan Piani	38.754.800	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
					Kecamatan Piani	38.754.800	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan		
					Kecamatan Tapin Selatan	40.620.900	
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B		
					Kecamatan Tapin Selatan	40.620.900	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan		
					Kecamatan Tapin Selatan	40.620.900	
					Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Benuang	23.065.490	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Benuang	23.065.490	
				Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan			
					Kecamatan Benuang	23.065.490	
				Persentase Rekomendasi yang diselesaikan			
					Kecamatan Benuang	23.065.490	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Bungur	25.256.950	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Bungur	25.256.950	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bungur	25.256.950	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bungur	25.256.950	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Tapin Utara	9.787.900	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Tapin Utara	9.787.900	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Utara	9.787.900	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Utara	9.787.900	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Bakarangan	25.122.600	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Bakarangan	25.122.600	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bakarangan	25.122.600	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Bakarangan	25.122.600	

					Kecamatan Candi Laras Selatan	28.742.724	
					Kecamatan Candi Laras Utara	43.049.400	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Hatungun	33.500.630	
				Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Hatungun	33.500.630	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Hatungun	33.500.630	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Hatungun	33.500.630	

					Kecamatan Salam Babaris	56.837.820	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Tapin Tengah	40.984.400	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal			
					Kecamatan Tapin Tengah	40.984.400	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Tengah	40.984.400	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Tengah	40.984.400	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Lokpaikat	26.797.530	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Lokpaikat	26.797.530	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Lokpaikat	26.797.530	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Lokpaikat	26.797.530	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Piani	62.848.480	
				Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik			
					Kecamatan Piani	62.848.480	
				Persentase desa dengan administrasi yang baik			
					Kecamatan Piani	62.848.480	
				Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik			
					Kecamatan Piani	62.848.480	
				Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Piani	62.848.480	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Piani	62.848.480	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Piani	62.848.480	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Tapin Selatan	15.023.664	
				Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik			
					Kecamatan Tapin Selatan	15.023.664	
				Persentase desa dengan administrasi yang baik			
					Kecamatan Tapin Selatan	15.023.664	
				Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik			
					Kecamatan Tapin Selatan	15.023.664	
				Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Tapin Selatan	15.023.664	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Tapin Selatan	15.023.664	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Selatan	15.023.664	
				Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan			
					Kecamatan Binuang	18.968.000	
				Persentase desa dengan administrasi yang baik			
					Kecamatan Binuang	18.968.000	
				Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik			
					Kecamatan Binuang	18.968.000	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Binuang	18.968.000	
				Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan			
					Kecamatan Binuang	18.968.000	
				Persentase Rekomendasi yang diselesaikan			
					Kecamatan Binuang	18.968.000	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Bungur	26.962.500	
				Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik			
					Kecamatan Bungur	26.962.500	
				Persentase desa dengan administrasi yang baik			
					Kecamatan Bungur	26.962.500	
				Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik			
					Kecamatan Bungur	26.962.500	
				Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Bungur	26.962.500	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bungur	26.962.500	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bungur	26.962.500	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Tapin Utara	26.850.900	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik			
					Kecamatan Tapin Utara	26.850.900	
				Persentase desa dengan administrasi yang baik			
					Kecamatan Tapin Utara	26.850.900	
				Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik			
					Kecamatan Tapin Utara	26.850.900	
				Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Tapin Utara	26.850.900	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Utara	26.850.900	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Utara	26.850.900	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Bakarangan	25.210.500	
				Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik			
					Kecamatan Bakarangan	25.210.500	
				Persentase desa dengan administrasi yang baik			
					Kecamatan Bakarangan	25.210.500	
				Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik			
					Kecamatan Bakarangan	25.210.500	
				Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Bakarangan	25.210.500	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bakarangan	25.210.500	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Bakarangan	25.210.500	
				Persentase desa dengan administrasi yang baik			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Candi Laras Selatan	234.492.984	
					Kecamatan Candi Laras Utara	51.102.582	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Hatungun	26.501.665	
				Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik			
					Kecamatan Hatungun	26.501.665	
				Persentase desa dengan administrasi yang baik			
					Kecamatan Hatungun	26.501.665	
				Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik			
					Kecamatan Hatungun	26.501.665	
				Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Hatungun	26.501.665	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Hatungun	26.501.665	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Hatungun	26.501.665	
				Persentase desa dengan administrasi yang baik			
					Kecamatan Salam Babaris	26.670.754	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Tapin Tengah	29.271.000	
				Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik			
					Kecamatan Tapin Tengah	29.271.000	
				Persentase Desa dengan Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Tengah	29.271.000	
				Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Tapin Tengah	29.271.000	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Tapin Tengah	29.271.000	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Tapin Tengah	29.271.000	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan			
					Kecamatan Lokpaikat	42.273.422	
				Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik			
					Kecamatan Lokpaikat	42.273.422	
				Persentase desa dengan administrasi yang baik			
					Kecamatan Lokpaikat	42.273.422	
				Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik			
					Kecamatan Lokpaikat	42.273.422	
				Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B			
					Kecamatan Lokpaikat	42.273.422	
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Lokpaikat	42.273.422	
				Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan			
					Kecamatan Lokpaikat	42.273.422	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.822.739.898	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
				Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	216.638.100	
				Persentase Kehadiran Masyarakat yang diundang dalam Mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	216.638.100	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.303.091.980	
				Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.303.091.980	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Persentase Ormas yang terdata			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	68.422.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Persentase masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	163.859.500	
				Persentase masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	163.859.500	
				Persentase Ormas yang terdata			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	163.859.500	
				Persentase terlaksananya rakor FKUB			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	163.859.500	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	254.914.900	
				Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang ditangani			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	254.914.900	
4	Pengembangan wilayah potensial dan pemerataan pembangunan						

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Penyerapan Anggaran			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.497.900		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Angka konsumsi daging per kapita				
					Dinas Pertanian	2.700.000.000		
				Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)				
					Dinas Pertanian	2.700.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan				
					Kecamatan Tapin Utara	303.281.000		
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B				
					Kecamatan Tapin Utara	303.281.000		
				Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan				
					Kecamatan Tapin Utara	303.281.000		
				Persentase Rekomendasi yang diselesaikan				
					Kecamatan Tapin Utara	303.281.000		



3.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 dapat di lihat pada **tabel 3.4** berikut :

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan								
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu.	100 %	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP	5 Laporan	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Tapin				
		Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu.	100 %		Jumlah Laporan Data Pendidikan	205 Sekolah								
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %		Jumlah laporan rencana Kerja dan Monitoring dan evaluasi Renja	7 Laporan								
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.	100 %											
								1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen	Kab. Tapin	
								1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Tapin	
								1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	Kab. Tapin	
								1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	Kab. Tapin	
								1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Tapin	
								1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	Kab. Tapin	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan semesteran dan tahunan Dinas	2 Laporan	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1714 Orang/bulan	Kab. Tapin				
				Persentase Pembayaran gaji dan kegiatan tepat waktu	100 %									
				Persentase Terbitnya verivikasi/pembuatan SPP dan pembuatan SPM GU/LS	100 %									
				Persentase tersusun dan terkumpulnya RKAP dan RKA di lingkungan Dinas Pendidikan	100 %									
							1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Tapin				
							1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Tapin				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		
							1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kab. Tapin	
							1.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
			1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan asset dan urusan rumah tangga dinas pendidikan 100 % Persentase pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan 100 % Persentase pengelolaan hubungan organisasi dan ketatalaksanaan administrasi kepegawaian 100 % Persentase pengelolaan urusan tugas pembantuan 100 %			1.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							1.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							1.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
			1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kualitas pengelolaan surat menyurat dan kearsipan 100 % Persentase pengelolaan asset dan urusan rumah tangga dinas pendidikan 100 % Persentase pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan 100 % Persentase pengelolaan hubungan organisasi dan ketatalaksanaan administrasi kepegawaian 100 % Persentase pengelolaan urusan tugas pembantuan 100 %			1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Tapin	
							1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Tapin	
							1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Tapin	
							1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							1.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
							1.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Tapin	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Tapin	
			1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kualitas pengelolaan surat menyurat dan kearsipan 100 % Persentase pengelolaan asset dan urusan rumah tangga dinas pendidikan 100 % Persentase pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan 100 % Persentase pengelolaan hubungan organisasi dan ketatalaksanaan administrasi kepegawaian 100 % Persentase pengelolaan urusan tugas pembantuan 100 %			1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	
			1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kualitas pengelolaan surat menyurat dan kearsipan 100 % Persentase pengelolaan asset dan urusan rumah tangga dinas pendidikan 100 % Persentase pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan 100 % Persentase pengelolaan hubungan organisasi dan ketatalaksanaan administrasi kepegawaian 100 % Persentase pengelolaan urusan tugas pembantuan 100 %			1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Tapin	
							1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tapin	
							1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tapin	
			1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kualitas pengelolaan surat menyurat dan kearsipan 100 % Persentase pengelolaan asset dan urusan rumah tangga dinas pendidikan 100 % Persentase pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan 100 % Persentase pengelolaan hubungan organisasi dan ketatalaksanaan administrasi kepegawaian 100 % Persentase pengelolaan urusan tugas pembantuan 100 %			1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Tapin	
							1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	
							1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs	0,09 %	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah data akses layanan pendidikan SD yang telah diverifikasi	178 Sekolah	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	Kab. Tapin		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100 %		Jumlah data hasil belajar siswa SD yang telah diverifikasi	178 Sekolah						
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100 %		Jumlah data hasil belajar siswa SD yang telah diverifikasi	3250 Siswa						
	Angka Putus Sekolah Dasar (SD)	96 %		Jumlah data Sarana Prasarana SD yang telah diverifikasi	178 Sekolah						
	Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD	100 %		Jumlah Laporan data Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD yang telah di Verifikasi	178 Sekolah						
	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	97 %		Jumlah Laporan data Peserta Didik Jenjang SD yang mendapatkan bantuan	6 Laporan						
				Jumlah Laporan data peserta didik Sekolah Dasar yang telah di verifikasi	18148 Siswa						
				Jumlah Laporan data peserta didik yang mengikuti Lomba Prestasi minat, bakat, dan kreativitas siswa Jenjang SD	3 Laporan						
				Jumlah SD yang di bina	178 Sekolah						
				Jumlah SD yang di bina akreditasinya	178 Sekolah						
		Jumlah SD yang melaksanakan kurikulum	178 Sekolah								
		Jumlah SD yang melaksanakan ujicoba US/ AN SD	178 Sekolah								
		Jumlah siswa yang mengikuti US/ AN SD	3250 Siswa								
						1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	Kab. Tapin		
						1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang			
						1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang			
						1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	40 Unit	Kab. Tapin		
						1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	Kab. Tapin		
						1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	Kab. Tapin		
						1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang			
						1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang			
						1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
						1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	7 Unit	Kab. Tapin		
						1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	Kab. Tapin		
						1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket			
						1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket			
						1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Unit	Kab. Tapin		
						1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik			
						1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket			
						1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	178 Satuan Pendidikan	Kab. Tapin		
						1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	178 Satuan Pendidikan	Kab. Tapin		
						1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	36 Peserta Didik	Kab. Tapin		
						1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Orang			
						1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang			
						1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	178 Satuan Pendidikan	Kab. Tapin		
						1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	175 Satuan Pendidikan			
						1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	350 Orang	Kab. Tapin		
						1.01.02.2.01.35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	178 Orang			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.01.02.2.01.38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen			
							1.01.02.2.01.39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen			
							1.01.02.2.01.40 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan 5 Orang			
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah data akses layanan pendidikan SMP yang telah diverifikasi 27 Sekolah Jumlah data hasil belajar siswa SMP yang telah diverifikasi 1517 Siswa Jumlah laporan peserta didik yang sudah diverifikasi 27 Sekolah Jumlah Lomba Prestasi jenjang SMP yang dilaksanakan 10 Lomba Jumlah siswa yang mengikuti ANBK SMP 1517 Siswa Jumlah SMP dan Peserta Didik yang mendapatkan bantuan 27 Sekolah Jumlah SMP yang di bina 27 Sekolah Jumlah SMP yang di bina akreditasinya 27 Sekolah Jumlah SMP yang di bina PPDB 27 Sekolah Jumlah SMP yang melaksanakan kurikulum 27 Sekolah Jumlah SMP yang melaksanakan ujicoba ANBK SMP 27 Sekolah			1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang			
							1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang			
							1.01.02.2.02.11 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit			
							1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 9 Unit	Kab. Tapin		
							1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang	Kab. Tapin		
							1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang	Kab. Tapin		
							1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang			
							1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang			
							1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		
							1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		
							1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 Paket		
							1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik		
							1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket		
							1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1440 Peserta Didik	Kab. Tapin	
							1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	26 Satuan Pendidikan	Kab. Tapin	
							1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	36 Peserta Didik	Kab. Tapin	
							1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3 Orang		
							1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang		
							1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	26 Satuan Pendidikan	Kab. Tapin	
							1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	22 Satuan Pendidikan		
							1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	52 Orang	Kab. Tapin	
							1.01.02.2.02.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		
							1.01.02.2.02.48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	12 Orang		
							1.01.02.2.02.51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.01.02.2.02.52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		
							1.01.02.2.02.53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	12 Orang		
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah data akses layanan pendidikan PAUD yang telah diverifikasi 100 % Jumlah data hasil belajar peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini yang telah diverifikasi 100 % Jumlah data sarana Prasarana PAUD yang telah diverifikasi 100 % Jumlah lomba prestasi PAUD yang dilaksanakan 5 Lomba Jumlah PAUD yang di bina 183 Lembaga Jumlah PAUD yang di bina akreditasinya 183 Lembaga Jumlah PAUD yang di bina PPDB 100 % Jumlah PAUD yang melaksanakan kurikulum 183 Lembaga Jumlah PAUD yang mendapatkan bantuan 100 % Jumlah siswa PAUD yang mendapatkan bantuan 100 %			1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit		
							1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	Kab. Tapin	
							1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	Kab. Tapin	
							1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	Kab. Tapin	
							1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	Kab. Tapin	
							1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				
							1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		
							1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	182 Satuan Pendidikan	Kab. Tapin	
							1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	186 Satuan Pendidikan		
							1.01.02.2.03.25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.01.02.2.03.26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		
							1.01.02.2.03.27 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	12 Orang		
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti UN/UPK Paket A, Paket B, dan Paket C Jumlah PNF yang di bina Jumlah PNF yang di bina akreditasinya Jumlah PNF yang melaksanakan kurikulum	100 % 14 Lembaga 14 Lembaga 14 Lembaga		1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit		
							1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		
							1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	Kab. Tapin	
							1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	Kab. Tapin	
							1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	100 Peserta Didik	Kab. Tapin	
							1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	14 Satuan Pendidikan		
							1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	7 Orang	Kab. Tapin	
							1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan		
							1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan		
							1.01.02.2.04.18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	28 Orang		
							1.01.02.2.04.22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	14 Satuan Pendidikan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik (Guru) yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV	93 %	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah laporan data Calon Kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah/Calon Penilik PAUD dan PNF yang telah diverifikasi	4 Laporan	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen	Kab. Tapin	
		Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan PAUD/PNF	93 %		Jumlah laporan data Calon Kepala Sekolah/Calon Pengawas Sekolah SD yang telah diverifikasi	4 Laporan					
		Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SD	93 %		Jumlah laporan data pemenuhan PTK SMP yang telah diverifikasi	4 Laporan					
		Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SMP	93 %		Jumlah laporan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF yang telah diverifikasi	4 Laporan					
		Rasio Guru Terhadap Siswa SD	93 %		Jumlah laporan data pendidik PAUD dan PNF bersertifikat yang telah diverifikasi	4 Laporan					
		Rasio Guru Terhadap Siswa SMP	93 %		Jumlah laporan data pendidik SD bersertifikat yang telah diverifikasi	4 Laporan					
		Rasio Guru Terhadap Siswa TK	85 %		Jumlah laporan data pendidik SMP bersertifikat yang telah diverifikasi	4 Laporan					
					Jumlah laporan data PTK SD yang telah diverifikasi	4 Laporan					
					Jumlah laporan data PTK SMP yang telah diverifikasi	4 Laporan					
					Jumlah Laporan rasio Pendidik PAUD dan PNF	4 Laporan					
			Jumlah Laporan rasio Pendidik SD	4 Laporan							
			Jumlah Laporan rasio Pendidik SMP	4 Laporan							
					1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	Kab. Tapin		
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN yang dilayani administrasi kepegawaiannya	100 %	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1 %	1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	Kab. Tapin	
		Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %								
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %								
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %								
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %								
							1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kab. Tapin	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Tapin	
							1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Kab. Tapin	
			1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin	
							1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	Kab. Tapin	
							1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	Kab. Tapin	
							1.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket	Kab. Tapin	
							1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kab. Tapin	
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Kab. Tapin	
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin	
							1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin	
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	Kab. Tapin	
							1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan Gizi Balita	80 %	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	1 1	1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	30 Unit		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak	80 %				1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	Kab. Tapin	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu	100 %				1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit		
		Persentase PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %				1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10 Unit		
		Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat	80 %				1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit		
		Persentase Penduduk menggunakan Sarana Air Bersih	80 %				1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	100 Paket		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 Bulan	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	Kab. Tapin	
							1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	Kab. Tapin	
							1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	Kab. Tapin	
							1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	Kab. Tapin	
							1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	Kab. Tapin	
							1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	Kab. Tapin	
							1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	Kab. Tapin	
							1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	Kab. Tapin	
							1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang		
							1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	Kab. Tapin	
								Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3238 Orang		
							1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4387 Orang	Kab. Tapin	
							1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Tapin	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30 Dokumen		
							1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16 Dokumen		
							1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9 Dokumen		
							1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15 Dokumen		
							1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang	Kab. Tapin	
							1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang		
							1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 29050 orang	Kab. Tapin	
							1.02.02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	30 Orang		
							1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen		
							1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah pelayanan P3K Operasional Pelayanan Puskesmas Waktu Penyediaan operasional Pelayanan Puskesmas Waktu Penyediaan Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen 12 Dokumen 122 Dokumen 100 orang/kali 12 Bulan 12 bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Tapin	
							1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30 Dokumen	Kab. Tapin	
							1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	Semua Kab/Kota	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	30 Dokumen		
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	3 Puskesmas	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	13 Unit	Semua Kab/Kota	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Desa yang memiliki bidan Persentase Kebutuhan Sunberdaya manusia kesehatan Persentase SDMk yang kompeten (memiliki STR) Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran Rasio Jumlah Bidan terhadap jumlah penduduk	100 % 100 % 100 % 100 % 75/100000 orang	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1 Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	1 1 23 Orang	1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	23 Orang 50 Orang		
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	900 Orang		
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	SEDIaan FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100 %	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	1 1	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 Dokumen	Kab. Tapin	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan Persentase UKBM (Posyandu) yang dibentuk dan aktif di desa / kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1 1	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	7 Dokumen		
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 tahun	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 tahun	1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	Kab. Tapin	
							1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
							1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kab. Tapin	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Tapin	
							1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Tapin	
							1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Tapin	
							1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				
							1.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kab. Tapin	
							1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kab. Tapin	
							1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Tapin	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kab. Tapin	
							1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Tapin	
							1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Tapin	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Tapin	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tercapainya Normalisasi/ Restorasi Sungai	322 km	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Target Normalisasi Sungai	322 km	1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dokumen		
							1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	2.208 KM	Kab. Tapin	
							1.03.02.2.01.11 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	74 Unit	Kab. Tapin	
							1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	322 KM	Kab. Tapin	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	3680 KM	Kab. Tapin	
							1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatkan akses air minum di Kabupaten Tapin	100 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	1 1 Meningkatkan akses air minum di Kabupaten Tapin	1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	12 Dokumen		
		Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih1	100 %				1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	300 Liter/Detik		
							1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1500 SR	Kab. Tapin	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terbangun sarana dan prasarana persampahan	10 unit	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya sarana dan prasarana persampahan	10 unit	1.03.04.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	12 Dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2000 Rumah Tangga		
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah di Kabupaten Tapin	200 KK	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah di Kabupaten Tapin	200 KK	1.03.05.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	12 Dokumen		
							1.03.05.2.01.03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	200 Rumah Tangga	Kab. Tapin	
							1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	200 Rumah Tangga	Kab. Tapin	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Pembangunan Gedung Kantor	15 Buah	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terbangunnya bangunan gedung	15 buah	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	12 Dokumen		
							1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kab. Tapin	
							1.03.08.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Terbangunnya gedung kantor	15 buah	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Tapin	1 Buah	1.03.09.2.01.02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	12 Kawasan		
							1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	12 Kawasan	Kab. Tapin	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advdis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
						1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	250000 M ²			
						1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	12 Dokumen			
						1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	7 KM	Kab. Tapin		
						1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	2 KM	Kab. Tapin		
						1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	40 KM	Kab. Tapin		
						1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15 KM	Kab. Tapin		
						1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0.5 KM			
						1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	250 M	Kab. Tapin		
						1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	100 M	Kab. Tapin		
						1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	30 Dokumen			
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	6 orang	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	12 bulan	1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	0 Orang		
				1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			1.03.11.2.03.03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	0 Orang		
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	80 %	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				
			1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				
							1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang				
			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PersentaseTerlaksananya penyusunan anggaran dan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu	15 laporan 100 %	1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Tapin	
							1.04.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							1.04.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Tapin	
							1.04.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							1.04.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Tapin	
							1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Tapin	
			1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun tepat waktu	100 %		1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 Orang/bulan	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Kab. Tapin	
						1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		Kab. Tapin	
			1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		Kab. Tapin	
						1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		Kab. Tapin	
						1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		Kab. Tapin	
						1.04.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		Kab. Tapin	
						1.04.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		Kab. Tapin	
						1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Kab. Tapin	
			1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		Kab. Tapin	
						1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Kab. Tapin	
						1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Kab. Tapin	
			1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Kab. Tapin	
						1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		Kab. Tapin	
						1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		Kab. Tapin	
						1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100 % 100 %	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang tersedia	100 %	1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							1.04.02.2.01.02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	Kab. Tapin	
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pemahaman peserta sosialisasi	90 %	1.04.02.2.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	200 Orang	Kab. Tapin	
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	50 Unit Rumah	Kab. Tapin	
							1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	40 Unit Rumah	Kab. Tapin	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penurunan kawasan kumuh	1,2 %	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh	100 %	1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Kab. Tapin	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase luasan kumuh yang tertangani	1,2 %	1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	255 Unit Rumah	Kab. Tapin	
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	4,24 % 4,24 %	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi peningkatan kualitas RTLH di luar kawasan kumuh sesuai target	100 %	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	218 Unit Rumah	Kab. Tapin	
							1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (KRB) 2.64 % Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik 65 % Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik 65 %	2.64 % 65 % 65 %	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1 Persentase Developer Perumahan yang Menyerahkan Fasilitas Umum/Fasilitas Khusus. 30 % Persentase perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik 2.64 %	1 1 30 % 2.64 %	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 10 Lokasi	10 Lokasi	Kab. Tapin	
							1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan	1 Laporan	Kab. Tapin	
							1.04.05.2.01.04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 1 Laporan	1 Laporan	Kab. Tapin	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan Tepat Waktu 100 % Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja 100 %	100 % 100 %	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sesuai Standar 100 %	100 %	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Tapin	
							1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11 Laporan	11 Laporan	Kab. Tapin	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel 100 %	100 %	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43 Orang/bulan	12 Orang/bulan 43 Orang/bulan	Kab. Tapin	
							1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan	1 Laporan 4 Laporan	Kab. Tapin	
							1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan	4 Laporan	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			
						1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			
						1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin		
						1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin		
						1.05.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin		
						1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Kab. Tapin		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			
						1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Kab. Tapin		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan			
			1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33 Unit			
						1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kab. Tapin		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit			
						1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Tapin		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		Kab. Tapin		
							1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Kab. Tapin		
							1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Kab. Tapin		
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Kab. Tapin	
							1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kab. Tapin	
							1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kab. Tapin		
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih	100 %	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1 1	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50 Kasus		Kab. Tapin		
		Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %										
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100 %										
		Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan	100 %										
							1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	24 Kasus				
							1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen		Kab. Tapin		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	146 Orang		
							1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen		
			1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	1 1		1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Laporan	Kab. Tapin	
							1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan		
							1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan		
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana 80 % Menurunkan Indeks Risiko Bencana 80 % Persentase daerah terdampak bencana yang pulih 80 % Persentase Desa Tangguh Bencana 80 %	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100 %		1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	160 Orang	Kab. Tapin	
			1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Desa/kelurahan Tangguh Bencana 100 % Persentase Masyarakat dan Aparatur yang Terlatih untuk Kesiapsiagaan terhadap Bencana 100 %			1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
						1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	2 Unit			
						1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan			
						1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Kab. Tapin		
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Tertangani Persentase Penanganan Darurat Bencana Persentase Sarana Prasarana dan SDM dalam Penanganan Bencana	100 % 100 % 100 %	1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	35 Orang	Kab. Tapin		
						1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	Kab. Tapin		
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pemulihan Pasca Bencana	100 persen	1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	12 Dokumen	Kab. Tapin		
						1.05.03.2.04.06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	Kab. Tapin		
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100 %	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1 1	1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen		
							1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		
							1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen		
							1.05.04.2.01.04 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	Kab. Tapin	
			1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			1.05.04.2.04.03 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	12 Dokumen			
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Kab. Tapin	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 laporan 1 laporan 20 orang	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	Kab. Tapin	
							1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
							1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 laporan 36 laporan 3 paket 1 paket 2 paket 1 paket 40 paket	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Tapin	
							1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kab. Tapin	
							1.06.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kab. Tapin	
							1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kab. Tapin	
							1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	Kab. Tapin	
			1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 unit Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit			1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Tapin	
							1.06.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Tapin	
			1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 laporan			1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Tapin	
							1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Tapin	
							1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Tapin	
			1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 53 unit			1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Kab. Tapin	
							1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Tapin	
							1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil	100 %	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 4 lembaga		1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Orang		Kab. Tapin	
					Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 35 orang						
					Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 11 sertifikat						
					Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 12 orang		1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang		Kab. Tapin	
							1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Lembaga		Kab. Tapin	
							1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Sertifikat		Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	905 Orang	Kab. Tapin	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					20 orang						
Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					20 orang						
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota					20 orang						
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					20 orang						
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					20 orang						
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					905 orang						
Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					60 orang						
Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota					20 orang						
Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota					20 orang						
Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang										
						1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	Kab. Tapin		
						1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kab. Tapin		
						1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kab. Tapin		
						1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kab. Tapin		
						1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kab. Tapin		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kab. Tapin	
							1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kab. Tapin	
							1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kab. Tapin	
							1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Kab. Tapin	
							1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kab. Tapin	
			1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang		1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang						
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang						
							1.06.04.2.02.09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kab. Tapin	
							1.06.04.2.02.10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kab. Tapin	
							1.06.04.2.02.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		
							1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	74,42 %	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 25 orang Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 orang		1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang			
							1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang	Kab. Tapin		
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 5000 orang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 700 keluarga Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 5 keluarga Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 70 orang		1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 5000 Orang	Kab. Tapin		
							1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 5 Keluarga	Kab. Tapin		
							1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 700 Keluarga	Kab. Tapin		
							1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang	Kab. Tapin		
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100 %	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 500 orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 300 orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 500 orang		1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang			
							1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang			
							1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang	Kab. Tapin		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kampung 50 orang	1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kampung		
							1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang		
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam kondisi baik	100 %	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 1	1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	Kab. Tapin	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 %	2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	2.07.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kab. Tapin	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan	Kab. Tapin	
							2.07.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
							2.07.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Tapin	
							2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Tapin	
							2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kab. Tapin	
			2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.07.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kab. Tapin	
			2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Tapin	
							2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Tapin	
			2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Tapin	
							2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Tapin	
							2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Tapin	
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Kab. Tapin	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75 %	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1	11	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	Kab. Tapin	
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60 %								
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	45 %								
		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50 %								
		Rasio lowongan kerja dengan pencari kerja	10 poin								
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 60 % Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 45 % Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 50 %	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1	1 1	2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang			
						2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang			
						2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	16 Orang	Kab. Tapin		
			2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1300 Orang			
			2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	16 Orang	Kab. Tapin		
						2.07.04.2.04.02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	40 Orang	Kab. Tapin		
						2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	12 Orang			
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 50 % Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 50 %	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1 1	2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	110 Perusahaan	Kab. Tapin		
						2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	Kab. Tapin		
			2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	Kab. Tapin		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara		
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	13 buah	2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Kab. Tapin	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan keuangan secara berkala	2 Buah	2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Tapin	
							2.08.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
							2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala dalam 1 (satu) tahun	9 Orang	2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin	
							2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin	
							2.08.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							2.08.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Tapin	
							2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengurus/Organisasi/Gerakan/Kelompok Perempuan /masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang KKG Jumlah pelaku usaha rumahan perempuan di Kabupaten Tapin Jumlah Perempuan yang terampil dalam usaha rumahan	185 Orang 225 Orang 109 Orang	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah hasil karya perempuan di Kecamatan yang disertakan dalam pameran	12 Kecamatan	2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga		
							2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	172 Orang		
							2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti Persentase keluarga pelaku usaha Persentase perkawinan usia anak Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO	0,029 Rasio 90 % 90 % 0,96 % 0,029 Rasio	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak	85 Angka	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang tercatat dan dilaporkan ke dalam SIMPONI	100 %	2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	0 Orang		
							2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Layanan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang terlatih dalam penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 50 orang N Persentasi kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat dan dilaporkan ke dalam SIMPONI 100 % Persentasi Data SIMEP KPAl yang terpenuhi 80 % Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang di Tangani 100 %		2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 50 Orang			
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti 8,74 % Persentase keluarga pelaku usaha 0,80 % Persentase perkawinan usia anak 90 % Prosentase perkawinan Usia anak di Kabupaten Tapin 8,74 % Prosetase keluarga yang dibina 0,80 %		2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapat layanan Puspaga 500 Keluarga Jumlah organisasi/gerakan/kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan Peringatan Hari Kartini 50 Kelompok Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan gerakan pencegahan perkawinan anak 1800 Orang N Jumlah organisasi/gerakan/kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan Peringatan Hari Ibu 50 Kelompok		2.08.04.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Perangkat Daerah			
							2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen			
							2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen			
				2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang dibina di desa model peningkatan kualitas keluarga 50 KK		2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang			
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data SIMFONI dan SIGA yang terinput 90 % Persentase SKPD yang menggunakan Buku Data Terpilah Gender dan Anak sebagai salah satu bahan dalam Penyusunan Anggaran dan PPRG SKPD 90 %		2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase form Data Terpilah Gender dan Anak yang dapat terpenuhi sesuai petunjuk teknis 81 From Jenis Data Prosentase Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Workshop Up Dating data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Tapin. 42 Orang		2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak Madya Peringkat	Madya Peringkat	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan Layak Anak Yang dikembangkan 1 Kecamatan Jumlah Peserta yang memahami Sosialisasi Posyandu Ramah Anak 140 Orang Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dikembangkan 1 Buah Jumlah Tenaga Kesehatan yang berkompeten untuk mendukung (KLA) 60 Orang	1 Kecamatan 140 Orang 1 Buah 60 Orang	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	73 Organisasi		
							2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Forum Anak Daerah yg berpartisipasi aktif dalam Temu Forum/Jambore Anak Provinsi dan Kabupaten Jumlah Gugus Tugas KLA yang Aktif dalam Pencapaian Indikator KLA Jumlah Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak Jumlah peserta penyuluhan Pola Asuh yang paham edukasi Pola Asuh Jumlah Peserta yang mengikuti Gebyar Ramadhan Anak Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Hari Anak Nasional Jumlah RBRA yang dikembangkan Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan Jumlah tenaga pendidik yang berkompeten untuk mendukung Sekolah Ramah Anak (SRA)	24 Orang 30 Instansi 12 Kecamatan 310 Orang 160 Orang 2400 Orang 1 Buah 26 Buah 65 Orang	2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti Rasio Kekerasan terhadap Anak	0,7 % 90 % 0,7 %	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pengaduan perlindungan anak	85 Angka	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat dan dilaporkan ke dalam SIMPONI. Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100 % 100 %	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang		
							2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Layanan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang terlatih dalam penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 72 Orang Persentasi Data SIMEP KPAI yang dapat terpenuhi 80 % SKPD/Unit kerja terkait.		2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen			
							2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen			
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13 Laporan	Kab. Tapin		
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tapin		
							2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Tapin		
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Tapin		
							2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tapin		
							2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Tapin		
							2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Tapin		
							2.09.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material		Kab. Tapin		
							2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300 Laporan	Kab. Tapin		
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tapin		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Tapin	
			2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Tapin	
							2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	
							2.09.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan 15.553.294 kg/kapita/tahun Utama Persentase ! % pangan yang aman dikonsumsi	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1	1	1	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				
							2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				
							2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				
							2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				
							2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan				
			2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				
			2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				
							2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		Kab. Tapin	
							2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		Kab. Tapin	
			2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan tepat waktu	100 %		2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan		Kab. Tapin	
							2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Kab. Tapin	
							2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		Kab. Tapin	
			2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian	100 %		2.11.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit			
							2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	65 Paket			
							2.11.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		Kab. Tapin	
							2.11.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang			
							2.11.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang			
							2.11.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	260 Orang			
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %		2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		Kab. Tapin	
							2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		Kab. Tapin	
							2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		Kab. Tapin	
							2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		Kab. Tapin	
							2.11.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Tapin	
							2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin	
							2.11.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Tapin	
			2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan		2.11.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Tapin	
							2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33 Unit		
							2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kab. Tapin	
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Siap Pakai	100 %		2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tapin	
				Persentase Pembayaran Listrik, Air dan Komunikasi Setiap Bulan	100 %						
				Persentase Pemeliharaan Gedung	100 %						
				Persentase Penatausahaan Barang dengan Baik dan Benar	100 %						
							2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tapin	
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Siap Pakai	100 %		2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Tapin	
				Persentase Pemeliharaan Gedung	100 %						
				Persentase Penatausahaan Barang dengan Baik dan Benar	100 %						
							2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	Kab. Tapin	
							2.11.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit		
							2.11.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	6 Unit		
							2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Kab. Tapin	
							2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.11.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		Kab. Tapin	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah 1 %	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1	1 1	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		Kab. Tapin	
		Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu 80 %									
		Persentase Rekomendasi Dokumen Lingkungan yang Ditindaklanjuti 100 %									
		Persentase Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan yang Dikendalikan 100 %									
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1 %									
		Status Mutu Air Cemar Sedang status status									
						2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah 1 %	1 %	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1 Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	1 1 3 kegiatan	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 148 Dokumen			
		Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati 1 %	1 %								
		Persentase Parameter Air Permukaan yang diuji Sesuai Baku Mutu 88 %	88 %								
		Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku 1 %	1 %								
		Persentase Parameter Kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu 86 %	86 %								
		Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu 80 %	80 %								
		Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025 1 %	1 %								
		Persentase Parameter Udara yang diuji sesuai baku mutu Status Mutu Air Cemar Sedang status status 98,6 %	98,6 %								
							2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen			
							2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan 1 Dokumen			
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan status kerusakan lahan/ tanah jumlah peserta yang dibina	1 laporan 50 orang	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan			
				2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemulihan pencemaran dan/ kerusakan lingkungan hidup	2 kegiatan	2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 1 Dokumen			
							2.11.03.2.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi 1 Dokumen			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati	1 %	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1	1 1	2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Ha		
		Persentase Luas ruang terbuka hijau (RTH) 3 kecamatan di Kabupaten Tapin	7,5 %								
		Persentase Pertambahan populasi bekantan di kawasan bernilai penting	14 %								
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase cakupan area pelayanan	1 %	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah perusahaan yang dibina	24 perusahaan	2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4 Laporan		
		Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	95 %		Jumlah perusahaan yang dilakukan verifikasi penbitan rincian teknis penyimpanan limbah B3	6 Perusahaan					
		Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	100 %		q	1 1					
		Persentase volume sampah yang tertangani	58 %								
				2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LB3 domestik yang dikumpulkan pada Depo LB3 Dinas LH	155 UMKM	2.11.05.2.02.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen		
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaranair	100 %	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1 1	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		
		Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran udara	100 %		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran air	1 laporan					
		Persentase MHA yang ditetapkan haknya	1 %		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran udara	1 laporan					
		Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air	0 0		jumlah pelaku usaha berizin dibina yang menindaklanjuti rekomendasi pengendalian pencemaran air	15 perusahaan					
		Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara	0 0		jumlah pelaku usaha berizin dibina yang menindaklanjuti rekomendasi pengendalian pencemaran udara	15 perusahaan					
		Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan	1 %		Jumlah pelaku usaha berizin dibina yang taat terhadap ketentuan pengendalian pencemaran udara	15 perusahaan					
		Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi	1 %		Jumlah pelaku usaha berizin yang dibina	30 perusahaan					

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya 25 % Persentase Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan peningkatan kapasitas 25 % Persentase MHA yang ditetapkan haknya 1 %	25 % 25 % 1 %	2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	1 Jumlah kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya	1 1 1 kelompok	2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen		
				2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas	1 kelompok	2.11.07.2.02.01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen		
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup 82,5 % Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati 1 % Persentase MHA yang ditetapkan haknya 1 % Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku 1 % Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu 1 % Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan Cemar Sedang status status Status Mutu Air Cemar Sedang status status	82,5 % 1 % 1 % 1 % 1 %	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Jumlah laporan penyelenggaraan dan penyuluhan tentang lingkungan hidup 1 laporan Jumlah sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup yang dilaksanakan 2 kali	1 1 1 laporan	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	1 Lembaga		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<p>persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang dilakukan fasilitasi dan pembinaan mendapatkan penghargaan 55 %</p> <p>Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku 1 %</p> <p>Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu 80 %</p> <p>Persentase sekolah yang menjadi sekolah adiwiyata 28 %</p> <p>Status Mutu Air Cemar Sedang status status</p>	<p>2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1</p> <p>Jumlah fasilitasi dan pembinaan terhadap masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam penilaian upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pemberian penghargaan tentang lingkungan hidup 1 laporan</p> <p>Jumlah pemberian penghargaan tentang lingkungan hidup yang dilaksanakan 2 kali</p>	<p>1 1</p> <p>8 kali</p> <p>1 laporan</p> <p>2 kali</p>	<p>2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 5 Entitas</p>				
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<p>Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 100 %</p> <p>Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air 0 0</p> <p>Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara 0 0</p> <p>Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi 1 %</p>	<p>2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah laporan penanganan kasus lingkungan hidup 4 pengaduan</p>	<p>4 pengaduan</p>	<p>2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani 1 Dokumen</p>				
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<p>Persentase areal publik bebas sampah 100 %</p> <p>Persentase cakupan area pelayanan 1 %</p> <p>Persentase cakupan area pelayanan 66,67 %</p> <p>Persentase jumlah desa/keurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah 50 %</p> <p>Persentase jumlah fasilitas pengelolaan sampah (bank sampah, TPS 3R, rumah kompos) yang beroperasi aktif 100 %</p> <p>Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan 95 %</p> <p>Persentase sampah yang dikurangi 27 %</p> <p>Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu (siang hari) 100 %</p> <p>Persentase volume sampah yang ditangani 72 %</p> <p>Persentase volume sampah yang tertangani 58 %</p>	<p>2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah</p>	<p>Jumlah bank sampah yang dibentuk 4 unik</p> <p>Jumlah peserta yang dibina 120 orang</p> <p>Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah 305 orang</p> <p>Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dibeli atau dibangun 15 unit</p>	<p>4 unik</p> <p>120 orang</p> <p>305 orang</p> <p>15 unit</p>	<p>2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 1 Laporan</p>				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
						2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0 Ton			
						2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok			
						2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen			
						2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit			
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kategori Minimal Hasil Evaluasi SAKIP A Score	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Kab. Tapin		
			2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Laporan 1 Laporan 228 Orang/bulan	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 Orang/bulan	Kab. Tapin		
						2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin		
						2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan 12 Laporan 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin		
						2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin		
						2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin		
						2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin		
						2.12.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Tapin		
						2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin		
			2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit 4 Unit	2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kab. Tapin		
						2.12.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Tapin		
			2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan 11 Laporan	2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Tapin		
						2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Kab. Tapin		
			2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit 4 Unit	2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Tapin		
						2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Tapin		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.12.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Tapin	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	IKM Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	89,19 poin	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %	2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan		
				2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	2 Dokumen	2.12.02.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	2 Dokumen		
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	IKM Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	89,17 poin	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas pelaporan Peristiwa Penting	7 Dokumen	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	7 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	6 Layanan					
					Jumlah Dokumen Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	7 Dokumen					
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	6 Layanan	2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan		
							2.12.03.2.01.04 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	7 Dokumen		
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah Instansi Yang Bekerjasama dalam Bidang Pelayanan Kependudukan	100 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen		
		Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD	100 %								
				2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan		2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan				
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu 100 Persen	2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Bulan		2.13.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan		Kab. Tapin		
			2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Bulan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Bulan Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan		2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan		Kab. Tapin		
						2.13.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan		Kab. Tapin		
						2.13.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan		Kab. Tapin		
			2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 12 Bulan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 12 Bulan Jumlah paket Bahan/material yang disediakan 12 Bulan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 12 Bulan Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 12 Bulan		2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket		Kab. Tapin		
						2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket		Kab. Tapin		
						2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket		Kab. Tapin		
						2.13.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket		Kab. Tapin		
						2.13.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan		Kab. Tapin		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin	
			2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 12 Bulan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 12 Bulan		2.13.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kab. Tapin		
						2.13.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kab. Tapin		
			2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang disediakan 12 Bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan		2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Tapin		
						2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin		
						2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin		
			2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehab 12 Bulan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 12 Bulan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 12 Bulan		2.13.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Kab. Tapin		
						2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Tapin		
						2.13.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kab. Tapin		
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar 70 % Persentase PKK aktif 97 % Persentase posyandu aktif 90 % Program Penataan Desa 126 Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 94 %	2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	1 1 Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya 126 Desa	1 % 1 1	2.13.02.2.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	12 Desa			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase BUMDes menghasilkan laba	2 %	2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	1 Fasilitasi Kerjasama Desa	1 126 Desa	2.13.03.2.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen		
		Persentase BUMDes yang aktif	85 %								
		Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten	84 %								
		Persentase PKK aktif	97 %								
		Persentase posyandu aktif	2 %								
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	100 Persen								
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	85 %								
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDES yang aktif	85 %	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	126 Desa	2.13.04.2.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	12 Dokumen		
		Persentase Bumdes yang menghasilkan laba	85 %		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	12 Bulan					
		Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten	84 %		Jumlah dokumen pengelolaan Aset Desa	126 Desa					
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar	70 %								
		Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	100 Persen								
		Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	100 Persen								
							2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	12 Dokumen		
							2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	12 Orang		
							2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	12 Dokumen		
							2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan		
							2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	12 Dokumen		
							2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	12 Orang		
							2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase PKK aktif Persentase PKK aktif Persentase posyandu aktif Persentase posyandu aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	85 % 85 Persen 97 % 74 % 74 Persen 90 % 97 % 97 Persen 90 % 90 Persen 100 % 100 Persen 85 %	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bumdes yang aktif	126 Desa	2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen		
							2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	126 Lembaga		
							2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 Dokumen		
							2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Laporan		
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan SKPD DPPKB yang telah ditindak lanjuti Persentase Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun n+1 yang di akomodir dalam dokumen Perencanaan	100 % 100 %	2.14.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	Kab. Tapin	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Semesteran yang di tindak lanjuti dan sesuai standar	100 %	2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
						2.14.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin		
						2.14.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin		
			2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100 %	2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin		
						2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Tapin		
						2.14.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin		
						2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin		
						2.14.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin		
						2.14.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Tapin		
						2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin		
			2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang di manfaatkan SKPD	100 %	2.14.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Tapin		
						2.14.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Tapin		
						2.14.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Tapin		
			2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	2.14.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Tapin		
						2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin		
						2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	2.14.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	Kab. Tapin	
							2.14.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kab. Tapin	
							2.14.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Tapin	
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	85 %	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase data basis KKBPK yang tersedia	100 %	2.14.02.2.01.03 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	Kab. Tapin	
		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	50 %		Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam program KKBPK	70 %					
							2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	6 Satuan Pendidikan	Kab. Tapin	
							2.14.02.2.01.12 Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	2 Organisasi	Kab. Tapin	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader KB yang mendapatkan pelatihan KKBPK	50 %	2.14.02.2.02.03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	Kab. Tapin	
					Persentase stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK	100 %					
							2.14.02.2.02.08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	6 Unit	Kab. Tapin	
							2.14.02.2.02.10 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	12 Laporan	Kab. Tapin	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 Tahun) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Akseptor KB yang dibina	85 %	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	24 Organisasi	Kab. Tapin	
							2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	Kab. Tapin	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan KKBPK	100 %	2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	24 Organisasi	Kab. Tapin	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Alat , Obat dan Kontrasepsi (Alokon)yang didistribusikan ke Sasaran tepat Waktu Persentase Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) yang tersedia	85 % 65 %	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Laporan	Kab. Tapin	
							2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	500 Orang	Kab. Tapin	
							2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	Kab. Tapin	
							2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	Kab. Tapin	
							2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 Laporan	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase MOW/MOP yang dilaksanakan	80 %	2.14.03.2.04.01 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	46 Organisasi	Kab. Tapin	
							2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	24 Kampung	Kab. Tapin	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok BKB yang terbina Persentase Kelompok BKL yang terbina Persentase Kelompok BKR yang terbina Persentase Kelompok PIK R yang terbina	72 % 70 % 70 % 73 %	2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	1 Kelompok	Kab. Tapin	
							2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	600 Orang	Kab. Tapin	
							2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	152 Orang		
							2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	16 Laporan	Kab. Tapin	
							2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	11 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.14.04.2.01.09 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	12 Dokumen			
			2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok UPPKA yang terbina	70 %	2.14.04.2.02.02 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan			
						2.14.04.2.02.03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi			
						2.14.04.2.02.04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	Kab. Tapin		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1 1	2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1 1	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Kab. Tapin	
							2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin	
							2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1 1	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin	
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1		2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tapin	
							2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		
							2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tapin	
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1		2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Kab. Tapin	
							2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Tapin	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase angkutan umum yang memiliki izin trayek	100 %				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit		
		Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar	100 %								
		Persentase penurunan rasio kecelakaan lalu-lintas darat terhadap jumlah kendaraan bermotor	85 %								
								2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	
			2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1	1		2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit		
			2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1	1		2.15.02.2.04.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik	6 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan			
			2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	1 1	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit			
						2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang			
						2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1 Unit			
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	1 1	2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan			
						2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	1 Unit			
						2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Dokumen			
						2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan			
						2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan			
			2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1	1 1	2.15.02.2.07.02 Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang			
						2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Laporan			
			2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1	1 1	2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5 Laporan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1 1	2.15.02.2.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan		
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar	100 %	2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1	1 1	2.15.03.2.12.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Dokumen		
				2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1	1 1	2.15.03.2.13.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit		
							2.15.03.2.13.06 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	3 Unit		
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disampaikan tepat Waktu	10 Dokumen	2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kab. Tapin
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan Tepat Waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	Kab. Tapin
								2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin
								2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Kab. Tapin
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN	36 Orang	2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin
								2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Tapin

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Tapin	
							2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kab. Tapin	
			2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Kab. Tapin	
			2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Tapin	
							2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Tapin	
			2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kab. Tapin	
							2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Tapin	
							2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Tapin	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI	100 %	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %	2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen		
							2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen		
							2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen		
							2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan		
							2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	2 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin	100 %	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	Kab. Tapin	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan EGovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kab. Tapin	
							2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen		
							2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Kab. Tapin	
							2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen		
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	87.59 % 70 %	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 unit usaha	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha		
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	87.59 % 70 %	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	60 %	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20 Orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	87.59 % 70 %	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	60 %	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha		
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Mikro Persentase UMKM Yang Memilikiizin Usaha	20.90 % 16.91 %	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Mikro Persentase Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki izin Usaha	19.5 % 15.95 %	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3 Kegiatan		
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3 Laporan 19 orang/bulan	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	Kab. Tapin	
							2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Kab. Tapin	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan 12 Paket 12 Paket 31 Paket	2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	Kab. Tapin	
							2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin	
							2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin	
							2.18.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin	
							2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 160 Unit Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit		2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 160 Unit	Kab. Tapin		
							2.18.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit	Kab. Tapin		
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan		2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan	Kab. Tapin		
							2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan	Kab. Tapin		
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 52 unit		2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit	Kab. Tapin		
							2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 52 Unit	Kab. Tapin		
							2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit	Kab. Tapin		
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi 541 Rp Milyar Persentase dokumen RUPM yang tersedia 541 Rp Milyar Persentase rekomendasi PM (investor baru) 100 % Pertumbuhan Penanaman Modal 541 Rp Milyar		2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah 1 Kegiatan Usaha Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen		2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen			
							2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah 1 Kegiatan Usaha			
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 1 Dokumen		2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 1 Dokumen	Kab. Tapin		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Persentase jenis investasi/promosi yang dipublikasikan Persentase stakeholder yang menggunakan informasi/promosi investasi yang dipublikasikan	541 Rp Milyar 541 Rp Milyar 100 %	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan Persentase investasi yang lolos izin lingkungan Persentase izin yang update Persentase Pelaku Usaha yang berizin Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu Persentase perizinan yang diterbitkan Persentase terlaksananya SOP Pelayanan	85,5 Poin 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 85,5 Poin 100 %	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50 Kegiatan Usaha 10 Orang 600 Pelaku Usaha	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	600 Pelaku Usaha	Kab. Tapin	
							2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	0 Kegiatan Usaha 50 Kegiatan Usaha	Kab. Tapin	
							2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 Orang	Kab. Tapin	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Persentase pelaku usaha yang memiliki izin Persentase Perumbuhan Investasi Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu Persentase Rasio angka kerja yang terserap terhadap nilai investasi	541 Rp Milyar 3 % 3 % 0,00000027 % 0,00000027 %	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Kegiatan Usaha 25 Pelaku Usaha	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Kegiatan Usaha.		
							2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Pelaku Usaha		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Usaha 10 Kegiatan			
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang update 100 % Persentase perizinan yang diterbitkan 100 % Persentase terlaksananya SOP Pelayanan 1 %	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 12 Dokumen			2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 12 Dokumen			
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA											
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 persen	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14 Laporan			2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14 Laporan	Kab. Tapin		
			2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 25 orang/bulan			2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan	Kab. Tapin		
							2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan	Kab. Tapin		
							2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan	Kab. Tapin		
			2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1 1		2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket	Kab. Tapin		
							2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket	Kab. Tapin		
							2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket	Kab. Tapin		
							2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan	Kab. Tapin		
							2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	Kab. Tapin		
			2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1 1		2.19.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit	Kab. Tapin		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							2.19.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Tapin	
			2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1 1		2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Tapin	
							2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin	
							2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin	
			2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1 1		2.19.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kab. Tapin	
							2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Tapin	
							2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Tapin	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi 100 % Persentase organisasi kepemudaan yang aktif 100 %	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1	1 1		2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	12 Orang		
							2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	12 Orang		
							2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	40 Orang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	12 Orang		
							2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	50 Orang	Kab. Tapin	
							2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	53 Orang	Kab. Tapin	
			2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1		2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	12 Dokumen	Kab. Tapin	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Cabang Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	27 cabor	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 Unit		
		Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	18 cabor								
		Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	1 %								
			2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1		2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen		
							2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	200 Orang		
			2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1	1		2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 Orang		
							2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	200 Orang		
			2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1	1		2.19.03.2.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	12 Dokumen	Kab. Tapin	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1	1 1	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	12 Dokumen		
							2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	12 Laporan	Kab. Tapin	
							2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	12 Unit	Kab. Tapin	
							2.19.03.2.05.04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	12 Dokumen		
							2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	12 Dokumen		
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 %	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1	1 1	2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	Kab. Tapin	
							2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang		
							2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	12 Laporan		
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Layanan Data Statistik Sektoral yang disajikan	100 %	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		150 Buah	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen		
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Layanan Pengamanan Informasi dan Persandian	100 %	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100 %	2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan		
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100 Persen	2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1 1	2.22.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
			2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1 1	2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 Orang/bulan	Kab. Tapin		
						2.22.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin		
						2.22.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin		
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1 1	2.22.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin		
						2.22.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Tapin		
						2.22.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin		
						2.22.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kab. Tapin		
						2.22.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin		
						2.22.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Kab. Tapin		
						2.22.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kab. Tapin		
			2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1 1	2.22.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Tapin		
						2.22.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Tapin		
			2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1 1	2.22.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin		
						2.22.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							2.22.03.2.01.02 Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	Kab. Tapin		
							2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	Kab. Tapin		
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik	100 %	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1	1 1	2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek			
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1	1 1	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	27 Objek			
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara	100 %	2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1	1 1	2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	Kab. Tapin		
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang wajib dibuat	100 %	2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	Kab. Tapin	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen keuangan yang wajib dibuat	100 %	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	Kab. Tapin	
								2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
								2.23.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SKPD	100 %	2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
								2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
								2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
								2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							2.23.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		Kab. Tapin	
							2.23.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		Kab. Tapin	
							2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		Kab. Tapin	
			2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %		2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		Kab. Tapin	
							2.23.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	73 Unit		Kab. Tapin	
			2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %		2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		Kab. Tapin	
							2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		Kab. Tapin	
							2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Kab. Tapin	
			2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %		2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		Kab. Tapin	
							2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 10 Unit		Kab. Tapin	
							2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kab. Tapin	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan Persentase Pemustaka (pengunjung perpustakaan)	76 Poin 12,83 %	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah koleksi bahan perpustakaan Persentase peningkatan Perpustakaan yang aktif sesuai SNP Persentase peningkatan tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka Persentase rata - rata pemanfaatan Perpustakaan	4.2 % 25 % 25 % 5.97 % 0.56 %	2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan		Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	204 Orang	Kab. Tapin	
							2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	13 Layanan	Kab. Tapin	
							2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	900 Eksemplar	Kab. Tapin	
							2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	900 Eksemplar		
							2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Tapin	
			2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka 5.97 % Persentase rata-rata pemanfaatan perpustakaan 0.56 %			2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2 Lokus	Kab. Tapin	
							2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	215 Orang	Kab. Tapin	
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK	3,85 %	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan arsip terampil 60 % Persentase SKPD dan Unit kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK 60 %		2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1150 Berkas	Kab. Tapin	
							2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	589 Berkas		
							2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan		
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SKPD dan Unit kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK 60 %		2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	Kab. Tapin	
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK	3,85 %	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase SKPD dan Unit kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK 60 %		2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	420 Arsip		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1 1	3.25.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin	
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1 1	3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kab. Tapin	
							3.25.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin	
							3.25.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1 1	3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin	
							3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin	
							3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin	
							3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin	
							3.25.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin	
							3.25.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Tapin	
							3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin	
				3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1 1	3.25.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Tapin	
							3.25.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kab. Tapin	
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1 1	3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin	
			3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	1	3.25.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	Kab. Tapin	
							3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Tapin	
							3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kab. Tapin	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya 100 % Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap 100 % Presentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas 100 %	3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	1	3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen		
							3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	12 Unit		
			3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	12 Orang		
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya 100 % Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap 100 %	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1	1	1	3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	12 Kelompok		
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1	1	1	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	Kab. Tapin	
							3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit		
							3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	12 Dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap 100 % Presentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas 100 %	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	1	1 1	3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen			
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Waktu pengolahan informasi data atas hasil perikanan (Bulan) 12 Bulan	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1	1 1	3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	12 Dokumen			
			3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1	1 1	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	12 Unit Usaha			
			3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	1 1	3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Ton			
						3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 Pelaku Usaha			
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang terpenuhi 30 %	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1	1 1	3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen			
			3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	1 1	3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Unit			
						3.26.02.2.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	1 1	3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	10 Unit		
				3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	1	1 1	3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	Kab. Tapin	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah	100 %	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	1 1	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	Kab. Tapin	
							3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Kab. Tapin	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pokdarwis yang mengikuti pelatihan/bimtek kepariwisataan	80 %	3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1	1 1	3.26.04.2.02.09 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik	100 %	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1	1 1	3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50 Orang		
							3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	50 Orang		
							3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1	1 1	3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang		
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP	85 Poin	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	16 Dokumen	3.27.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	Kab. Tapin	
		Persentase Aset yang tercatat	100 %								
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %								
		Persentase penyerapan Anggaran SKPD	100 %								
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %								
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %								
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	4 Dokumen	3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/bulan	Kab. Tapin	
							3.27.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		
							3.27.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Kab. Tapin	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah promosi komoditi pertanian dan produk olahan serta ekspos kegiatan (Kali)	1 Kali	3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
					Waktu pelaksanaan rapat-rapat konsultasi pelatihan Pembinaan/monitoring ke kecamatan dan menghadiri rapat koordinasi (Bulan)	12 Bulan					
					Waktu pemenuhan barang cetakan penggandaan dan penjilidan (Bulan)	12 Bulan					
					Waktu penyediaan ATK (Bulan)	12 Bulan					
					Waktu Penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12 Bulan					
							3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							3.27.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							3.27.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
			3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Kegiatan penunjang Operasional yang diperlukan (%)	100 %	3.27.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Kab. Tapin		
						3.27.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit			
						3.27.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Tapin		
			3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu pembayaran upah untuk petugas kebersihan kantor dan keamanan kantor	12 Bulan	3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tapin		
						3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tapin		
			3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	3.27.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	111 Unit	Kab. Tapin		
						3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kab. Tapin		
						3.27.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Kab. Tapin		
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka konsumsi daging per kapita 4 kg/kapita	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi (Ku/Ha)	1 1	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 Laporan			
		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%) 24,30 %				3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan			
			3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cakupan Wilayah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Populasi Kambing (ekor) Populasi Sapi (ekor)	4920 Ekor 7495 Ekor	3.27.02.2.05.01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	1700 Ekor			
						3.27.02.2.05.04 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	75000 Ton			
						3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan			
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Angka konsumsi daging per kapita 4 kg/kapita Jumlah luas lahan fungsional 63163 Ha Luas Panen Bawang Merah 160 Ha Luas Panen Cabe Rawit Hiyung 114 Ha Luas Panen Jagung 2003 Ha Luas Panen Jeruk 488 Ha Luas Panen Kedelai 124 Ha Luas Panen Padi 83746 Ha Persentase Kelas Kelompok Tani Madya 25 % Persentase lahan sawah fungsional yang terairi 15 % Persentase penyakit hewan yang tertangani 100 % Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis 75 % Populasi kambing 4920 ekor Populasi sapi 7495 ekor Populasi unggas 2364135 ekor Produktivitas Bawang Merah 8 Ku/Ha Produktivitas Cabe Rawit 9 Ku/Ha Produktivitas Jagung 51 Ku/Ha Produktivitas Jeruk 1 Ku/Ha Produktivitas Kedelai 10 Ku/Ha	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	1	1 1	3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan			
			3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	1	1 1	3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	5 Unit			
						3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	30 Unit	Kab. Tapin		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit		
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Angka konsumsi daging per kapita Persentase penyakit hewan yang tertangani Populasi kambing Populasi sapi Populasi unggas	4 kg/kapita 100 % 4920 ekor 7495 ekor 2364135 ekor	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	1	1 1	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan		
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	1	1 1	3.27.04.2.02.03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1 1	3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan		
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	1 1	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah kemitraan pemasaran hasil hortikultura Luas Panen Jagung Luas Panen Kedelai Luas Panen Padi Luas Tanaman Karet Luas Tanaman Sawit Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan Persentase Kelas Kelompok Tani Madya Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hortikultura Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis Produktivitas Jagung Produktivitas Kedelai Produktivitas Padi Produktivitas Tanaman Karet Produktivitas Tanaman Sawit	1 % 2003 Ha 124 Ha 83746 Ha 15890 Ha 3646 Ha 3 % 25 % 18 % 75 % 51 Ku/Ha 10 Ku/Ha 52 Ku/Ha 691 Ku/Ha 3646 Ku/Ha	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1 1 1		3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 47.5 Ha			
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Luas Tanaman Karet Luas Tanaman Sawit Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan Produktivitas Tanaman Karet Produktivitas Tanaman Sawit	15890 Ha 3646 Ha 3 % 691 Ku/Ha 3646 Ku/Ha	3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 1 1		3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi 1 Laporan			
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelas Kelompok Tani Madya Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis	25 % 75 %	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1 1 1		3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Unit			
							3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 Unit			
							3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 23 Unit			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1 Unit		
							3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	28 Unit		
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan	A Nilai	3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	10 Dokumen	3.30.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kab. Tapin	
		Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian ASN	100 %								
		Persentase Penyerapan Anggaran	100 %								
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	Kab. Tapin	
							3.30.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
							3.30.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Kab. Tapin	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.30.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Tapin	
							3.30.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Tapin	
							3.30.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		
							3.30.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Tapin	
							3.30.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							3.30.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Tapin	
							3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.30.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Tapin	
							3.30.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kab. Tapin	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tapin	
							3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tapin	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.30.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Kab. Tapin	
							3.30.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kab. Tapin	
							3.30.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit		
							3.30.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Tapin	
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	100 % 100 % 100 %	3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Terciptanya Tertib Usaha perdagangan	1 1	3.30.02.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen		
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah Persentase informasi harga Barang Pokok dan Penting yang akurat Persentase pasar tradisional yang dibangun Persentase pasar tradisional yang direvitalisasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	100 % 100 % 100 % 100 % 95 % 79 poin	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas Jumlah Petugas Kebersihan yang bertugas Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki	1 1 1800 org/hari 1418 org/bulan 4 buah	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.03.2.01.02 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit		
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen		
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah 100 % Persentase Informasi Harga Barang Pokok dan Penting yang Akurat 100 % Persentase pasar tradisional yang dibangun 100 % Persentase pasar tradisional yang direvitalisasi 100 % Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI 90 % Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar 79 poin	100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 79 poin	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1 100 %	1 1 100 %	3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan		
							3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan		
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan		
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipasarkan 100 % Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang 100 % Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan 100 %	100 % 100 % 100 %	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 80 % 3 kali 24 jenis 30 pelaku usaha	1 1 80 % 3 kali 24 jenis 30 pelaku usaha	3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30 Pelaku Usaha		
							3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha		
							3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3 Pelaku Usaha		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI	100 % 95 %	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1 Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera Jumlah Pelaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina	1 500 unit 400 orang	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	500 Unit 400 Orang		
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipasarkan	100 %	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Cakupan Pembinaan pelaku usaha Jumlah Peserta yang mengikuti Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Pertumbuhan jumlah resi gudang yang diterbitkan secara kumulatif	1 80 % 75 peserta 15 %	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM		
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 %	3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	3.31.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Kab. Tapin	
				3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.31.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	Kab. Tapin	
							3.31.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
							3.31.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.31.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							3.31.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							3.31.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							3.31.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							3.31.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							3.31.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		Kab. Tapin	
							3.31.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		Kab. Tapin	
			3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.31.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit		Kab. Tapin	
			3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.31.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		Kab. Tapin	
							3.31.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Kab. Tapin	
			3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.31.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		Kab. Tapin	
							3.31.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		Kab. Tapin	
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia	0,29 %	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	1 1	3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen			
		Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	3,38 %									
		Persentase bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia	0 0									
		Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	3,08 %									
							3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen			
							3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen			
							3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	3,38 % 3,08 %	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	1 1	3.31.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen		
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	3,38 % 3,08 %	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	1 1 2.01 %	3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		
							3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen		
							3.31.04.2.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen		
4.01 SEKRETARIAT DAERAH											

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu Persentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilayani Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100% Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	85 85 85 1 % 1 poin 100 % 100 % 1 % 1 % 1 % 1 poin	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang sesuai standar	100 %	4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan Persentase dokumen pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 % 100 %	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	Kab. Tapin	
							4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10000 Dokumen	Kab. Tapin	
							4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
							4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dilayani tepat waktu dan sesuai standar kepegawaian	100 %	4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket		
							4.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	86 Dokumen	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilayani tepat waktu dan sesuai standar	95 %	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin		
						4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	Kab. Tapin		
						4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin		
						4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin		
						4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin		
						4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Tapin		
						4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin		
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang terlaksana sesuai standart	100 %	4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kab. Tapin		
						4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit			
						4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Kab. Tapin		
						4.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Menyurat yang tertangani sesuai standar	100 %	4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Tapin		
						4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin		
						4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			
						4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin		
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %	4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	Kab. Tapin		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Tapin	
							4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Kab. Tapin	
							4.01.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	50 Ha		
			4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan Kedinasan KDH/WKDH yang dilayani dengan baik	100 %		4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		
							4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		
							4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		
			4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase layanan kedinasan Kdh/Wkdh yang diakomodir dengan baik dan lengkap	100 %		4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket		
							4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	Kab. Tapin	
							4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 Paket		
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah Inovasi SKPD yang dibina Persentase Dokumen Anjab, ABK, dan Evjab yang disampaikan tepat waktu Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil evaluasi RB yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti SKPD yg melaksanakan penataan kelembagaan sesuai standar	13 Buah 50 % 90 % 100 % 100 % 45 %		4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen		
							4.01.01.2.13.02 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan		
							4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan				
							4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				
							4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan				
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<p>Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu 1 %</p> <p>Persentase Capaian Penerapan SPM Kabupaten Tapin 98 %</p> <p>Persentase informasi pembangunan daerah terhadap publik melalui media massa dan media elektronik 100 %</p> <p>persentase kebijakan administrasi pemerintahan yang ditindak lanjuti 1 %</p> <p>Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel 77 %</p> <p>Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu 100 %</p> <p>Persentase kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel 98 %</p> <p>Persentase Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) SKPD 77 %</p> <p>Persentase Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang ditinjau lanjuti SKPD 100 %</p> <p>Persentase Usulan Raperda/Perbup/Keptub yang diharmonisasi 1 %</p> <p>Persentasi Batas Wilayah Kabuapten yang terselesaikan 100 %</p>	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	persentase surat menyurat antara Legislatif dan eksekutif 1 1	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 1 Dokumen					
							4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Dokumen			
							4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 3 Dokumen			
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<p>Persentasi usulan bantuan lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan sesuai standar 100 %</p> <p>Persentas Kegiatan Pembinaan mental Spiritual yang dilaksanakan tepat waktu 100 %</p>	4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 14 Dokumen				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen		
			4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelayanan Bantuan Hukum Perkara yang dapat diselesaikan 100 % Persentase Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan dan terintegrasi dengan JDIH Pusat 100 % Persentase Rekomendasi hasil verifikasi rancangan Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/Kepbup) yang ditindaklanjuti 100 %			4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	258 Dokumen		
							4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus		
							4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	258 Dokumen		
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD yang sehat dan profitable 100 % Persentase data dan informasi bidang perekonomian daerah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan perekonomian 100 % Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) di bidang perekonomian yang difasilitasi 1 % Persentase paket pekerjaan yang dapat diselesaikan proses lelangnya 1 % Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu 95 %	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase hasil pemeriksaan auditor eksternal yang selesai ditindaklanjuti oleh BUMD dan BLUD 100 %			4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen		
							4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan		
							4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen		
			4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase kegiatan CSR yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah 100 %			4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen		
							4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan		
							4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan informasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkualitas persentase PNS yang memiliki kompetensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah Persentase SKPD yang melakukan penginputan dan pada aplikasi SIRUP tepat waktu persentase SOP yang mendukung standarisasi LPSE persentase terselesaikannya sanggah dalam proses pemilihan penyedia	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	380 Dokumen			
						4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen			
						4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	600 Orang			
			4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi pelaksanaan strategi pengendalian inflasi yang selesai ditindaklanjuti SKPD	100 %	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen			
						4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4 Dokumen			
						4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen			
4.02 SEKRETARIAT DPRD											
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80% %	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100 %	4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu (%)	100 %	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kab. Tapin	
							4.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		
							4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin	
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %		4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Tapin	
							4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Tapin	
							4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Tapin	
							4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1460 Dokumen		
							4.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	Kab. Tapin	
							4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	Kab. Tapin	
							4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kab. Tapin	
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Kantor yang tepat waktu (%)	80 %		4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120 Unit	Kab. Tapin	
							4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	Kab. Tapin	
			4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	80 %		4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	Kab. Tapin	
							4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kab. Tapin	
							4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	228 Laporan	Kab. Tapin	
			4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Kondisi BMD dalam kondisi baik (%) Persentase pemeliharaan BMD dalam kondisi baik	100 % 100 %		4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Kab. Tapin	
							4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Tapin	
							4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Tapin	
			4.02.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase kegiatan Penataan Organisasi/Pergantian antarwaktu	100 %		4.02.01.2.13.02 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan		
			4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang selesai tepat waktu (%)	100 %		4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan		
							4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket		
							4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang		
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	1 %	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1	100 %	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen		
		Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1 %								
		Persentase Naskah Akademik yang terfasilitasi	80 %								
		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	1 %								
		Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	1 %								
							4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen		
							4.02.02.2.01.04 Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen		
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80 %	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		
							4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		
							4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		
							4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen		
							4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		
			4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Kegiatan Dewan yang Terasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80 %		4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen		
							4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang		
							4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen		
			4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan Reses Anggota DPRD yang terfasilitasi	100 %		4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	300 Laporan		
							4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	25 Dokumen		
							4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen		
			4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah yang selesai tepat waktu	80 %		4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen		
			4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Kegiatan Dewan yang Terasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80 %		4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2500 Dokumen		
							4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	600 Dokumen		
5.01 PERENCANAAN											
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	80 %	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Kab. Tapin	
							5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	90 %	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
							5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
			5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %		5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							5.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Tapin	
							5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
			5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %		5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Tapin	
			5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan pelayanan ASN Bappelitbang	4.3 Score		5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tapin	
				Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %		5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		
							5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tapin	
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %		5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Tapin	
				Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %		5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan	8.1 score	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100 %	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	Kab. Tapin	
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	8.1 score								
		Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	100 %								
		Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM	100 %								
		Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah	100 %								
		Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD	100 %								
		Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	100 %								
		Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM	100 %								
		Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD	100 %								
		Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD	100 %								
		Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100 %								
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	100 %								
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	100 %								
							5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kab. Tapin	
							5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		
							5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan	Kab. Tapin	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	Kab. Tapin	
			5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	70 %		5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 Orang		
			5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	70 %		5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	Kab. Tapin	
							5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	Kab. Tapin	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	90 % 100 %	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kab. Tapin	
							5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		
							5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Tapin	
							5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		
							5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Kab. Tapin	
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	90 % 90 % 100 % 100 %		5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	Kab. Tapin	
							5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	Kab. Tapin	
							5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Tapin	
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	90 % 90 % 100 % 100 %		5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Kab. Tapin	
							5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		
5.02 KEUANGAN											
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 Persen 100 %	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan yang tetap waktu sesuai ketentuan Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Waktu dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	100 % 100 % 100 % 100 % 12 Bulan	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen 4 Dokumen	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Tapin	
							5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan 8 Laporan	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kab. Tapin	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 Persen 100 % 100 % 100 %	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan 264 Orang/bulan	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1749 Dokumen	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Kab. Tapin	
			5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen		5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang		
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		
							5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		
							5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		
							5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		
							5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		
							5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		
							5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		
							5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin	
			5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan peralatan dan mesin kantor	100 Persen		5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit		
				Persentase Pengadaan peralatan dan mesin kantor	100 %		5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Kab. Tapin	
							5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Tapin	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12 Persen	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		
		Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100 Persen								
		Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	100 Persen								
		Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	100 Nilai								
							5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		
							5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen		
							5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen		
							5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen		
							5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen		
							5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen		
							5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen		
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketidakjadian kejadian komplain	100 Persen		5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	52 Dokumen		
							5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen		
							5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen		
							5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen		
							5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen		
							5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	17 Dokumen		
							5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	116 Orang		
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen		5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen		
							5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan		
							5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		
							5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		
							5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		
							5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		
							5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang		
			5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04 Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu 1 1 sesuai ketentuan			5.02.02.2.04.04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan		
							5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		
							5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		
							5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan										
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan	100 %	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen						
		Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan	100 %												
		Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan	100 %												
		Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin	100 %												
		Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 %												
											5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		
											5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		
											5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan		
											5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan		
											5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan		
						5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan							
						5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen							
						5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	90 Laporan							
						5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	24 Laporan							
						5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1,60 %	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah	80 Nilai	5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen		
		Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun	1.60 %		Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33 %					
		Persentase Penerimaan Piutang Daerah	80 %		Persentase Penerimaan Pajak Daerah	0.67 %					
		Persentase peningkatan objek pajak baru	100 %		Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0.5 %					
		Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah	5,00 %		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0.5 %					
		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60 %								
		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1.60 %								
							5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		
							5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan		
							5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	24 Laporan		
							5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBPP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3000 Obyek Pajak		
							5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8000 Dokumen		
							5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1200 Layanan		
							5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1900 Dokumen		
							5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen		
	5.03 KEPEGAWAIAN										
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Tapin	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kab/Kota Kab. Tapin	
							5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 0 Laporan Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Tapin	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin	
							5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Tapin	
							5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kab. Tapin	
							5.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Tapin	
							5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Tapin	
							5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
							5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Tapin	
							5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Tapin	
							5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Tapin	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin	
							5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Tapin	
							5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	
							5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Tapin	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	99 %	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1	1 1	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	90 %								
		Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	95 %								
							5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				
							5.03.02.2.01.05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				
							5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				
							5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				
							5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian				
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN				
							5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				
							5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN				
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				
							5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				
							5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				
							5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
							5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				
							5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN				
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	90 %	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1	1 1	5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100 %	5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 %	5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	Kab. Tapin	
		Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	100 %								
		Persentase hasil kelitbangan yang disitasi	100 %								
		Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah	100 %								
		Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD	100 %								
		Persentase rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	100 %								
		Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD:	100 %								
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 %	5.05.02.2.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen		
							5.05.02.2.03.12 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 %	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen		
							5.05.02.2.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan		
6.01 INSPEKTORAT DAERAH											
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 %	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 %	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Tapin	
		Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 Persentase				6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Tapin	
							6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kab. Tapin	
							6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Tapin	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	40 Orang	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	Kab. Tapin	
							6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Tapin	
							6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	
							6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		
				6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadaan BMD dalam kondisi baik	100 %	6.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
			6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kab. Tapin		
						6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang			
						6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang			
			6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Tapin		
						6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin		
						6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			
						6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin		
						6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tapin		
						6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Tapin		
						6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Tapin		
			6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit			
						6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Tapin		
			6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin		
						6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tapin		
			6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Tapin		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kab. Tapin	
							6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	Kab. Tapin	
							6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Tapin	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	1 %	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1	1 1	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	13 Laporan		
		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu	1 %								
		Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu	1 %								
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	1 %								
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	1 %								
		Persentase Self Assessment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3	1 %								
		Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	1 %								
							6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan		
							6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan		
							6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		
							6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan		
							6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen		
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan		
							6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu	100 persen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Tapin	
		Persentase Aset Dengan Kondisi Baik	80 Persen		Persentase laporan bidang trantib	100 Persen					
		Persentase Aset Dengan Kondisi Baik	88,9 %		persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen					
		Persentase Aset dengan kondisi yang baik	100 persen		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 persen					
		Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik	100 Persen		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen					
		Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik	96,04 Persen		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun dan Dllaporkan Tepat Waktu	100 Persen					
		Persentase Aset Yang Baik	100 Persen		Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	100 %					
		Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	100 %								
		Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	100 Persen								
		Persentase Penyerapan Anggaran	100 %								
		Persentase Penyerapan Anggaran	100 persen								
		Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen								
		Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	100 persen								
		Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	100 Persen								
		Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan SKPD	100 %								
		Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	100 Persen								
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen								
		Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %								
		Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen								
							7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Tapin	
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Tapin	
							7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Tapin	
							7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kab. Tapin	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik 100 Persen Persentase file data kepegawaian yang lengkap 100 Persen Persentase Keluhan/Pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawaian yang ditindaklanjuti 100 Persen Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100 Persen Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu 100 % Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu 100 persen Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu 100 Persen Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu 100 Persen Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu 100 % Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu 100 Persen Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat 100 Persen Persentase penyerapan anggaran 100 Persen Persentase Penyerapan Anggaran 100 % Persentase Penyerapan Anggaran 100 persen Persentase Penyerapan Anggaran 100 Persen Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD 100 Persen Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persen	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan	Kab. Tapin				
					7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan	Kab. Tapin				
					7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan	Kab. Tapin				

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase filedata kepegawaian yang lengkap 100 % Persentase file data kepegawaian yang lengkap 100 % Persentase file data kepegawaian yang lengkap 100 Persen Persentase File Data Kepegawaian Yang Lengkap 100 Persen persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawaian yang di tindaklanjuti 100 % Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawaian yang ditindaklanjuti 100 Persen Persentase Keluhan/Pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawaian yang ditindaklanjuti 100 % Persentase Keluhan/Pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawaian yang ditindaklanjuti 100 persen Persentase Keluhan/Pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawaian yang ditindaklanjuti 100 Persen Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100 % Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100 persen Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100 Persen Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu 100 Persen persentase pelayanan kepegawaian yang di buat 100 % Persentase pelayanan kepegawaian yang dibuat 100 Persen Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat 100 % Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat 100 persen Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat 100 Persen persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100 %	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket	Kab. Tapin				
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket	Kab. Tapin				
					7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket					
					7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket	Kab. Tapin				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100 % Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100 persen Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100 Persen Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik 100 Persen Presentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100 Persen		7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit		Kab. Tapin	
							7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit		Kab. Tapin	
							7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit		Kab. Tapin	
							7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit		Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	88 Point	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Tapin	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,8 Point		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %					
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86.8 Point		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 persen					
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 Persen		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen					
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 point		Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 %					
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point		Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 persen					
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	88 Point		Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 Persen					
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	100 Persen								
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen								
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	87 Point								
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %								
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen								
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen								
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimla B	100 Persen								
		Persentase Pengaduan Masyakat yang diselesaikan	100 Persentase								
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %								
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen								
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 Persentase								
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %								
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen								
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	88 Point	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	1 1	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Desa	Kab. Tapin	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	100 Persen		Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	100 %					
					Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat	100 persen					

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100 %								
		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	87 point								
		Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	100 Persentase								
		Persentase usulan masyarakat (RKPDDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100 %								
		Persentase usulan masyarakat (RKPDDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100 Persen								
		Persentase usulan masyarakat (RKPDDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100 %								
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	85 %								
		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100 %								
						7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	Kab. Tapin	
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti 100 % Persentase keluhan / pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti 100 persen Persentase keluhan / pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti 100 Persen Persentase Keluhan/Pengaduan Masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti 100 % Persentase keluhan/pengaduan masyarakat kelurahan yang dtindaklanjuti 100 % Persentase masyarakat kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan 100 % Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan 100 % Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan 100 persen Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan 100 Persen Persentase Masyarakat Kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan 100 % Persentase masyarakat kelurahan yang mendapat pemberdayaan 100 % Persentase pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan 100 % Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 100 % Persentase Pembangunan Sarana dan Prsarana Kelurahan 100 % Persentase Pembangunan Sarana dan Prsarana Kelurahan 100 persen		7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit			Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas 2 Pokmas / Ormas 3 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 8 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 12 Pokmas / Ormas	Kab. Tapin	
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang ekonomi yang ditindaklanjuti Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang ekonomi yang ditindaklanjuti Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang perekonomian yang ditindaklanjuti Persentase keluhan / pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan. Persentase rekomendasi IMB yang dikeluarkan sesuai ketentuan Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 % 100 Persen	7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	Kab. Tapin		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Kab. Tapin	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,8 Poin	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Trantib yang ditindaklanjuti	100 Persen	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Tapin	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,8 Point		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang ditindaklanjuti	100 %					
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 Persen		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang ditindaklanjuti	100 Persen					
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 point		Persentase laporan bidang trantib	100 %					
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point		Persentase laporan bidang trantib	100 Persen					
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	88 Point		Persentase laporan bidang Trantib	100 Persen					
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal	100 Persen								
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %								
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen								
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %								
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen								
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %								
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen								
							7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Kab. Tapin	
				7.01.04.7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang ditindaklanjuti	100 persen	7.01.04.7.03.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		
					Persentase laporan bidang trantib	100 persen					
							7.01.04.7.03.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	100 persen	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Trantib yang ditindaklanjuti	100 Persen	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	Kab. Tapin	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	100 Persen		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang ditindaklanjuti	100 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14 Orang		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,8 Poin		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang ditindaklanjuti	100 persen		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70 Orang		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,8 Point		Persentase laporan bidang trantib	100 Persen		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86.8 Point		Persentase laporan bidang trantib	100 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 Persen		Persentase laporan bidang trantib	100 persen		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 point		Persentase laporan bidang Trantib	100 Persen					
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point								
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal	100 Persen								
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	10 Persen								
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %								
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 persen								
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen								
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen								
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 persen								
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %								
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen								
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen								
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %								
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen								
					7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	Kab. Tapin			
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang					
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Orang					

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	100 persen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	1 1	7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	Kab. Tapin	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	100 %		Jumlah dokumen laporan APBDes	48 laporan		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	100 %		Jumlah dokumen laporan APBDes	48 Laporan		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20 Dokumen		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,8 Poin		Jumlah dokumen laporan APBDes	72 Laporan		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	24 Dokumen		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,8 Point		Jumlah rekomendasi pencairan ADD	32 Rekomendasi		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	26 Dokumen		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 Persen		Jumlah rekomendasi pencairan ADD	40 rekomendasi		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Dokumen		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 point		Jumlah rekomendasi pencairan ADD	48 Rekomendasi		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 Dokumen		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point		Jumlah rekomendasi pencairan ADD	68 Rekomendasi		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	88 Point		Persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik	100 %		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 %		Persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik	100 Persen		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	1 1		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
		Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 %		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
		Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 persen		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 persen		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
		Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
		Persentase desa dengan administrasi yang baik	87 point		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
		Persentase Desa dengan Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	87 Point		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 %		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen		Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 %		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
		Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik	100 persen		Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 persen		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 persen		Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 Persen		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 %					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
		Persentase Layanan Masyarakat	87 Point					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		Dengan Indeks Minimal B									
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen								
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 persen								
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %								
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen								
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen								
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 %								
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen								
							7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	Kab. Tapin	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 Dokumen		
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen		
							7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	Kab. Tapin	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen		
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen		
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 Dokumen		
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 Dokumen		
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	34 Dokumen		
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 Dokumen		
							7.01.06.2.01.04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		
							7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12 Dokumen			
						7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen 10 Dokumen 12 Dokumen 13 Dokumen 17 Dokumen			
						7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen 12 Dokumen		Kab. Tapin	
						7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
						7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan 4 Laporan 8 Laporan 12 Laporan		Kab. Tapin	
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Penyusunan Laporan	13 Laporan 100 %	8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Kab. Tapin	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	Kab. Tapin	
							8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		Kab. Tapin	
			8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminstrasi Perkantoran	100 %	8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Kab. Tapin	
						8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Kab. Tapin	
						8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		Kab. Tapin	
						8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		Kab. Tapin	
						8.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		Kab. Tapin	
						8.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		Kab. Tapin	
						8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Kab. Tapin	
			8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		Kab. Tapin	
			8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		Kab. Tapin	
						8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Kab. Tapin	
						8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Kab. Tapin	
			8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit		Kab. Tapin	
						8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		Kab. Tapin	
						8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kab. Tapin	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							8.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit	Kab. Tapin		
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 80 % Persentase Kehadiran Masyarakat yang diundang dalam Mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 100 %	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 80 %	8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 200 Orang		Kab. Tapin			
							8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang	Kab. Tapin		
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 100 % Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku 100 %	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun 80 %	8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 12 Dokumen					
							8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 150 Orang	Kab. Tapin		
							8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 50 Orang			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	69 Orang	Kab. Tapin	
							8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	Kab. Tapin	
							8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		



BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (4) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjelaskan bahwa dalam Penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan hasil pemetaan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

4.1. Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pada tahun 2020 pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan pemetaan sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut disusunlah Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan seperti pada **tabel 4.1** dibawah ini:

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	184.474.963.779	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	184.474.963.779	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	184.474.963.779	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	166.019.961.369	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.733.935	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.999.740	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.424.354	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.848.172	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.177.350	
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.177.350	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.490.719	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.616.250	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	160.103.483.390	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	160.094.757.222	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.716.800	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.009.368	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.829.050	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.829.050	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.761.753.410	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.904.012	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	257.341.803	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.115.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.263.943	
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.945.652	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.127.183.000	
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	143.000.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	676.449.464	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	676.449.464	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.298.441.468	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.243.048	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.634.292	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.051.564.128	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.270.652	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.943.696	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.974.232	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.352.724	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	18.061.822.518	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	10.858.756.539	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	799.999.768	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	189.994.204	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.596.533.513	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	999.976.053	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	199.988.315	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	199.984.676	
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	299.988.307	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	24.995.352	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	120.000.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.163.870	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	25.800.587	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	22.332.626	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	369.999.268	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.774.531.034	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	599.268.024	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	399.988.083	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	49.990.704	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	149.500.035	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	115.000.074	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	65.183.842	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	95.612.316	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	99.999.641	
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	199.988.315	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.975.590.945	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	599.995.724	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	577.310.918	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	199.999.768	
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	17.152.500	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	80.000.000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.015.000.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	359.101.215	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	97.101.820	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	29.929.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	452.944.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	178.400.000	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	199.982.200	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	16.767.000	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	31.778.400	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.284.400	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	19.732.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	393.179.892	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	393.179.892	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	389.773.960	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.405.932	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	169.588.376.392	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	97.021.937.473	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	97.021.937.473	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	74.621.984.931	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.604.828	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.381.356	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	141.223.472	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71.432.458.591	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	71.418.296.091	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.832.500	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.330.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.063.675.039	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.841.354	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.627.707	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.063.356	
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.940.622	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.758.202.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	212.370.760	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	212.370.760	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658.827.052	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	364.727.052	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.100.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.048.661	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.268.661	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.780.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19.395.743.058	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.993.472.922	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	2.501.583.356	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.583.356	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	599.804	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.583.356	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	488.123.050	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.327.575.296	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	188.041.662	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	33.118.050	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	27.098.558	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50.674.536	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	91.759.482	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	55.833.800	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.397.800	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.632.240	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.632.240	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	22.632.240	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	56.195.712	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	27.946.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	253.867.050	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	39.794.880	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	96.986.316	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	34.235.300	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.151.500	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.151.500	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	153.553.432	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.714.149.737	
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	1.968.440	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	59.782.444	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	18.973.068	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	359.999.309	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	14.670.000	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	14.670.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.024.840	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.024.840	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.457.125.150	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.401.200.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.401.200.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.925.150	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.925.150	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	112.920.087	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	112.920.087	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	112.920.087	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	434.164.247	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	278.511.212	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	278.511.212	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	155.653.035	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	155.653.035	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	63.234.755.256	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	63.234.755.256	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	61.250.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.250.000.000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	61.250.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.984.755.256	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.984.755.256	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.984.755.256	
1.02.0.00.0.00.03.0000	Puskesmas Tapin Utara	1.098.809.260	
1.02.0.00.0.00.03.0000	Puskesmas Tapin Utara	1.098.809.260	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.098.809.260	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.098.809.260	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	52.010.688	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	941.892.710	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	104.905.862	
1.02.0.00.0.00.04.0000	Puskesmas Bakarangan	739.795.372	
1.02.0.00.0.00.04.0000	Puskesmas Bakarangan	739.795.372	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	739.795.372	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	739.795.372	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80.965.782	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	565.953.713	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	92.875.877	
1.02.0.00.0.00.05.0000	Puskesmas Banua Padang	684.131.930	
1.02.0.00.0.00.05.0000	Puskesmas Banua Padang	684.131.930	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	684.131.930	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	684.131.930	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	85.792.932	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	461.359.862	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	136.979.136	
1.02.0.00.0.00.06.0000	Puskesmas Tambaruntung	569.619.451	
1.02.0.00.0.00.06.0000	Puskesmas Tambaruntung	569.619.451	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	569.619.451	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	569.619.451	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	109.808.532	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	355.010.919	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	104.800.000	
1.02.0.00.0.00.07.0000	Puskesmas Pandahan	416.437.654	
1.02.0.00.0.00.07.0000	Puskesmas Pandahan	416.437.654	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	416.437.654	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	416.437.654	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	56.837.838	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	288.100.139	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	71.499.677	
1.02.0.00.0.00.08.0000	Puskesmas Lokpaikat	655.544.932	
1.02.0.00.0.00.08.0000	Puskesmas Lokpaikat	655.544.932	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	655.544.932	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	655.544.932	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80.946.432	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	497.569.651	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	77.028.849	
1.02.0.00.0.00.09.0000	Puskesmas Tambarangan	830.196.493	
1.02.0.00.0.00.09.0000	Puskesmas Tambarangan	830.196.493	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	830.196.493	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	830.196.493	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80.946.432	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	585.900.165	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	163.349.896	
1.02.0.00.0.00.10.0000	Puskesmas Salam Babaris	488.627.134	
1.02.0.00.0.00.10.0000	Puskesmas Salam Babaris	488.627.134	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	488.627.134	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	488.627.134	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	35.167.224	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	346.316.471	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	107.143.439	
1.02.0.00.0.00.11.0000	Puskesmas Piani	440.925.526	
1.02.0.00.0.00.11.0000	Puskesmas Piani	440.925.526	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	440.925.526	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	440.925.526	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	65.245.638	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	249.999.888	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	125.680.000	
1.02.0.00.0.00.12.0000	Puskesmas Binuang	1.170.839.082	
1.02.0.00.0.00.12.0000	Puskesmas Binuang	1.170.839.082	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.170.839.082	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.170.839.082	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80.946.432	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	870.908.956	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	218.983.694	
1.02.0.00.0.00.13.0000	Puskesmas Hatungun	422.410.563	
1.02.0.00.0.00.13.0000	Puskesmas Hatungun	422.410.563	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	422.410.563	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	422.410.563	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48.410.688	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	239.999.982	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	133.999.893	
1.02.0.00.0.00.14.0000	Puskesmas Baringin	868.715.765	
1.02.0.00.0.00.14.0000	Puskesmas Baringin	868.715.765	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	868.715.765	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	868.715.765	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	52.010.688	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	594.505.127	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	222.199.950	
1.02.0.00.0.00.15.0000	Puskesmas Margasari	945.630.501	
1.02.0.00.0.00.15.0000	Puskesmas Margasari	945.630.501	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	945.630.501	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	945.630.501	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48.410.688	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	785.600.269	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	111.619.544	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	279.911.944.382	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	279.911.944.382	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	279.911.944.382	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.332.151.795	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	558.031.840	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	558.031.840	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.913.977.991	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.894.351.479	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.700.112	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.926.400	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.160.621.485	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.286.574.254	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	223.669.010	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.793.161	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.899.190	
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	234.831.770	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.290.600	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.311.563.500	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	156.589.100	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	156.589.100	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926.435.748	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.964.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	505.562.640	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	405.909.108	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.495.631	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	505.144.985	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.350.646	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	53.780.000.000	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.405.000.000	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	18.225.000.000	
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2.780.000.000	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	26.400.000.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.375.000.000	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.375.000.000	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4.000.000.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.411.327.509	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.411.327.509	
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	200.000.000	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	9.211.327.509	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3.000.000.000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000.000	
1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	304.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2.696.000.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.150.000.000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.150.000.000	
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	200.000.000	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.950.000.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	42.440.412.471	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	42.440.412.471	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	900.000.000	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	39.915.412.471	
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1.625.000.000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.900.000.000	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.900.000.000	
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	500.000.000	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	3.400.000.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	144.597.500.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	144.597.500.000	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4.850.000.000	
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	12.480.000.000	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	400.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	1.470.785.000	
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	5.500.000.000	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	65.050.000.000	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	15.700.000.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.796.715.000	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	31.450.000.000	
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	2.650.000.000	
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2.250.000.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	200.552.790	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	60.265.390	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	60.265.390	
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	140.287.400	
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	140.287.400	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.099.999.817	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.367.620.244	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	917.528.300	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	450.091.944	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	786.945.000	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	102.560.000	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	684.385.000	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	591.043.288	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	373.470.500	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	217.572.788	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	354.391.285	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	354.391.285	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30.649.898.037	
1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	30.649.898.037	
1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	30.649.898.037	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.853.834.937	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.336.560	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.678.970	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.144.420	
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.077.450	
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.105.830	
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.144.530	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.170.160	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.015.200	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.875.442.818	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.871.401.778	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.020.520	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.020.520	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.239.126.212	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.291.336	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	217.376.382	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.010	
1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.347.234	
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.549.250	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	918.563.000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.336.111	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.388.400	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.093.512	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	264.854.199	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.593.236	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.990.000	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.320.000	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.733.236	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.550.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	834.689.250	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	146.860.000	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	95.930.000	
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	50.930.000	
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	27.587.750	
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	27.587.750	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	660.241.500	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	460.370.750	
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	199.870.750	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.285.520.750	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	176.910.000	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	176.910.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.108.610.750	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.108.610.750	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	6.739.811.500	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	6.739.811.500	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.657.890.750	
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	81.920.750	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	16.936.041.600	
1.04.05.2.01	Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan	16.936.041.600	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	50.930.000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	16.783.251.600	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50.930.000	
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	50.930.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.538.135.535	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	11.476.009.352	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	11.476.009.352	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.793.142.495	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.744.316	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.744.316	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.236.597.200	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.224.431.000	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.624.700	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.541.500	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	883.531.679	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.291.638	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.114.560	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.880.596	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.126.765	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.755.120	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	561.363.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.679.052	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	54.389.100	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.289.952	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.640.400	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.040.400	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.600.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.949.848	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	320.469.848	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.800.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.680.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.140.335.928	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.007.946.428	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.903.289.500	
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	18.062.000	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.366.000	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	74.091.428	
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.137.500	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	132.389.500	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.536.000	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.176.000	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	67.677.500	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	542.530.929	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	446.953.729	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	399.347.100	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.996.829	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	9.228.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.446.000	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.935.000	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	95.577.200	
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	95.577.200	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.062.126.183	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.062.126.183	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.388.346.819	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.929.970	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.929.970	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.830.690.515	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.826.824.536	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.041.110	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.824.869	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	692.994.568	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.423.940	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.855.918	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.996.400	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.624.100	
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	6.072.960	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.948.250	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	532.073.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.269.670	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.132.444	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.137.226	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	623.730.530	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.357.530	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.513.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	544.860.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.731.566	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.381.566	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.350.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	673.779.364	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	173.989.000	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	141.690.000	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	32.299.000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	126.882.140	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	15.858.220	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	54.307.000	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	35.000.000	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	21.716.920	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	325.600.574	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	88.525.450	
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	237.075.124	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	47.307.650	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	20.750.000	
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	26.557.650	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.664.884.439	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	13.664.884.439	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	13.664.884.439	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.132.019.996	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.488.232	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.488.232	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.238.289.962	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.232.350.384	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.969.968	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.969.610	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.077.501.509	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.896.070	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.498.311	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.906.286	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.830.522	
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	4.459.320	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.990.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	802.921.000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	275.656.680	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.056.600	
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111.600.080	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.349.920	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	748.200	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.174.120	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.427.600	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.733.693	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.587.073	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.250.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.896.620	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.413.692.259	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.413.692.259	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	64.629.350	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	164.104.270	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.147.884.799	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	37.073.840	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.077.710.674	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5.046.253.474	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	4.873.839.750	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	33.778.720	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	17.177.230	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	27.277.600	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	56.120.174	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	6.000.000	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	8.060.000	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.000.000	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	6.000.000	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.000.000	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	6.000.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	31.457.200	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7.457.200	
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	6.000.000	
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.000.000	
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.000.000	
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	6.000.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.590.793.862	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	43.953.150	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	38.347.950	
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	5.605.200	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.546.840.712	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	124.388.300	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	303.515.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	678.902.752	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	440.034.660	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	403.123.330	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	218.244.410	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	127.404.060	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	90.840.350	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	184.878.920	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	21.589.320	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	163.289.600	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	47.544.318	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	47.544.318	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	47.544.318	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	9.509.192.195	
2.07.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	9.509.192.195	
2.07.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	9.509.192.195	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.013.268.433	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.381.700	
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.864.700	
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.517.000	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.294.941.793	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.281.884.293	
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.245.500	
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.812.000	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	954.591.588	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.360.975	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.366.713	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.454.700	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	593.409.200	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	333.231.538	
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	333.231.538	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.520.400	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.520.400	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.000.000	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.601.414	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.701.724	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.560.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	207.339.690	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	656.072.388	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	640.730.738	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	640.730.738	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.341.650	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.341.650	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.635.744.166	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.979.160.326	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	11.605.700	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	17.555.700	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	2.949.998.926	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	107.645.156	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	107.645.156	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	548.938.684	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	528.939.000	
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	19.999.684	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	204.107.208	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.122.508	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	5.706.968	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	29.415.540	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	168.984.700	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.513.500	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.471.200	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.160.933.337	
2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.160.933.337	
2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.160.933.337	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.618.566.649	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.981.777	
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.981.777	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.597.001.348	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.587.000.657	
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.282	
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.409	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.330.827.145	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.138.998	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.399.138	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.474.866	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.611.943	
2.08.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.503.450	
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.741.050	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.151.957.700	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	239.557.200	
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.590.200	
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.967.000	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.903.108	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.152.228	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.448.108	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.302.772	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.296.071	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.328.227	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.150.000	
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.817.844	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	206.181.103	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	24.981.062	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	24.981.062	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.992.410	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9.992.410	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	171.207.631	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	117.884.099	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	53.323.532	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	117.958.944	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	21.400.410	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	21.400.410	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	83.725.962	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.601.727	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.124.235	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.832.572	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12.832.572	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	522.392.318	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	407.002.574	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	110.448.646	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	144.577.340	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	151.976.588	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	115.389.744	
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.389.744	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	122.743.390	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.743.390	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	55.804.949	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	66.938.441	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	510.814.355	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	65.153.251	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	59.234.360	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5.918.891	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	445.661.104	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.699.220	
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	248.537.982	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	161.423.902	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	62.276.578	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	16.912.541	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16.912.541	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.218.559	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.594.324	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	8.624.235	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.145.478	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.274.656	
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.870.822	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.069.666.042	
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	6.069.666.042	
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	6.069.666.042	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.040.825.099	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.647.229	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.647.229	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.486.503.848	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.446.246.848	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.257.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.197.344.260	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.707.400	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	262.040.394	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.779.180	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.589.730	
2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	3.843.156	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	795.384.400	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.487.552	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.287.552	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.200.000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.842.210	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.541.756	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.200.000	
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.100.454	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.805.763.201	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	453.329.367	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	26.650.375	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	331.781.052	
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	31.602.120	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	46.026.700	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	17.269.120	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	781.495.841	
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	781.495.841	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	570.937.993	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	95.833.020	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	475.104.973	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	143.145.742	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	53.507.200	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	53.507.200	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	89.638.542	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	89.638.542	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	79.932.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	79.932.000	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	79.932.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.536.586.550	
1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.536.586.550	
1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.536.586.550	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	169.635.700	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	169.635.700	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	169.635.700	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.000.305.900	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.000.305.900	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.000.305.900	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	366.644.950	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	366.644.950	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	314.314.000	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	52.330.950	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	19.907.003.834	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	19.907.003.834	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	19.907.003.834	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.659.068.632	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.119.972	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.818.036	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.369.323	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.932.613	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.600.184.698	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.520.185.174	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	69.999.778	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.999.746	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	139.105.406	
2.11.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100.000.000	
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.302.440	
2.11.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.729.000	
2.11.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	5.258.716	
2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.815.250	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.275.652.302	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.717.084	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.677.688	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138.237.624	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.440.802	
2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.114.070	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.339.850	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.020.104.000	
2.11.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.021.184	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179.052.468	
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	35.083.620	
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.968.848	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.486.208	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.080.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.406.208	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.125.467.578	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.572.379	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.462.857.751	
2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	297.445.954	
2.11.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	47.880.000	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.714.020	
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.997.474	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	919.926.604	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	919.926.604	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	873.199.079	
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	46.727.525	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.529.562.164	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.149.773.524	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	205.063.910	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	211.260.131	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	733.449.483	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	235.888.225	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	235.888.225	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	143.900.415	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	87.947.550	
2.11.03.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	55.952.865	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.505.288.671	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.505.288.671	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.505.288.671	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	58.588.019	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	22.488.127	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	22.488.127	
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.099.892	
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	36.099.892	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	29.944.145	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.944.145	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.944.145	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	131.299.867	
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	88.692.167	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	88.692.167	
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	42.607.700	
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	42.607.700	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	52.750.418	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.750.418	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	52.750.418	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	589.818.215	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	589.818.215	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	589.818.215	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	41.068.582	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	41.068.582	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	41.068.582	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.389.688.517	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	5.389.688.517	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	11.172.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.016.584.533	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	41.892.386	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	172.247.238	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	147.792.360	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.453.921.976	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.453.921.976	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.453.921.976	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.322.804.471	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.357.232	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.357.232	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.298.947.680	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.295.951.880	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.497.900	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.497.900	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.721.252.064	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	373.400	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	311.032.208	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	166.805.550	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.013.026	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.638.880	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.209.389.000	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	638.231.858	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	495.870.368	
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	142.361.490	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.787.408	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.515.980	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260.271.428	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.228.229	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.953.849	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.500.000	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.774.380	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	297.700.496	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	288.695.732	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	288.695.732	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	9.004.764	
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	9.004.764	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	435.942.607	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	435.942.607	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	65.426.610	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	280.625.557	
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	89.890.440	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	397.474.402	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	121.499.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	121.499.200	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	81.819.540	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	81.819.540	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	194.155.662	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	194.155.662	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	44.364.906.933	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	44.364.906.933	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	44.364.906.933	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.266.477.195	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.540.812	
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.540.812	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.957.369.804	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.949.008.014	
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.892.958	
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.468.832	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.705.939.876	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.797.290	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.357.510	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.513.920	
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	21.992.456	
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.985.200	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.518.293.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	275.200.421	
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.971.921	
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.228.500	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.743.626	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.634.228	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.993.398	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.116.000	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.682.656	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.372.656	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.160.000	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.150.000	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	23.222.666	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	23.222.666	
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	23.222.666	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	36.885.260.491	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	36.885.260.491	
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	36.885.260.491	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.183.484.587	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.183.484.587	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	45.133.023	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	75.888.899	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	265.260.547	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	256.679.274	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	49.999.959	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	180.799.149	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	24.592.428	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	285.131.308	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.006.461.994	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.006.461.994	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	232.364.756	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	363.150.380	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	187.250.838	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	223.696.020	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.521.085.088	
2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.521.085.088	
2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.521.085.088	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.170.454.083	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.988	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.988	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.133.947.778	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.129.048.106	
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.449.836	
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.449.836	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.258.580.029	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.136.400	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.667.511	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.912.148	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.230.030	
2.14.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	4.014.090	
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.214.250	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.080.405.600	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	292.734.464	
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.296.164	
2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.053.300	
2.14.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.385.000	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.772.096	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.526.328	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.895.288	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.350.480	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.419.728	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.286.748	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.100.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.032.980	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	421.197.225	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	226.568.562	
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	207.224.247	
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	14.490.479	
2.14.02.2.01.12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	4.853.836	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	194.628.663	
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	7.663.789	
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	34.399.877	
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	76.687.665	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5.581.809	
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	70.295.523	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	744.478.936	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	161.610.694	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	158.702.176	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2.908.518	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	13.210.353	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	13.210.353	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	492.437.663	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33.556.962	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	200.911.653	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	71.613.904	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	80.039.996	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	106.315.148	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	77.220.226	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	36.676.697	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	40.543.529	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.184.954.844	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	869.952.404	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	140.651.730	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	343.157.364	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	248.361.380	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	104.136.260	
2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	33.645.670	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	315.002.440	
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	59.143.712	
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9.291.241	
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	246.567.487	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	10.838.076.307	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	10.838.076.307	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	10.838.076.307	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.310.925.009	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.512.740	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.512.740	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.163.968.795	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.097.461.495	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.499.300	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	63.008.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	719.017.537	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.049.164	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.707.828	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.448.141	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.422.904	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	578.389.500	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.050.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.200.000	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.850.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.000.000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.375.937	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.191.937	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.184.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.462.563.162	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	55.418.760	
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	22.322.760	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	33.096.000	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	89.974.440	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	89.974.440	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	339.692.600	
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	106.843.700	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	232.848.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.038.298.014	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.879.420.000	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	55.000.000	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	103.878.014	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	542.372.218	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10.886.920	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	279.155.408	
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	16.790.710	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	192.000.000	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	43.539.180	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	81.743.250	
2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	41.031.750	
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	40.711.500	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	115.150.000	
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	115.150.000	
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	199.913.880	
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	199.913.880	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.064.588.136	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	135.174.220	
2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	135.174.220	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	929.413.916	
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	45.300.916	
2.15.03.2.13.06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	884.113.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.060.697.045	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.060.697.045	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.060.697.045	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.854.165.323	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.578.680	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.578.680	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.483.153.816	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.427.579.166	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.301.560	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	32.273.090	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.225.643.557	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.934.577	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178.499.230	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.723.700	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.003.050	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	968.483.000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	491.857.064	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	491.857.064	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.275.711	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	281.043.071	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.232.640	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.656.495	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.992.626	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.663.869	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.599.980.550	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.599.980.550	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	80.755.450	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	51.708.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	29.570.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	1.405.148.880	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	32.798.220	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.606.551.172	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.416.397.448	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	619.640.000	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	796.757.448	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.190.153.724	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	738.173.084	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	226.800.000	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	158.721.770	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	66.458.870	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	164.751.155	
3.31.2.17.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian	164.751.155	
3.31.2.17.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian	164.751.155	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	17.070.900	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	17.070.900	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	17.070.900	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	20.387.694	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.387.694	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	20.387.694	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	51.866.250	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	51.866.250	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	51.866.250	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	75.426.311	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	75.426.311	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	75.426.311	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.169.607.007	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.169.607.007	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.169.607.007	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.850.204.665	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.493.558	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.493.558	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.952.739.127	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.921.439.485	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.299.642	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.210.204.453	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185.722.884	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.764.800	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.399.883	
2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	36.481.886	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	870.835.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.036.441.572	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	798.962.052	
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	237.479.520	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.569.024	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.597.024	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.972.000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.756.931	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.926.931	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.550.000	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	229.280.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	393.625.521	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	294.166.595	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	288.671.545	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5.495.050	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	99.458.926	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	99.458.926	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	92.425.140	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	92.425.140	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	92.425.140	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	742.944.046	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	742.944.046	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	271.199.910	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	362.229.525	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	109.514.611	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	51.048.475	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	51.048.475	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	856.750	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	49.334.975	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	856.750	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	39.359.160	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.359.160	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	39.359.160	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21.544.893.526	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	21.544.893.526	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	21.544.893.526	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.370.783.347	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.469.504	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.469.504	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.930.925.452	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.919.375.830	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.324.738	
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.224.884	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.107.525.631	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.419.548	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.306.990	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.895.393	
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.974.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	914.929.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.165.628	
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.260.582	
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.905.046	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	865.517.676	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.868.476	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.550.000	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	655.099.200	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.179.456	
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.780.456	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.480.000	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.919.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.480.429.624	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.224.966.403	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	25.939.514	
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	60.052.215	
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	28.324.044	
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	131.248.000	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	52.927.310	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	926.475.320	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.255.463.221	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.255.463.221	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12.651.925.607	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.075.869.470	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2.075.869.470	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.060.161.054	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	801.335.834	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	258.825.220	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	961.128.830	
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	80.523.844	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	880.604.986	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.567.865.394	
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1.567.865.394	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	6.986.900.859	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	911.642.580	
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	5.159.600.000	
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	463.925.050	
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	451.733.229	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.041.754.948	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.041.754.948	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.000.000.000	
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	41.754.948	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	95.627.800	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	95.627.800	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	95.627.800	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	95.627.800	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	95.627.800	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	95.627.800	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	100.518.197	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.518.197	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.518.197	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100.518.197	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.518.197	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100.518.197	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.873.390.916	
2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.873.390.916	
2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.873.390.916	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.051.845.372	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.335.650	
2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.335.650	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.232.460.358	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.223.864.558	
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.297.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.297.900	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.386.969.177	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.995.336	
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.317.707	
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.753.548	
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.049.406	
2.22.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	4.029.180	
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.665.000	
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.102.159.000	
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93.072.134	
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.274.534	
2.22.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.797.600	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.671.000	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.555.000	
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.116.000	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.337.053	
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.526.973	
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.600.000	
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.210.080	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	975.393.936	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.086.548	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	48.047.142	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	17.039.406	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	583.495.380	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	127.543.500	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	387.748.500	
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	68.203.380	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	326.812.008	
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	326.812.008	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	523.286.080	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	523.286.080	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	103.887.060	
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	303.883.100	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	115.515.920	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	192.791.636	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	22.556.436	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	22.556.436	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	170.235.200	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	170.235.200	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	130.073.892	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	130.073.892	
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	130.073.892	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.854.130.833	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.854.130.833	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.854.130.833	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.088.316.225	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.011.360	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.011.360	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.066.121.743	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.046.871.853	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	884.940	
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.364.950	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	909.237.087	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.265.226	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.937.201	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.307.437	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.968.833	
2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.886.390	
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.708.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	703.164.000	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	642.759.264	
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.641.410	
2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	506.117.854	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.683.581	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.244.600	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.759.804	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.679.177	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.503.190	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.628.190	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.875.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	765.814.608	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	612.891.612	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.566.252	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.236.120	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	266.881.400	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	156.155.000	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	47.626.440	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.426.400	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	152.922.996	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	49.086.996	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	103.836.000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	459.437.578	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	459.437.578	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	459.437.578	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	374.828.184	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	244.700.418	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	158.871.268	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	50.844.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	34.985.150	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	130.127.766	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	130.127.766	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	84.609.394	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	84.609.394	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	84.609.394	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.551.594.408	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	9.551.594.408	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	9.551.594.408	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.894.392.796	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.586.760	
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.586.760	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.065.612.301	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.000.364.571	
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.302.160	
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	36.945.570	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.093.426.017	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.319.040	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.853.967	
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	319.459.470	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.046.440	
3.25.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.254.350	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.248.750	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	593.244.000	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	428.451.852	
3.25.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.487.400	
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189.964.452	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.776.400	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.476.400	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.300.000	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	925.539.466	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	274.564.278	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.185.188	
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	598.790.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	242.694.302	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	195.188.220	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	135.588.225	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	59.599.995	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.506.082	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	47.506.082	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.779.471.801	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	22.730.000	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	22.730.000	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.756.741.801	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.332.796.142	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	404.889.683	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.055.976	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	156.634.988	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	156.634.988	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	156.634.988	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	478.400.521	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	54.395.010	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.395.010	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	5.783.834	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	5.783.834	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	418.221.677	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	408.807.299	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.414.378	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.479.370.278	
2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.479.370.278	
2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.479.370.278	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	839.703.524	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	14.640.940	
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	14.640.940	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	397.397.584	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	354.626.044	
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	42.771.540	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	355.100.000	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	355.100.000	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	72.565.000	
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	72.565.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	875.609.082	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	875.609.082	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	170.502.910	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	539.141.678	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	69.800.000	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	96.164.494	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	60.398.534	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	60.398.534	
3.26.04.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	60.398.534	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	703.659.138	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	677.615.318	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	103.310.152	
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	58.522.450	
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	515.782.716	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	26.043.820	
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	26.043.820	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	31.004.977.730	
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	31.004.977.730	
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	31.004.977.730	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.867.266.290	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.802.340	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.802.340	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.216.676.499	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.115.877.399	
3.27.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.600.000	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	61.199.100	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.247.230.417	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.551.543	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	240.665.874	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.874.000	
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	37.392.000	
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.837.500	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.791.909.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.940.000	
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.540.000	
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.400.000	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	618.508.832	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	291.908.832	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	326.600.000	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	591.108.202	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	413.608.202	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.500.000	
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	148.000.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.468.692.440	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.402.000.000	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.700.000.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	702.000.000	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.600.000	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	21.600.000	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.045.092.440	
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	1.019.676.440	
3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	18.000.000	
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	7.416.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.340.400.000	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	39.600.000	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	39.600.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	8.300.800.000	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	21.600.000	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8.200.000.000	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	79.200.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	667.919.000	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	66.000.000	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	66.000.000	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	5.956.500	
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.956.500	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.000.000	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	24.000.000	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	571.962.500	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	571.962.500	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	126.000.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	126.000.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	126.000.000	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	43.200.000	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	43.200.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	43.200.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	491.500.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	491.500.000	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	426.500.000	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	39.600.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	22.400.000	
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	3.000.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.051.463.200	
3.30.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan	9.051.463.200	
3.30.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan	9.051.463.200	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.184.065.009	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.213.210	
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.213.210	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.720.108.115	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.709.819.639	
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.988.520	
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.299.956	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	680.336.864	
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.995.232	
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.998.618	
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.849.074	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.562.798	
3.30.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	6.300.642	
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.798.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.832.500	
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.807.264	
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.436.764	
3.30.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.370.500	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.733.540	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.038.740	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.694.800	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.866.016	
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.346.284	
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.500.000	
3.30.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	6.657.900	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	121.361.832	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	49.407.304	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	49.407.304	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	49.407.304	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.037.563.876	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.886.308.074	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	768.707.285	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.117.600.789	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	151.255.802	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	151.255.802	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	76.415.582	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	61.415.630	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	46.442.830	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	14.972.800	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.999.952	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	14.999.952	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	173.105.215	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	173.105.215	
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	26.590.984	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	89.987.091	
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	56.527.140	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	224.966.294	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	224.966.294	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	199.997.831	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	24.968.463	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	305.939.920	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	305.939.920	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	305.939.920	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.941.214.978	
3.31.2.17.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian	5.941.214.978	
3.31.2.17.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian	5.941.214.978	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.002.837.762	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.189	
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.189	
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.054.277.175	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.046.776.613	
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.250.343	
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.250.219	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.496.580.458	
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.830.500	
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.992.696	
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.908.814	
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.868.668	
3.31.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.354.830	
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.495.950	
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.300.129.000	
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	212.156.698	
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	212.156.698	
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.452.800	
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.320.000	
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.132.800	
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.870.442	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.290.442	
3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.580.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	731.031.362	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	731.031.362	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	10.999.850	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	108.792.156	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	151.153.530	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	460.085.826	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	63.995.342	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	63.995.342	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	63.995.342	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	143.350.512	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	143.350.512	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	98.616.708	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	35.401.378	
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	9.332.426	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	78.753.663.645	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	78.753.663.645	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	78.753.663.645	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.030.990.867	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.972.000	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.972.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.398.927.248	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.242.798.268	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.321.460	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.903.760	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.903.760	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.151.585.609	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.932.423.209	
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	219.162.400	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.925.104.943	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114.997.400	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	452.109.861	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	342.375.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.452.800	
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10.228.784	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.468.134.098	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.462.807.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	287.235.144	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.157.444	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.077.700	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.274.981.372	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	129.585.920	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.573.101.624	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	747.322.194	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	824.971.634	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.461.318.234	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.738.670.884	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	352.968.950	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	369.678.400	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.327.196.829	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	168.541.206	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	758.655.623	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.773.285.328	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.025.909.188	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	633.556.140	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	113.820.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	200.245.797	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	85.928.911	
4.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	26.364.136	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	87.952.750	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.193.138.363	
4.01.01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolan	213.558.288	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	888.591.771	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	90.988.304	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	34.397.619.502	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	168.310.394	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	43.779.600	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	47.051.728	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	77.479.066	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	33.907.856.768	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.497.822.368	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	27.410.034.400	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	321.452.340	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	97.041.600	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	104.404.140	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	120.006.600	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	325.053.276	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	91.165.800	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	46.259.600	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	44.906.200	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	34.865.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	34.865.000	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	165.054.976	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	165.054.976	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	33.967.500	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	33.967.500	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	36.787.089.456	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	36.787.089.456	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	36.787.089.456	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.941.790.846	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.382.897	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.382.897	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.454.649.275	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.265.700.584	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	103.782.897	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.982.897	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	82.182.897	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.078.981.100	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.839.404	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.072.550	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	243.959.950	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.726.676	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	125.800.000	
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.249.520	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.310.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.449.023.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.477.200	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.482.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.980.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	208.015.200	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.285.674	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	294.324.498	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.528.526	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.332.650	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.100.000	
4.02.01.2.13	Penataan Organisasi	57.487.500	
4.02.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	57.487.500	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.288.527.200	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.983.657.200	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	229.870.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.000.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.845.298.610	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	530.953.143	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	120.539.405	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	205.206.869	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	205.206.869	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	164.866.217	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	41.390.969	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	27.625.019	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	34.140.930	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	34.140.930	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	27.568.369	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	706.920.340	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	158.055.600	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	258.000.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	290.864.740	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	322.226.910	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	9.900.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	312.326.910	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	29.670.000	
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	29.670.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	10.090.662.000	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.485.026.000	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.605.636.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	14.281.064.087	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	14.281.064.087	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	14.281.064.087	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.790.179.601	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.267.074	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.128.810	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.138.264	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.451.588.186	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.400.000.546	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.393.600	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26.194.040	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.724.993.381	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	89.455.070	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.206.947.669	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	202.810.027	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.086.380	
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	142.332.235	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.827.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.031.534.500	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	254.275.844	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	254.275.844	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	915.280.648	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	558.298.328	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.250.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.732.320	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.774.468	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	312.438.848	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.335.620	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.462.544.686	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.667.276.921	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	79.536.000	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	67.429.375	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	492.335.846	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	318.855.700	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	709.120.000	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	242.512.500	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	242.512.500	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	552.755.265	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	404.310.265	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	148.445.000	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.028.339.800	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	546.398.300	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	125.993.500	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	84.838.500	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	59.033.500	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	128.116.550	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	90.026.750	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	58.389.500	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	224.789.000	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110.283.000	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	66.521.000	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	47.985.000	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	257.152.500	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	118.270.000	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	79.842.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	59.040.000	
5.02	KEUANGAN	127.393.371.394	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	15.250.976.532	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	15.250.976.532	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.797.990.262	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.671.500	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.801.500	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.870.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.479.179.283	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.440.747.283	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.382.000	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.050.000	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.810.359	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.810.359	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.300.324.752	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	133.238.820	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	447.186.298	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.532.760	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	426.351.554	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	154.678.860	
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	55.789.840	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.037.620	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	974.509.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	174.076.484	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174.076.484	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	953.713.720	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.607.400	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	368.683.600	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562.422.720	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804.214.164	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.630.404	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.050.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	536.533.760	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.204.136.020	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.684.197.671	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	73.470.100	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	72.769.700	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	10.328.000	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	10.286.800	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	37.025.910	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	37.067.110	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	911.564.240	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	146.291.812	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	385.393.999	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	970.882.391	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	224.859.000	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	43.533.692	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	15.369.700	
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	110.339.862	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	81.182.417	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	177.640.800	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	317.956.920	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	549.055.958	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	81.491.553	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	23.539.400	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	20.461.530	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	101.029.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	71.496.245	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	48.353.400	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	48.353.400	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	154.331.430	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.248.850.250	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.248.850.250	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	323.773.700	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	11.416.200	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	84.418.200	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	121.619.450	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	13.494.670	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	82.941.700	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	113.245.480	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	257.982.800	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	37.511.320	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	20.171.200	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	182.275.530	
5.02.0.00.0.00.01.0001	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	101.096.982.100	
5.02.0.00.0.00.01.0001	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	101.096.982.100	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	101.096.982.100	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	101.096.982.100	
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	5.000.000.000	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	68.882.235.600	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	24.690.000.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.524.746.500	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	11.045.412.762	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	11.045.412.762	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.859.255.029	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.013.859	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.999.629	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.999.629	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.999.629	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.629	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.015.343	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.626.438.563	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.452.117.194	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	168.721.479	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.799.945	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.799.945	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.171.054.474	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.296.430	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	303.694.953	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.778.654	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	643.219.245	
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	6.130.892	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.665.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.026.269.300	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	184.363.250	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	74.723.250	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.640.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	542.101.952	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	488.935.872	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.166.080	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.282.931	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.392.931	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.970.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.920.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.186.157.733	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.186.157.733	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	71.983.526	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	74.985.356	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	161.274.284	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	775.053.036	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	389.887.937	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	267.232.991	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	38.458.129	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	185.956.237	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	221.326.237	
5.03	KEPEGAWAIAN	8.724.493.316	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.724.493.316	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.724.493.316	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.543.126.953	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.585.633	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	42.760.253	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.649.788	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.175.592	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.863.273.255	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.768.855.000	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.119.621	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48.278.859	
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	41.019.775	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.666.280	
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	92.666.280	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.135.660.639	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.893.050	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.853.049	
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.085.580	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.387.000	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.081.560	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	810.360.400	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.516.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.600.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.916.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.425.146	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.459.864	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.850.000	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.115.282	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.181.366.363	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	944.654.219	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3.290.181	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	706.833.007	
5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	88.218.581	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	20.142.450	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	82.700.000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	43.470.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	616.582.598	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	39.568.269	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	144.539.829	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	432.474.500	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.257.850.829	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	82.769.225	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	100.899.775	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.033.885.229	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	40.296.600	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	362.278.717	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	172.335.680	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	16.096.916	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	173.846.121	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	517.709.931	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	517.709.931	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	517.709.931	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	517.709.931	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	517.709.931	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	517.709.931	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.141.382.736	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.141.382.736	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.141.382.736	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.141.382.736	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	264.361.576	
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	264.361.576	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	170.481.000	
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	170.481.000	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	706.540.160	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	231.007.300	
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	297.137.860	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	178.395.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	17.187.496.522	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	17.187.496.522	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	17.187.496.522	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.162.506.619	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.560.850	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	539.100	
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	539.100	
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	539.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	268.200	
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	268.200	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	926.100	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	481.050	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.443.378.026	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.369.854.916	
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.159.910	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.181.600	
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.181.600	
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.188.090	
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.188.090	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	502.136.380	
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	65.628.180	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	198.795.900	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	237.712.300	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.358.046.047	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.152.450	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.064.740	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.728.614	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.640.670	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.996.193	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.291.380	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.019.172.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	259.245.492	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	61.115.382	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	198.130.110	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.159.440	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.710.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.449.440	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.792.294	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.376.048	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.609.998	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.650.000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.156.248	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.910.818.560	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.955.393.280	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	791.911.500	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	750.080.800	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	405.972.480	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	83.199.230	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	492.700.240	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	431.529.030	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	955.425.280	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	245.391.650	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	710.033.630	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.114.171.343	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	28.290.873	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	26.777.008	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	1.513.865	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1.085.880.470	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	179.563.560	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	215.505.540	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	576.537.990	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	114.273.380	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	49.138.928.420	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Piani	3.233.652.863	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Piani	3.233.652.863	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.811.060.395	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.149.765	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	750.018	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.018	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	750.018	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	750.018	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.149.693	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.391.468.167	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.389.268.075	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.100.046	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.100.046	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.085.557	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.749.940	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.805.863	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.081.890	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.702.914	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.435.950	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.309.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.878.858	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.040.858	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.838.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.027.200	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.795.680	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.681.600	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.549.920	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	921.450.848	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.838.896	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.200.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	855.411.952	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.433.280	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	43.433.280	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.433.280	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	267.623.408	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	260.039.208	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.065.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	255.973.808	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.584.200	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.937.300	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3.646.900	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.932.500	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.932.500	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.446.900	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.485.600	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.754.800	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.754.800	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.443.500	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.311.300	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	62.848.480	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	62.848.480	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	39.937.080	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.303.800	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.303.800	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.303.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Tapin Selatan	4.670.212.086	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Tapin Selatan	4.000.212.386	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.546.567.590	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.522.140	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.124.920	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.124.920	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.274.904	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.274.904	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.722.492	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.832.216.161	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.825.209.177	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.364.564	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.642.420	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.122.327	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.458.730	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.694.677	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.980.772	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.149.048	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.839.100	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.786.594	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	9.424.488	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.362.106	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.966.364	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.990.212	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.926.392	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.049.760	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.954.004	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.742.004	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.212.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.233.280	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36.233.280	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.233.280	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	358.767.176	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	220.776.852	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.999.992	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	216.776.860	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	132.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	132.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.990.324	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.990.548	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.999.776	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.999.776	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.999.776	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.999.776	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.620.900	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.620.900	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35.668.700	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.952.200	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.023.664	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.023.664	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.499.884	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.499.680	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.499.700	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.524.400	
7.01.0.00.0.00.02.0001	KELURAHAN TAMBARANGAN	669.999.700	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	669.999.700	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	669.999.700	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	337.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	332.999.700	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Binuang	6.534.140.185	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Binuang	4.618.616.922	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.971.023.746	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.008.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.008.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.430.939.684	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.426.141.284	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.399.200	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.399.200	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	328.530.674	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.484.190	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.052.368	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.483.776	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.991.540	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.518.800	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.839.200	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.489.200	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.150.320	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.199.680	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.706.188	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.506.188	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.200.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.226.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36.226.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.226.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	564.916.186	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	113.716.186	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.208.750	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	111.507.436	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	451.200.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	451.200.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.417.500	
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.417.500	
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.208.750	
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.208.750	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.065.490	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.065.490	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.065.490	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.968.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.968.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.208.750	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.208.750	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.208.750	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.208.750	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.133.000	
7.01.0.00.0.00.03.0001	KELURAHAN BINUANG	636.005.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	636.005.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	636.005.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	347.200.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	288.805.000	
7.01.0.00.0.00.03.0002	KELURAHAN KARANGAN PUTIH	635.798.539	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	635.798.539	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	635.798.539	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	362.800.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	272.998.539	
7.01.0.00.0.00.03.0003	KELURAHAN RAYA BELANTI	643.719.724	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	643.719.724	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	643.719.724	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	354.400.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	289.319.724	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Bungur	3.036.061.816	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Bungur	3.036.061.816	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.815.591.966	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.611.560	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.017.500	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.017.500	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.017.500	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.017.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.541.560	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.859.639.495	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.856.792.995	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.520.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.326.500	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	379.321.393	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.366.984	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.139.139	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.632.670	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.769.600	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.413.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.378.026	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.678.026	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.700.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.110.360	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.476.800	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.167.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.466.560	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.531.132	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.201.132	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.540.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	296.790.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.148.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	41.148.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.148.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	123.904.300	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	117.508.100	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.786.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	113.722.100	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6.396.200	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.198.100	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3.198.100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.198.100	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.198.100	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.198.100	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.256.950	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.256.950	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.076.100	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.180.850	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.962.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.962.500	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.442.250	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.185.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.635.750	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.699.500	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Tapin Utara	8.573.868.441	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Tapin Utara	6.133.587.641	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.462.538.925	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.108.088	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.124.866	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.124.866	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.274.928	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.274.928	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.308.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.967.047.667	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.964.497.811	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.274.928	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.274.928	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.047.717	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.465.630	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.092.184	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.405.434	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.561.080	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	6.222.789	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.300.600	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.972.454	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.610.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.362.454	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.950.376	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.445.336	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.505.040	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.412.623	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.637.623	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.975.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.800.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.735.600	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	39.735.600	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.735.600	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	591.714.816	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	103.136.316	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.882.900	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.253.416	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	482.659.500	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.659.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	480.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.919.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.959.500	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.959.500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.959.500	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.959.500	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.959.500	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.787.900	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.787.900	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.893.950	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.893.950	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.850.900	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.850.900	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.151.500	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.151.500	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.151.500	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.198.200	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.198.200	
7.01.0.00.0.00.05.0001	KELURAHAN RANGDA MALINGKUNG	640.673.700	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	640.673.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	640.673.700	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	291.019.164	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	349.654.536	
7.01.0.00.0.00.05.0002	KELURAHAN KUPANG	617.325.800	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	617.325.800	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	617.325.800	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	287.570.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	329.755.800	
7.01.0.00.0.00.05.0003	KELURAHAN RANTAU KANAN	622.718.300	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	622.718.300	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	622.718.300	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	303.281.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	319.437.300	
7.01.0.00.0.00.05.0004	KELURAHAN RANTAU KIWA	559.563.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	559.563.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	559.563.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	259.922.050	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	299.640.950	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Bakarangan	3.161.027.041	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Bakarangan	3.161.027.041	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.897.484.285	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.349.788	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	999.940	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	999.940	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	999.940	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.849.968	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.913.078.710	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.905.811.310	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.267.400	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.647.753	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.992.905	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.346.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.999.848	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.472.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284.837.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.370.244	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	40.673.460	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.696.784	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.137.240	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.237.400	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.899.840	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.900.550	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.856.550	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.920.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	327.124.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.298.320	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36.298.320	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.298.320	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	171.779.536	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	171.779.536	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	171.779.536	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.131.800	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.131.800	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.131.800	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.122.600	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.122.600	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.403.500	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.719.100	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.210.500	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.210.500	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.270.500	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.270.500	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.270.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12.399.000	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Candi Laras Selatan	3.101.610.657	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Candi Laras Selatan	3.101.610.657	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.646.777.399	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.766.120	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.766.120	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.958.832.217	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.942.890.625	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.258.892	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.682.700	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.253.940	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.940.754	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.644.304	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.291.032	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.179.300	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.480.500	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.718.050	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135.761.810	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.740.964	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.020.846	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.722.696	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.494.376	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.008.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.220.320	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.440.616	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.635.616	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.320.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.485.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.233.280	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36.233.280	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.233.280	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	144.564.662	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	128.716.224	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.599.576	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	122.116.648	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15.848.438	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	13.660.192	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.188.246	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.799.608	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.799.608	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.799.608	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.742.724	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.742.724	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.998.200	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8.744.524	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	234.492.984	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	234.492.984	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	26.476.208	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.144.504	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.162.872	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.612.886	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.512.842	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	63.837.936	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.512.842	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	86.232.894	
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Candi Laras Utara	3.059.741.362	
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Candi Laras Utara	3.059.741.362	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.692.173.990	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.837.440	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.609.750	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.609.750	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	514.370	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	514.370	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.589.200	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.054.779.594	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.046.725.186	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.002.408	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.052.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	380.811.294	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.163.770	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.680.998	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.968.035	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.172.491	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.635.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	266.191.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.098.176	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.873.176	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.225.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.149.782	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.387.040	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.116.992	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.645.750	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.497.704	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.569.102	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.331.042	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.597.560	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	79.200.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	79.200.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79.200.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	178.631.040	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	165.347.790	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.352.050	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	158.995.740	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	13.283.250	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8.855.500	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4.427.750	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.584.350	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.584.350	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.584.350	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	43.049.400	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	43.049.400	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	43.049.400	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	51.102.582	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.102.582	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.375.856	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.223.498	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.761.300	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.951.678	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.278.950	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13.511.300	
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Hatungun	2.941.359.069	
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Hatungun	2.941.359.069	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.708.042.405	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.166.572	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.384	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.384	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.384	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.384	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.165.036	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.802.932.178	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.799.931.448	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.365	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.500.365	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	475.094.213	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.020	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.030	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.001.083	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.080	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.093.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.036.632	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.036.632	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.734.320	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.040	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.701.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.033.280	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.078.490	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.088.490	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.990.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.233.280	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36.233.280	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.233.280	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	130.080.423	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	123.079.757	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.500.333	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	119.579.424	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.000.666	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.500.333	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3.500.333	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.000.666	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.000.666	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.500.333	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.500.333	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.500.630	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.500.630	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.297	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.500.333	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.501.665	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.501.665	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.500.333	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.500.333	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.500.333	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.500.333	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12.500.333	
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Salam Babaris	3.136.372.085	
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Salam Babaris	3.136.372.085	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.858.253.823	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.551.908	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.541.970	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.426.644	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.508.688	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.422.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.475.406	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.177.200	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.965.427.345	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.953.020.439	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.020.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.386.906	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	463.599.565	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.697.180	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.374.558	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.017.650	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.250.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.219.677	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.497.500	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269.543.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.872.891	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.872.891	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.313.902	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.971.200	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.157.168	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.183.540	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.001.994	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.488.212	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.253.212	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.435.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.800.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	72.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	116.858.448	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	111.673.708	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.557.870	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	105.115.838	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.184.740	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.592.370	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.592.370	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.751.240	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.751.240	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.158.870	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.592.370	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	56.837.820	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	56.837.820	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	53.525.080	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.312.740	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.670.754	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.670.754	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.592.370	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.592.370	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.858.370	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.627.644	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15.000.000	
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tapin Tengah	3.093.854.557	
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tapin Tengah	3.093.854.557	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.664.859.507	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.848.280	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.952.900	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.952.900	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.952.900	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.952.900	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.036.680	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.934.483.413	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.926.138.713	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.534.900	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.809.800	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	391.012.184	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.768.958	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.845.426	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.639.240	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.988.560	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.545.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.225.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.074.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.074.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.772.456	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.705.896	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.600.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.466.560	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.669.174	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.519.066	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.675.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.475.108	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.327.880	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	41.327.880	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.327.880	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	312.654.570	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	297.789.470	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.847.400	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	288.942.070	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	14.865.100	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8.914.400	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5.950.700	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.757.200	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.757.200	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.757.200	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.984.400	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.984.400	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	36.527.200	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.457.200	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.271.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.271.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.067.750	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.067.750	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5.067.750	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.067.750	
7.01.7.01.0.00.12.0000	Kecamatan Lokpaikat	4.597.028.258	
7.01.7.01.0.00.12.0000	Kecamatan Lokpaikat	3.927.028.258	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.576.215.594	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.498.684	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	749.416	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	749.868	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	749.868	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	749.868	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.499.664	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.640.993.322	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.638.543.930	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.299.728	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.149.664	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.275.269	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.204	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.881.789	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.907.966	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.037.310	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.449.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.600.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.084.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.516.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.961.128	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.471.648	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.673.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.816.480	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.887.191	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.167.191	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.260.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	201.460.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.200.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	43.200.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.200.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	238.541.712	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	231.690.612	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.834.834	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	225.855.778	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6.851.100	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.275.300	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.575.800	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.797.530	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.797.530	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22.597.714	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.199.816	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	42.273.422	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.273.422	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.349.880	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.149.796	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.349.880	
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	4.349.880	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.274.668	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.849.608	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15.949.710	
7.01.7.01.0.00.12.0001	KELURAHAN BITAHAN	670.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	670.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	670.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	205.110.100	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	464.889.900	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.829.666.378	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.829.666.378	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.829.666.378	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.822.739.898	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.400.750	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.400.750	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.626.065.084	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.620.717.464	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.537.560	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.810.060	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	622.021.032	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.029.928	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.344.949	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.306.925	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.267.150	
8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.818.080	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.643.500	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	464.610.500	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.004.320	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.992.800	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.095.200	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	244.916.320	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.248.712	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.302.472	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.020.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.996.000	
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	930.240	
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	216.638.100	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	216.638.100	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	175.928.900	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40.709.200	
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.303.091.980	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.303.091.980	
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.092.770.000	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	145.075.200	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	39.243.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	26.003.180	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	68.422.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	68.422.000	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	37.965.200	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.456.800	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	163.859.500	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	163.859.500	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	119.496.400	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	44.363.100	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	254.914.900	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	254.914.900	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	152.713.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9.576.050	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40.470.250	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	52.154.800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
1	01	01							166,019,961,369			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1	01	01	2.01						24,733,935			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu. Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Tercapainya tata kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,999,740
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu. Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Tercapainya tata kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,424,354
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu. Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Tercapainya tata kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,848,172
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu. Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Tercapainya tata kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,177,350
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu. Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Tercapainya tata kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,177,350
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu. Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.	100 % 100 % 100 %			Tercapainya tata kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		7,490,719

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu. Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Tercapainya tata kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		4,616,250	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						160,103,483,390			
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1714 Orang/bulan	Tercapainya tata kelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		160,094,757,222	
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %			Tercapainya tata kelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		5,716,800	
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %			Tercapainya tata kelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		3,009,368	
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4,829,050			
1	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %			Tercapainya tata kelola Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		4,829,050	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,761,753,410			
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %			Tercapainya tata kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		12,904,012	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %			Tercapainya tata kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		257,341,803	
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %			Tercapainya tata kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		170,115,000	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Tercapainya tata kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		48,263,943	
1	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Tercapainya tata kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		2,945,652	
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Tercapainya tata kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,127,183,000	
1	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Tercapainya tata kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	143,000,000	
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								676,449,464	
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %			Terkelolanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		676,449,464	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,298,441,468	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Terkelolanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	215,243,048	
1	01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %			Terkelolanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	31,634,292	
1	01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Terkelolanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,051,564,128	
1	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							150,270,652	
1	01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %			Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	86,943,696	
1	01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %			Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	29,974,232	
1	01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %			Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	33,352,724	
1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							18,061,822,518	
1	01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							10,858,756,539	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	799,999,768
1	01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	189,994,204
1	01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	40 Unit	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,596,533,513
1	01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	999,976,053
1	01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,988,315
1	01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	7 Unit	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,984,676

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	Tecapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299,988,307	
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Unit	Tecapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,995,352	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	Tecapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %		120,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	178 Satuan Pendidikan	Tecapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,163,870	
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	178 Satuan Pendidikan	Tecapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,800,587	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	178 Satuan Pendidikan	Tecapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,332,626	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SD)	0,09 % 100 % 100 % 96 % 100 % 97 %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	350 Orang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	369,999,268	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								1,774,531,034	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	599,268,024	
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %		399,988,083	
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 Paket	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %		49,990,704	
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %		149,500,035	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
1	01	02	2.02	37	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	26 Satuan Pendidikan	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,000,074	
1	01	02	2.02	38	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	36 Peserta Didik	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,183,842	
1	01	02	2.02	40	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,612,316	
1	01	02	2.02	41	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	26 Satuan Pendidikan	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,999,641	
1	01	02	2.02	45	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (SMP)	0,30 % 92 % 92 % 50 % 100 % 68 %	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,988,315	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						4,975,590,945		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)	80 % 80 % 60 % 75 %	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	599,995,724		
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)	80 % 80 % 60 % 75 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	577,310,918	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)	80 % 80 % 60 % 75 %	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	199,999,768	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)	80 % 80 % 60 % 75 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	17,152,500	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)	80 % 80 % 60 % 75 %	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	80,000,000	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)	80 % 80 % 60 % 75 %			Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	3,015,000,000		
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)	80 % 80 % 60 % 75 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	359,101,215		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)	80 % 80 % 60 % 75 %	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	182 Satuan Pendidikan	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,101,820	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PAUD)	80 % 80 % 60 % 75 %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	186 Satuan Pendidikan	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %		29,929,000	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								452,944,000	
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PNF Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun yang mengikuti program Pendidikan Non Formal	58 % 58 %	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	178,400,000	
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PNF Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun yang mengikuti program Pendidikan Non Formal	58 % 58 %	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,982,200	
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PNF Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun yang mengikuti program Pendidikan Non Formal	58 % 58 %	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	100 Peserta Didik	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,767,000	
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PNF Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun yang mengikuti program Pendidikan Non Formal	58 % 58 %	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	14 Satuan Pendidikan	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %		31,778,400	
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PNF Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun yang mengikuti program Pendidikan Non Formal	58 % 58 %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %		6,284,400	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PNF Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun yang mengikuti program Pendidikan Non Formal	58 % 58 %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %		19,732,000	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								393,179,892	
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								393,179,892	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik (Guru) yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan PAUD/PNF Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SD Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SMP Rasio Guru Terhadap Siswa SD Rasio Guru Terhadap Siswa SMP Rasio Guru Terhadap Siswa TK	93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 85 %	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen	Tercapainya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	389,773,960	
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik (Guru) yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan PAUD/PNF Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SD Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SMP Rasio Guru Terhadap Siswa SD Rasio Guru Terhadap Siswa SMP Rasio Guru Terhadap Siswa TK	93 % 93 % 93 % 93 % 85 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	Tercapainya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,405,932	
								TOTAL	184,474,963,779					

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							74,621,984,931	
1 02 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							149,604,828	
1 02 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ASN yang dilayani administrasi kepegawaiannya Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1	1 %	8,381,356	
1 02 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ASN yang dilayani administrasi kepegawaiannya Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1	1 %	141,223,472	
1 02 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							71,432,458,591	
1 02 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							71,418,296,091	
1 02 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			2,832,500	
1 02 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan			11,330,000	
1 02 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							2,063,675,039	
1 02 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			131,841,354	
1 02 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket			154,627,707	
1 02 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket			17,063,356	
1 02 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket			1,940,622	
1 02 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,758,202,000	
1 02 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							212,370,760	
1 02 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit			212,370,760	
1 02 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							658,827,052	
1 02 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			364,727,052	
1 02 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			294,100,000	
1 02 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							105,048,661	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit				87,268,661	
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit				17,780,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								19,395,743,058	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								2,993,472,922	
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Persentase Pelayanan Gizi Balita Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Persentase PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat Persentase Penduduk menggunakan Sarana Air Bersih	80 % 80 % 100 % 100 % 80 % 80 %	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,501,583,356	
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pelayanan Gizi Balita Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Persentase PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat Persentase Penduduk menggunakan Sarana Air Bersih	80 % 80 % 100 % 100 % 80 % 80 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	1	1 1		1,583,356	
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase Pelayanan Gizi Balita Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Persentase PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat Persentase Penduduk menggunakan Sarana Air Bersih	80 % 80 % 100 % 100 % 80 % 80 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10 Unit	1	1 1		599,804	
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pelayanan Gizi Balita Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Persentase PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat Persentase Penduduk menggunakan Sarana Air Bersih	80 % 80 % 100 % 100 % 80 % 80 %	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	1	1 1		1,583,356	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Pelayanan Gizi Balita Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Persentase PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat Persentase Penduduk menggunakan Sarana Air Bersih	80 % 80 % 100 % 100 % 80 % 80 %	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	100 Paket	1	1	488,123,050		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							16,327,575,296		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188,041,662	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,118,050	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,098,558	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,674,536	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,759,482	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,833,800	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,397,800	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,632,240	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,632,240	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,632,240	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang 3238 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,195,712	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			Jumlah Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4387 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,946,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30 Dokumen			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	253,867,050	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16 Dokumen				39,794,880	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9 Dokumen				96,986,316	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15 Dokumen				34,235,300	
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,151,500	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang				2,151,500	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen				153,553,432	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	29050 orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,714,149,737	
1 02 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	30 Orang				1,968,440	
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen				59,782,444	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah pelayanan P3K	100 orang/kali			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,973,068	
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30 Dokumen			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	359,999,309	
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								14,670,000	
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	30 Dokumen				14,670,000	
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								60,024,840	
1 02 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	3 Puskesmas			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,024,840	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								2,457,125,150	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								2,401,200,000	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Desa yang memiliki bidan Persentase Kebutuhan Sumberdaya manusia kesehatan Persentase SDMk yang kompeten (memiliki STR) Rasio Jumlah Bidan terhadap jumlah penduduk	100 % 100 % 100 % 75/100000 orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	1	1 1		2,401,200,000	
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								55,925,150	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	900 Orang				55,925,150	
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								112,920,087	
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								112,920,087	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	SEDIAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 Dokumen	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112,920,087	
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								434,164,247			
1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								278,511,212		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan Persentase UKBM (Posyandu) yang dibentuk dan aktif di desa / kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	7 Dokumen	1	1		278,511,212	
1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								155,653,035		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen				155,653,035	
										TOTAL	97,021,937,473			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										61,250,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										61,250,000,000	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Waktu pelayanan rumah sakit	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,250,000,000			
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										1,984,755,256	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										1,984,755,256	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	23 Orang	Jumlah sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	23 Orang		1,984,755,256			
TOTAL												63,234,755,256				

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Puskesmas Tapin Utara
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Puskesmas Tapin Utara

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,098,809,260		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,098,809,260		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen			Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	52,010,688	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen 12 Dokumen			Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kelurahan	941,892,710	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Waktu Penyediaan Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen 12 Bulan			Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kanan	104,905,862	
TOTAL											1,098,809,260			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Puskesmas Bakarangan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Puskesmas Bakarangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										739,795,372	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										739,795,372	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen				Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	80,965,782		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen				Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	565,953,713		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen				Kab. Tapin, Bakarangan, Semua Kelurahan	92,875,877		
TOTAL												739,795,372				

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 Puskesmas Banua Padang

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 Puskesmas Banua Padang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										684,131,930	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										684,131,930	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen				Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan	85,792,932		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen					461,359,862		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Waktu Penyediaan Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Bulan				Kab. Tapin, Bungur, Semua Kelurahan	136,979,136		
												TOTAL	684,131,930			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.06.0000 Puskesmas Tambaruntung
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.06.0000 Puskesmas Tambaruntung

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									569,619,451	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									569,619,451	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen			Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pandulangan Kab. Tapin, Tapin Tengah, Labung Kab. Tapin, Tapin Tengah, Mandurian Kab. Tapin, Tapin Tengah, Serawi Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pematang Karang Hulu Kab. Tapin, Tapin Tengah, Andhika Kab. Tapin, Tapin Tengah, Sukaramai Kab. Tapin, Tapin Tengah, Tirik Kab. Tapin, Tapin Tengah, Batang Lantik Kab. Tapin, Tapin Tengah, Mandurian Hilir Kab. Tapin, Tapin Tengah, Sungai Bahalang	109,808,532	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen			Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	355,010,919	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	122 Dokumen			Kab. Tapin, Tapin Tengah, Semua Kelurahan	104,800,000	
TOTAL											569,619,451			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.07.0000 Puskesmas Pandahan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.07.0000 Puskesmas Pandahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										416,437,654	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										416,437,654	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen				Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pandahan	56,837,838		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen				Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pandahan	288,100,139		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Waktu Penyediaan operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan				Kab. Tapin, Tapin Tengah, Pandahan	71,499,677		
												TOTAL	416,437,654			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.08.0000 Puskesmas Lokpaikat
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.08.0000 Puskesmas Lokpaikat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										655,544,932	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										655,544,932	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen				Kab. Tapin, Lokpaikat, Semua Kelurahan	80,946,432		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen				Kab. Tapin, Lokpaikat, Semua Kelurahan	497,569,651		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen				Kab. Tapin, Lokpaikat, Semua Kelurahan	77,028,849		
												TOTAL	655,544,932			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.09.0000 Puskesmas Tambarangan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.09.0000 Puskesmas Tambarangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										830,196,493	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										830,196,493	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,946,432		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen					585,900,165		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen				Kab. Tapin, Tapin Selatan, Semua Kelurahan	163,349,896		
												TOTAL	830,196,493			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10.0000 Puskesmas Salam Babaris

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.10.0000 Puskesmas Salam Babaris

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										488,627,134	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										488,627,134	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen				Kab. Tapin, Salam Babaris, Semua Kelurahan	35,167,224		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen					346,316,471		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen					107,143,439		
												TOTAL	488,627,134			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.11.0000 Puskesmas Piani
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.11.0000 Puskesmas Piani

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										440,925,526	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										440,925,526	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen				Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	65,245,638		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen					249,999,888		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas								Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tapin, Piani, Semua Kelurahan	125,680,000		
												TOTAL	440,925,526			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.12.0000 Puskesmas Binuang

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.12.0000 Puskesmas Binuang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										1,170,839,082	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										1,170,839,082	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen				80,946,432			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen			Kab. Tapin, Binuang, Semua Kelurahan	870,908,956			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen			Kab. Tapin, Binuang, Semua Kelurahan	218,983,694			
TOTAL												1,170,839,082				

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.13.0000 Puskesmas Hatungun

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.13.0000 Puskesmas Hatungun

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										422,410,563	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										422,410,563	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen				Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	48,410,688		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen					239,999,982		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen				Kab. Tapin, Hatungun, Semua Kelurahan	133,999,893		
												TOTAL	422,410,563			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.14.0000 Puskesmas Baringin
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.14.0000 Puskesmas Baringin

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										868,715,765	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										868,715,765	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen				Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	52,010,688		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen				Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	594,505,127		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen				Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kelurahan	222,199,950		
TOTAL												868,715,765				

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.15.0000 Puskesmas Margasari

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.15.0000 Puskesmas Margasari

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										945,630,501	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										945,630,501	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen					48,410,688		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen			Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	785,600,269			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen			Kab. Tapin, Candi Laras Utara, Semua Kelurahan	111,619,544			
TOTAL												945,630,501				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 03 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							17,332,151,795	
1 03 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							558,031,840	
1 03 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 tahun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1	1	558,031,840	
1 03 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							11,913,977,991	
1 03 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan			11,894,351,479	
1 03 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			11,700,112	
1 03 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan			7,926,400	
1 03 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							3,160,621,485	
1 03 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							1,286,574,254	
1 03 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							223,669,010	
1 03 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							84,793,161	
1 03 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							9,899,190	
1 03 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket			234,831,770	
1 03 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan			9,290,600	
1 03 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			1,311,563,500	
1 03 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							156,589,100	
1 03 01	2.07 05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit			156,589,100	
1 03 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							926,435,748	
1 03 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			14,964,000	
1 03 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			505,562,640	
1 03 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							405,909,108	
1 03 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							616,495,631	
1 03 01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			505,144,985	
1 03 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			111,350,646	
1 03 02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							53,780,000,000	
1 03 02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							47,405,000,000	
1 03 02	2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Tercapainya Normalisasi/Restorasi Sungai	322 km	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	2.208 KM	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	322 km	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,225,000,000
1 03 02	2.01 11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Tercapainya Normalisasi/Restorasi Sungai	322 km	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	74 Unit	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	322 km	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,780,000,000

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Tercapainya Normalisasi/ Restorasi Sungai	322 km	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	322 KM	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	322 km	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,400,000,000	
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								6,375,000,000	
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	3680 KM			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,375,000,000	
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan								4,000,000,000	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								9,411,327,509	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								9,411,327,509	
1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Perluasan/Perbaikan SPAM	Meningkatkan akses air minum di Kabupaten Tapin Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih1	100 % 100 %	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	1500 Dokumen	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1500 SR		200,000,000	
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatkan akses air minum di Kabupaten Tapin Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih1	100 % 100 %	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1500 SR	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1500 SR	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,211,327,509	
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								3,000,000,000	
1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota								3,000,000,000	
1 03 04 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbangunnya sarana dan prasarana persampahan	10 unit	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perbaikan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	12 Dokumen	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2000 rumah tangga		304,000,000	
1 03 04 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terbangunnya sarana dan prasarana persampahan	10 unit	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2000 Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2000 rumah tangga		2,696,000,000	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								2,150,000,000	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								2,150,000,000	
1 03 05 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah di Kabupaten Tapin	200 KK	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	12 Dokumen	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	200 Rumah Tangga		200,000,000	
1 03 05 2.01 12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah di Kabupaten Tapin	200 KK	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	200 Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	200 Rumah Tangga	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,950,000,000	
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								42,440,412,471	
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								42,440,412,471	
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Pembangunan Gedung Kantor	15 Buah	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		900,000,000	
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Kantor	15 Buah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,915,412,471	
1 03 08 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Kantor	15 Buah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		1,625,000,000	
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								3,900,000,000	
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								3,900,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	09	2.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terbangunnya gedung kantor	15 buah	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	12 Kawasan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	12 Kawasan		500,000,000	
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terbangunnya gedung kantor	15 buah	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	12 Kawasan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	12 Kawasan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,400,000,000	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							144,597,500,000		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							144,597,500,000		
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen		4,850,000,000	
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	250000 M ²	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen		12,480,000,000	
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen		400,000,000	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	Panjang Jalan yang Dibangun	7 KM	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,470,785,000	
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	2 KM	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,500,000,000	
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	40 KM	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,050,000,000	
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15 KM	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,700,000,000	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0.5 KM	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen		2,796,715,000	
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	Panjang Jembatan yang Dibangun	250 M	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,450,000,000	
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	100 M	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,650,000,000	
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 Bulan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	30 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen		2,250,000,000	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							200,552,790		
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							60,265,390		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	6 orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	0 Orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50 orang		60,265,390	
1 03 11 2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)								140,287,400	
1 03 11 2.03 03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	0 Orang				140,287,400	
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								3,099,999,817	
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								1,367,620,244	
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	80 %	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		917,528,300	
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	80 %			Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		450,091,944	
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								786,945,000	
1 03 12 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen				102,560,000	
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota								684,385,000	
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								591,043,288	
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah								373,470,500	
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang								217,572,788	
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								354,391,285	
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen				354,391,285	
TOTAL									279,911,944,382	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 04 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,853,834,937	
1 04 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10,336,560	
1 04 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Persentase Terlaksananya penyusunan anggaran dan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,678,970
1 04 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Terlaksananya penyusunan anggaran dan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,144,420
1 04 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Terlaksananya penyusunan anggaran dan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,077,450
1 04 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Terlaksananya penyusunan anggaran dan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,105,830
1 04 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase Terlaksananya penyusunan anggaran dan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,144,530
1 04 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Persentase Terlaksananya penyusunan anggaran dan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,170,160
1 04 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Persentase Terlaksananya penyusunan anggaran dan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,015,200
1 04 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,875,442,818	
1 04 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 Orang/bulan	Persentase Terlaksananya administrasi penyediaan gaji & Tunjangan ASN dan pelaporan Keuangan	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,871,401,778
1 04 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase Terlaksananya administrasi penyediaan gaji & Tunjangan ASN dan pelaporan Keuangan	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,020,520
1 04 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase Terlaksananya administrasi penyediaan gaji & Tunjangan ASN dan pelaporan Keuangan	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,020,520
1 04 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,239,126,212	
1 04 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Persentase Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,291,336
1 04 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	217,376,382

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Persentase Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,999,010	
1 04 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Persentase Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,347,234	
1 04 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Persentase Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,549,250	
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Persentase Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	918,563,000	
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								396,336,111	
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,388,400	
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,093,512	
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	264,854,199	
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								332,593,236	
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,990,000	
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,320,000	
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,733,236	
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,550,000	
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								834,689,250	
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								146,860,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase dokumen yang tersedia	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,930,000	
1 04 02 2.01 02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	Persentase dokumen yang tersedia	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,930,000	
1 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								27,587,750	
1 04 02 2.02 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100 % 100 %	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	200 Orang	Persentase tingkat pemahaman peserta sosialisasi	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,587,750	
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								660,241,500	
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100 %	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	50 Unit Rumah	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	460,370,750	
1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100 %	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	40 Unit Rumah	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,870,750	
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								1,285,520,750	
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								176,910,000	
1 04 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Persentase penurunan kawasan kumuh	1,2 %	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	176,910,000	
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								1,108,610,750	
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase penurunan kawasan kumuh	1,2 %	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	255 Unit Rumah	Persentase luasan kumuh yang tertangani	1,2 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,108,610,750	
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								6,739,811,500	
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								6,739,811,500	
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	4,24 % 4,24 %	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	218 Unit Rumah	Persentase realisasi peningkatan kualitas RTLH di luar kawasan kumuh sesuai target	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,657,890,750	
1 04 04 2.01 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	4,24 % 4,24 %	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	Persentase realisasi peningkatan kualitas RTLH di luar kawasan kumuh sesuai target	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,920,750	
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								16,936,041,600	
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								16,936,041,600	
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (KRB) Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik	2,64 % 65 % 65 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	Persentase perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik	2,64 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,930,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (KRB) Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik	2.64 % 65 % 65 %	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi	Persentase perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik	2.64 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,783,251,600	
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (KRB) Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik	2.64 % 65 % 65 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	Persentase perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik	2.64 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,930,000	
1 04 05 2.01 04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (KRB) Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik	2.64 % 65 % 65 %	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	Persentase perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik	2.64 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,930,000	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN								169,635,700	
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								169,635,700	
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil	100 %	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Persentase laporan persoalan pertanahan yang difasilitasi	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	169,635,700	
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								2,000,305,900	
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								2,000,305,900	
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan luas	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,305,900	
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								366,644,950	
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								366,644,950	
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan Persentase penataan administrasi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.18 % 100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Persentase usulan penyertifikatan aset tanah SKPD terverifikasi BPN	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	314,314,000	
2 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan Persentase penataan administrasi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.18 % 100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase usulan penyertifikatan aset tanah SKPD terverifikasi BPN	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,330,950	
TOTAL									33,186,484,587	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1 05 01									7,793,142,495		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1 05 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								8,744,316	
1 05 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tindak lanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan			8,744,316		
1 05 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,236,597,200	
1 05 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan			6,224,431,000		
1 05 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			6,624,700		
1 05 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan			5,541,500		
1 05 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								883,531,679	
1 05 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			16,291,638		
1 05 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			97,114,560		
1 05 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			170,880,596		
1 05 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			27,126,765		
1 05 01	2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan			10,755,120		
1 05 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan			561,363,000		
1 05 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								123,679,052	
1 05 01	2.07 05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33 Unit			54,389,100		
1 05 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit			69,289,952		
1 05 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								181,640,400	
1 05 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			124,040,400		
1 05 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			57,600,000		
1 05 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								358,949,848	
1 05 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit			320,469,848		
1 05 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			22,800,000		
1 05 01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			15,680,000		
1 05 02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								3,140,335,928	
1 05 02	2.01	Penganganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								3,007,946,428	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	50 Kasus	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,903,289,500	
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	24 Kasus	1	1		18,062,000	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,366,000	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	146 Orang	1	1		74,091,428	
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	1	1		5,137,500	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						132,389,500			
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Laporan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,536,000	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan				32,176,000	
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan				67,677,500	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						542,530,929			
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						446,953,729			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100 %	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen				399,347,100	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan				27,996,829	
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen				9,228,800	
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen				8,446,000	
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,935,000	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							95,577,200		
1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	12 Dokumen				95,577,200	
TOTAL												11,476,009,352		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan				
1 05 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,388,346,819	
1 05 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2,929,970	
1 05 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sesuai Standar	100 %	2,929,970	
1 05 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,830,690,515	
1 05 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel	100 %	2,826,824,536	
1 05 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel	100 %	1,041,110	
1 05 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan Tepat Waktu	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel	100 %	2,824,869	
1 05 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							692,994,568	
1 05 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	6,423,940	
1 05 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	39,855,918	
1 05 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	69,996,400	
1 05 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	32,624,100	
1 05 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	6,072,960	
1 05 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,948,250	
1 05 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	532,073,000	
1 05 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							117,269,670	
1 05 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	54,132,444	
1 05 01	2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	63,137,226	
1 05 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							623,730,530	
1 05 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,357,530	
1 05 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	76,513,000	
1 05 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	544,860,000	
1 05 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							120,731,566	
1 05 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Persentase Aset Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	97,381,566	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Persentase Aset Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %		23,350,000	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								673,779,364	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								173,989,000	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Menurunkan Indeks Risiko Bencana Persentase daerah terdampak bencana yang pulih Persentase Desa Tangguh Bencana	80 % 80 % 80 % 80 %	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141,690,000	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Menurunkan Indeks Risiko Bencana Persentase daerah terdampak bencana yang pulih Persentase Desa Tangguh Bencana	80 % 80 % 80 % 80 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	160 Orang	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,299,000	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								126,882,140	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Menurunkan Indeks Risiko Bencana Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan	0,31 skor 80 % 80 %	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Persentase Masyarakat dan Aparatur yang Terlatih untuk Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,858,220	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Menurunkan Indeks Risiko Bencana Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan	0,31 skor 80 % 80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Persentase Masyarakat dan Aparatur yang Terlatih untuk Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,307,000	
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Menurunkan Indeks Risiko Bencana Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan	0,31 skor 80 % 80 %	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	2 Unit	Persentase Masyarakat dan Aparatur yang Terlatih untuk Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %		35,000,000	
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Menurunkan Indeks Risiko Bencana Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan	0,31 skor 80 % 80 %	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	Persentase Masyarakat dan Aparatur yang Terlatih untuk Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %		21,716,920	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								325,600,574	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Tertanganinya Kebakaran Hutan dan Lahan yang di Bakar Tertanganinya Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terbakar	0,47 skor 15 % 25 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	35 Orang	Persentase Penanganan Darurat Bencana	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,525,450	
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Tertanganinya Kebakaran Hutan dan Lahan yang di Bakar Tertanganinya Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terbakar	0,47 skor 15 % 25 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	Persentase Penanganan Darurat Bencana	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237,075,124	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								47,307,650	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 05 03 2.04 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Memastikan Pasca Bencana tertangani	100 %	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	12 Dokumen	Persentase Penanganan Pemulihan Pasca Bencana	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,750,000	
1 05 03 2.04 06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Memastikan Pasca Bencana tertangani	100 %	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	Persentase Penanganan Pemulihan Pasca Bencana	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,557,650	
TOTAL									5,062,126,183	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,132,019,996			
1 06 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								9,488,232			
1 06 01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD sesuai standar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,488,232	
1 06 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,238,289,962		
1 06 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	Persentase dokumen administrasi keuangan SOPD yang akuntabel	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,232,350,384	
1 06 01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase dokumen administrasi keuangan SOPD yang akuntabel	100 %		2,969,968	
1 06 01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase dokumen administrasi keuangan SOPD yang akuntabel	100 %		2,969,610	
1 06 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,077,501,509		
1 06 01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %		1,896,070	
1 06 01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,498,311	
1 06 01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %		100,906,286	
1 06 01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %		26,830,522	
1 06 01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %		4,459,320	
1 06 01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %		33,990,000	
1 06 01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	802,921,000	
1 06 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								275,656,680		
1 06 01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	164,056,600	
1 06 01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	111,600,080	
1 06 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								400,349,920		
1 06 01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		748,200	
1 06 01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		174,174,120	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225,427,600	
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								130,733,693	
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,587,073	
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		13,250,000	
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		10,896,620	
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								1,413,692,259	
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								1,413,692,259	
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil	100 %	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	46 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,629,350	
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil	100 %	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	46 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	164,104,270	
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil	100 %	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	46 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,147,884,799	
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil	100 %	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Sertifikat	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	46 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,073,840	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								5,077,710,674	
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								5,046,253,474	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	905 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,873,839,750	
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,778,720	
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,177,230	
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,277,600	
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,120,174	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
1 06 04 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,060,000	
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								31,457,200	
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	30 %		7,457,200	
1 06 04 2.02 09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	30 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
1 06 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	30 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
1 06 04 2.02 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	30 %		6,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1 06 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Kebutuhan Dasar	30 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								1,590,793,862	
1 06 05 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar								43,953,150	
1 06 05 2.01 01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	74,42 %	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Persentase terpeliharanya anak terlantar	100 %		38,347,950	
1 06 05 2.01 02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	74,42 %	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Persentase terpeliharanya anak terlantar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,605,200	
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								1,546,840,712	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi dalam permodalan	5 %	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5000 Orang	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mutakhir	88 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,388,300	
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi dalam permodalan	5 %	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	5 Keluarga	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mutakhir	88 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	303,515,000	
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi dalam permodalan	5 %	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Keluarga	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mutakhir	88 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	678,902,752	
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi dalam permodalan	5 %	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mutakhir	88 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	440,034,660	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								403,123,330	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								218,244,410	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		127,404,060	
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		90,840,350	
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								184,878,920	
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kampung	Persentase terselenggaranya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100 %		21,589,320	
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Persentase terselenggaranya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100 %		163,289,600	
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								47,544,318	
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								47,544,318	
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam kondisi baik	100 %	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara dalam kondisi baik	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,544,318	
TOTAL									13,664,884,439	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									5,013,268,433	
2 07 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									22,381,700	
2 07 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Meningkatnya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	6,864,700	
2 07 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Meningkatnya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	15,517,000	
2 07 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3,294,941,793
2 07 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan				3,281,884,293	
2 07 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan				6,245,500	
2 07 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,812,000	
2 07 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									954,591,588
2 07 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		221,360,975	
2 07 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		126,366,713	
2 07 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13,454,700	
2 07 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		593,409,200	
2 07 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									333,231,538
2 07 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		333,231,538	
2 07 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									142,520,400
2 07 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67,520,400	
2 07 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan				75,000,000	
2 07 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									265,601,414
2 07 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit				44,701,724	
2 07 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13,560,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	207,339,690	
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								656,072,388	
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								640,730,738	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Rasio lowongan kerja dengan pencari kerja	75 % 60 % 45 % 50 % 10 poin	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	640,730,738	
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								15,341,650	
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga				15,341,650	
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								3,635,744,166	
2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota								2,979,160,326	
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	60 % 45 % 50 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang				11,605,700	
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	60 % 45 % 50 %	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang				17,555,700	
2 07 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	60 % 45 % 50 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	16 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,949,998,926	
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								107,645,156	
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1300 Orang				107,645,156	
2 07 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota								548,938,684	
2 07 04 2.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	16 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	528,939,000	
2 07 04 2.04 02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	40 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,999,684	
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								204,107,208	
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								35,122,508	
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50 % 50 %	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	110 Perusahaan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,706,968	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50 % 50 %	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,415,540	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							168,984,700		
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,513,500	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara				74,471,200	
TOTAL												9,509,192,195		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
2	08	01								5,618,566,649			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
2	08	01	2.01							14,981,777			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	13 Buah		14,981,777
2	08	01	2.02							2,597,001,348			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Jumlah Dokumen Laporan keuangan secara berkala	2 Buah		2,587,000,657
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan keuangan secara berkala	2 Buah		5,000,282
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan keuangan secara berkala	2 Buah		5,000,409
2	08	01	2.06							2,330,827,145			
Administrasi Umum Perangkat Daerah													
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang		9,138,998
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang		61,399,138
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang		90,474,866
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang		12,611,943
2	08	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang		2,503,450
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang		2,741,050
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang		2,151,957,700
2	08	01	2.07							239,557,200			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	Jumlah aset kantor (KIB. B) yang berfungsi dengan baik	221 Buah		143,590,200

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 08 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 Unit	Jumlah aset kantor (KIB. B) yang berfungsi dengan baik	221 Buah		95,967,000	
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								232,903,108	
2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	11 Ruangan		1,152,228	
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	11 Ruangan		69,448,108	
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	11 Ruangan		162,302,772	
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								203,296,071	
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	5 Buah		145,328,227	
2 08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	5 Buah		9,150,000	
2 08 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan SKPD	85 IKM A Score 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	5 Buah		48,817,844	
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								206,181,103	
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								24,981,062	
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti Persentase keluarga pelaku usaha Persentase perempuan yang terlibat di pemerintahan daerah Persentase perkawinan usia anak Prosentase anggaran yang responsive gender pada belanja langsung APBD Prosentase keterlibatan perempuan di parlemen Prosentase pelaku usaha rumahan perempuan	30 % 30 % 22 % 2,5 % 90 % 30 % 30 % 22 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Perangkat Daerah	Jumlah SDM SKPD yang terampil PPRG	45 SKPD		24,981,062	
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								9,992,410	
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Prosentase anggaran yang responsive gender pada belanja langsung APBD Prosentase keterlibatan perempuan di parlemen Prosentase pelaku usaha rumahan perempuan	30 % 30 % 22 %	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah pelaku usaha rumahan perempuan di Kabupaten Tapin	225 Orang		9,992,410	
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								171,207,631	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase anggaran yang responsive gender pada belanja langsung APBD	30 %	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	172 Orang	Jumlah hasil karya perempuan di Kecamatan yang disertakan dalam pameran	12 Kecamatan	117,884,099		
		Prosentase keterlibatan perempuan di parlemen	30 %							
		Prosentase pelaku usaha rumahan perempuan	22 %							
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase anggaran yang responsive gender pada belanja langsung APBD	30 %	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Jumlah hasil karya perempuan di Kecamatan yang disertakan dalam pameran	12 Kecamatan	53,323,532		
		Prosentase keterlibatan perempuan di parlemen	30 %							
		Prosentase pelaku usaha rumahan perempuan	22 %							
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								117,958,944	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								21,400,410	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	0,029 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak	85 Angka	21,400,410		
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	90 %							
		Persentase keluarga pelaku usaha	90 %							
		Persentase perkawinan usia anak	0,96 %							
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO	0,029 Rasio							
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								83,725,962	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO	0,029 Rasio	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	0 Orang	Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang di Tangani	100 %	67,601,727		
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO	0,029 Rasio	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Layanan	Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang di Tangani	100 %	16,124,235		
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								12,832,572	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO	0,029 Rasio	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	Persentase Data SIMEP KPAl yang dapat terpenuhi SKPD/Unit kerja terkait.	80 %	12,832,572		
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								522,392,318	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								407,002,574	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	8,74 %	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Perangkat Daerah	Jumlah Keluarga yang mendapat layanan Puspaga	500 Keluarga	110,448,646		
		Persentase keluarga pelaku usaha	0,80 %							
		Persentase perkawinan usia anak	90 %							
		Prosentase perkawinan Usia anak di Kabupaten Tapin	8,74 %							
		Prosentase keluarga yang dibina	0,80 %							
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	8,74 %	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Jumlah Keluarga yang mendapat layanan Puspaga	500 Keluarga	144,577,340		
		Persentase keluarga pelaku usaha	0,80 %							
		Persentase perkawinan usia anak	90 %							
		Prosentase perkawinan Usia anak di Kabupaten Tapin	8,74 %							
		Prosentase keluarga yang dibina	0,80 %							

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti Persentase keluarga pelaku usaha Persentase perkawinan usia anak Prosentase perkawinan Usia anak di Kabupaten Tapin Prosentase keluarga yang dibina	8,74 % 0,80 % 90 % 8,74 % 0,80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Keluarga yang mendapat layanan Puspaga	500 Keluarga		151,976,588	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								115,389,744	
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perkawinan Usia anak di Kabupaten Tapin Prosentase keluarga yang dibina	8,74 % 0,80 %	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	Jumlah keluarga yang dibina di desa model peningkatan kualitas keluarga	50 KK		115,389,744	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								122,743,390	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								122,743,390	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data SIMFONI dan SIGA yang terinput Persentase SKPD yang menggunakan Buku Data Terpilah Gender dan Anak sebagai salah satu bahan dalam Penyusunan Anggaran dan PPRG SKPD	90 % 90 %	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Prosentase Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Workshop Up Dating data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Tapin.	42 Orang		55,804,949	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data SIMFONI dan SIGA yang terinput Persentase SKPD yang menggunakan Buku Data Terpilah Gender dan Anak sebagai salah satu bahan dalam Penyusunan Anggaran dan PPRG SKPD	90 % 90 %	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Prosentase Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Workshop Up Dating data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Tapin.	42 Orang		66,938,441	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								510,814,355	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								65,153,251	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Kabupaten Layak Anak Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan Persentase keluarga pelaku usaha Persentase pelaku usaha rumahan perempuan Persentase perempuan yang terlibat di pemerintahan daerah Persentase perkawinan usia anak Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan	Madya Peringkat 50 % 50 % 50 % 50 % 8,30 % 8,30 % 7,69 % Madya Peringkat 7,69 % 1,69 %	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	73 Organisasi	Jumlah Kecamatan Layak Anak Yang dikembangkan	1 Kecamatan		59,234,360	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<p>Capaian Kabupaten Layak Anak</p> <p>Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD</p> <p>Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan</p> <p>Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA</p> <p>Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan</p> <p>Persentase keluarga pelaku usaha</p> <p>Persentase pelaku usaha rumahan perempuan</p> <p>Persentase perempuan yang terlibat di pemerintahan daerah</p> <p>Persentase perkawinan usia anak</p> <p>Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan</p> <p>Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan</p>	<p>Madya Peringkat</p> <p>50 %</p> <p>50 %</p> <p>50 %</p> <p>8,30 %</p> <p>50 %</p> <p>8,30 %</p> <p>7,69 %</p> <p>Madya Peringkat</p> <p>7,69 %</p> <p>1,69 %</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>Jumlah Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan</p>	<p>1 Kecamatan</p>	5,918,891	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						445,661,104		
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<p>Capaian Kabupaten Layak Anak</p> <p>Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan</p> <p>Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA</p> <p>Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan</p> <p>Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan</p> <p>Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan</p>	<p>Madya Peringkat</p> <p>50 %</p> <p>50 %</p> <p>8,30 %</p> <p>7,69 %</p> <p>1,69 %</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>Jumlah Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak</p>	<p>12 Kecamatan</p>	35,699,220	
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<p>Capaian Kabupaten Layak Anak</p> <p>Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan</p> <p>Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA</p> <p>Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan</p> <p>Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan</p> <p>Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan</p>	<p>Madya Peringkat</p> <p>50 %</p> <p>50 %</p> <p>8,30 %</p> <p>7,69 %</p> <p>1,69 %</p>	<p>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>Jumlah Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak</p>	<p>12 Kecamatan</p>	248,537,982	
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<p>Capaian Kabupaten Layak Anak</p> <p>Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan</p> <p>Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA</p> <p>Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan</p> <p>Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan</p> <p>Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan</p>	<p>Madya Peringkat</p> <p>50 %</p> <p>50 %</p> <p>8,30 %</p> <p>7,69 %</p> <p>1,69 %</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>Jumlah Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak</p>	<p>12 Kecamatan</p>	161,423,902	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						62,276,578		
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						16,912,541		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti Rasio Kekerasan terhadap Anak	0,7 % 90 % 0,7 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pengaduan perlindungan anak	85 Angka		16,912,541	
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								26,218,559	
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Anak	0,7 %	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Persentasi kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat dan terlapor ke dalam SIMPONI.	100 %		17,594,324	
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Anak	0,7 %	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Layanan	Persentasi kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat dan terlapor ke dalam SIMPONI.	100 %		8,624,235	
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								19,145,478	
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Anak	0,7 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentasi Data SIMEP KPAI yang dapat terpenuhi SKPD/Unit kerja terkait.	80 %		10,274,656	
2 08 07 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Anak	0,7 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentasi Data SIMEP KPAI yang dapat terpenuhi SKPD/Unit kerja terkait.	80 %		8,870,822	
TOTAL									7,160,933,337	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,040,825,099	
2 09 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								72,647,229	
2 09 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan			72,647,229	
2 09 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,486,503,848	
2 09 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %					2,446,246,848	
2 09 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %					40,257,000	
2 09 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,197,344,260	
2 09 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							7,707,400	
2 09 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							262,040,394	
2 09 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							102,779,180	
2 09 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							25,589,730	
2 09 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material							3,843,156	
2 09 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan			795,384,400	
2 09 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								112,487,552	
2 09 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							49,287,552	
2 09 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							63,200,000	
2 09 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								171,842,210	
2 09 01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							115,541,756	
2 09 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							13,200,000	
2 09 01	2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							43,100,454	
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								1,805,763,201	
2 09 03	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								453,329,367	
2 09 03	2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Ketersediaan Pangan Utama	15.553.294 kg/kapita/tahun	kg/kapita/tahun				26,650,375	
2 09 03	2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ketersediaan Pangan Utama	15.553.294 kg/kapita/tahun	kg/kapita/tahun				331,781,052	
2 09 03	2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Ketersediaan Pangan Utama	15.553.294 kg/kapita/tahun	kg/kapita/tahun				31,602,120	
2 09 03	2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	15.553.294 kg/kapita/tahun	kg/kapita/tahun				46,026,700	
2 09 03	2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	15.553.294 kg/kapita/tahun	kg/kapita/tahun				17,269,120	
2 09 03	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								781,495,841	
2 09 03	2.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota							781,495,841	
2 09 03	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								570,937,993	
2 09 03	2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun							95,833,020	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								475,104,973		
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								143,145,742		
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								53,507,200		
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama Persentase pangan yang aman dikonsumsi	15.553.294 kg/kapita/tahun 1 %	kg/kapita/tahun						53,507,200	
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								89,638,542		
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota									89,638,542	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								79,932,000		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								79,932,000		
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									79,932,000	
TOTAL												6,069,666,042			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
2	11	01								8,659,068,632		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						47,119,972		
2	11	01	2.01	01	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dibuat sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	12,818,036	
2	11	01	2.01	06	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dibuat sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	29,369,323	
2	11	01	2.01	07	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dibuat sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	4,932,613	
2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,600,184,698		
2	11	01	2.02	01	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	90 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	Tersedianya laporan keuangan tepat waktu	100 %	4,520,185,174	
2	11	01	2.02	05	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	90 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Tersedianya laporan keuangan tepat waktu	100 %	69,999,778	
2	11	01	2.02	07	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	90 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Tersedianya laporan keuangan tepat waktu	100 %	9,999,746	
2	11	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						139,105,406		
2	11	01	2.05	01	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang wajib disusun Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	0 0 100 % 90 % 100 %	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Persentase Pelayanan Kepegawaian	100 %	100,000,000	
2	11	01	2.05	02	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang wajib disusun Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	0 0 100 % 90 % 100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	65 Paket	Persentase Pelayanan Kepegawaian	100 %	14,302,440	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
2	11	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang wajib disusun Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	0 0 100 % 90 % 100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Persentase Pelayanan Kepegawaian	100 %		14,729,000	
2	11	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang wajib disusun Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	0 0 100 % 90 % 100 %	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang	Persentase Pelayanan Kepegawaian	100 %		5,258,716	
2	11	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang wajib disusun Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	0 0 100 % 90 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	260 Orang	Persentase Pelayanan Kepegawaian	100 %		4,815,250	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,275,652,302	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100% %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %		7,717,084	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100% %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %		63,677,688	
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100% %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %		138,237,624	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100% %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %		9,440,802	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
2	11	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100% %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %		5,114,070	
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100% %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %		8,339,850	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100% %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %		1,020,104,000	
2	11	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100% %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100 %		23,021,184	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							179,052,468		
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33 Unit	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan		35,083,620	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan		143,968,848	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							292,486,208		
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Persentase Pembayaran Listrik, Air dan Komunikasi Setiap Bulan	100 %		112,080,000	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Persentase Pembayaran Listrik, Air dan Komunikasi Setiap Bulan	100 %		180,406,208	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,125,467,578		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun 100 % Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik 90 % 100 % Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Persentase Kendaraan Dinas Siap Pakai	100 %	24,572,379		
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun 100 % Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik 90 % 100 % Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	Persentase Kendaraan Dinas Siap Pakai	100 %	1,462,857,751		
2	11	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun 100 % Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik 90 % 100 % Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit	Persentase Kendaraan Dinas Siap Pakai	100 %	297,445,954		
2	11	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun 100 % Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik 90 % 100 % Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	6 Unit	Persentase Kendaraan Dinas Siap Pakai	100 %	47,880,000		
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun 100 % Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik 90 % 100 % Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Persentase Kendaraan Dinas Siap Pakai	100 %	141,714,020		
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib disusun 100 % Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik 90 % 100 % Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Persentase Kendaraan Dinas Siap Pakai	100 %	150,997,474		
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						919,926,604		
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						919,926,604		
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah 1 % Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu 80 % 100 % Persentase Rekomendasi Dokumen Lingkungan yang Ditindaklanjuti 100 % 1 % Persentase Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan yang Dikendalikan Cemar Sedang status status PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Status Mutu Air	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/ Kota yang Dibuat	2 Dokumen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	873,199,079	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu Persentase Rekomendasi Dokumen Lingkungan yang Ditindaklanjuti Persentase Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan yang Dikendalikan PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Status Mutu Air	1 % 80 % 100 % 100 % 1 % Cemar Sedang status status	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/ Kota yang Dibuat	2 Dokumen	46,727,525	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							1,529,562,164	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							1,149,773,524	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati Persentase Parameter Air Permukaan yang diuji Sesuai Baku Mutu Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku Persentase Parameter Kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025 Persentase Parameter Udara yang diuji sesuai baku mutu Status Mutu Air	1 % 1 % 88 % 1 % 86 % 80 % 1 % 98,6 % Cemar Sedang status status	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	148 Dokumen	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	3 kegiatan	205,063,910	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati Persentase Parameter Air Permukaan yang diuji Sesuai Baku Mutu Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku Persentase Parameter Kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025 Persentase Parameter Udara yang diuji sesuai baku mutu Status Mutu Air	1 % 1 % 88 % 1 % 86 % 80 % 1 % 98,6 % Cemar Sedang status status	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	3 kegiatan	211,260,131	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
2	11	03	2.01	03	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati Persentase Parameter Air Permukaan yang diuji Sesuai Baku Mutu 88 % Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku 1 % 86 % 80 % 1 % 98,6 % Cemar Sedang status status Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025 Persentase Parameter Udara yang diuji sesuai baku mutu Status Mutu Air	1 % 1 % 88 % 1 % 86 % 80 % 1 % 98,6 % Cemar Sedang status status	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	3 kegiatan	733,449,483	
2	11	03	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						235,888,225		
2	11	03	2.02	01	Persentase Parameter Air Permukaan yang diuji Sesuai Baku Mutu Persentase parameter kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025 100 % 86 % 98 % 100 % 98,6 % 21 % Persentase parameter udara yang diuji sesuai baku mutu Persentase Penurunan emisi gas rumah kaca di business as usual	100 % 86 % 98 % 100 % 98,6 % 21 %	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	Jumlah laporan status kerusakan lahan/ tanah	1 laporan	235,888,225	
2	11	03	2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						143,900,415		
2	11	03	2.03	04	Persentase Parameter Air Permukaan yang diuji Sesuai Baku Mutu Persentase parameter kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025 88 % 86 % 98 % 98,6 % 21 % Persentase parameter udara yang diuji sesuai baku mutu Persentase penurunan emisi gas rumah kaca di business as usual	88 % 86 % 98 % 98,6 % 21 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	Terlaksananya pemulihan pencemaran dan/ kerusakan lingkungan hidup	2 kegiatan	87,947,550	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Persentase Parameter Air Permukaan yang diuji Sesuai Baku Mutu Persentase parameter kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025 Persentase parameter udara yang diuji sesuai baku mutu Persentase penurunan emisi gas rumah kaca di business as usual	88 % 86 % 98 % 98,6 % 21 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	Tertindakannya pemulihan pencemaran dan/ kerusakan lingkungan hidup	2 kegiatan	55,952,865	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						2,505,288,671		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						2,505,288,671		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati Persentase Luas ruang terbuka hijau (RTH) 3 kecamatan di Kabupaten Tapin Persentase Pertambahan populasi bekantan di kawasan bernilai penting	1 % 7,5 % 14 %	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Ha			2,505,288,671	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						58,588,019		
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3						22,488,127		
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase cakupan area pelayanan Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan Persentase volume sampah yang tertangani	1 % 95 % 100 % 58 %	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4 Laporan	Jumlah perusahaan yang dibina	24 Perusahaan	22,488,127	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						36,099,892		
2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	100 %	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Tertanganinya timbulan limbah B3 domestik skala kabupaten non institusi/corporate	155 UMKM	36,099,892	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						29,944,145		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						29,944,145		
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaranair Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran udara Persentase MHA yang ditetapkan haknya Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi	100 % 100 % 1 % 0 0 0 0 1 % 1 %	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Jumlah pelaku usaha berizin yang dibina	30 Perusahaan	29,944,145	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan				Target
2 11 07		PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH							131,299,867	
2 11 07	2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH							88,692,167	
2 11 07	2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya Persentase Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan peningkatan kapasitas Persentase MHA yang ditetapkan haknya	25 % 25 % 1 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	Jumlah kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya	1 kelompok	88,692,167	
2 11 07	2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH							42,607,700	
2 11 07	2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya	25 % 25 %	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	Jumlah Kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas	1 kelompok	42,607,700	
2 11 08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							52,750,418	
2 11 08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							52,750,418	
2 11 08	2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati Persentase MHA yang ditetapkan haknya Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan Status Mutu Air	82,5 % 1 % 1 % 1 % 1 %	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	1 Lembaga	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup yang dilaksanakan	2 kali	52,750,418	
2 11 09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							589,818,215	
2 11 09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							589,818,215	
2 11 09	2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang dilakukan fasilitasi dan pembinaan mendapatkan penghargaan Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu Persentase sekolah yang menjadi sekolah adiwiyata Status Mutu Air	55 % 1 % 80 % 28 % Cemar Sedang status status	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pemberian penghargaan tentang lingkungan hidup	1 laporan	589,818,215	
2 11 10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							41,068,582	
2 11 10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							41,068,582	
2 11 10	2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi	100 % 0 0 0 0 1 %	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	4 pengaduan	41,068,582	
2 11 11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							5,389,688,517	
2 11 11	2.01	Pengelolaan Sampah							5,389,688,517	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase areal publik bebas sampah Persentase cakupan area pelayanan Persentase cakupan area pelayanan Persentase jumlah desa/kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah 100 % 1 % Persentase jumlah fasilitas pengelolaan sampah (bank sampah, TPS 3R, rumah kompos) yang beroperasi aktif 66,67 % 50 % 100 % 95 % Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan 27 % 100 % 72 % Persentase sampah yang dikurangi 58 % Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu (siang hari) Persentase volume sampah yang ditangani Persentase volume sampah yang tertangani	100 % 1 % 66,67 % 50 % 100 % 95 % 27 % 100 % 72 % 58 %	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah	305 orang	11,172,000	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase areal publik bebas sampah Persentase cakupan area pelayanan Persentase cakupan area pelayanan Persentase jumlah desa/kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah 100 % 1 % Persentase jumlah fasilitas pengelolaan sampah (bank sampah, TPS 3R, rumah kompos) yang beroperasi aktif 66,67 % 50 % 100 % 95 % Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan 27 % 100 % 72 % Persentase sampah yang dikurangi 58 % Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu (siang hari) Persentase volume sampah yang ditangani Persentase volume sampah yang tertangani	100 % 1 % 66,67 % 50 % 100 % 95 % 27 % 100 % 72 % 58 %	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0 Ton	Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah	305 orang	5,016,584,533	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase areal publik bebas sampah Persentase cakupan area pelayanan Persentase cakupan area pelayanan Persentase jumlah desa/kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah 100 % 1 % Persentase jumlah fasilitas pengelolaan sampah (bank sampah, TPS 3R, rumah kompos) yang beroperasi aktif 66,67 % 50 % 100 % 95 % Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan 27 % 100 % 72 % Persentase sampah yang dikurangi 58 % Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu (siang hari) Persentase volume sampah yang ditangani Persentase volume sampah yang tertangani	100 % 1 % 66,67 % 50 % 100 % 95 % 27 % 100 % 72 % 58 %	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok	Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah	305 orang	41,892,386	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase areal publik bebas sampah Persentase cakupan area pelayanan Persentase cakupan area pelayanan Persentase jumlah desa/kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah Persentase jumlah fasilitas pengelolaan sampah (bank sampah, TPS 3R, rumah kompos) yang beroperasi aktif Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan Persentase sampah yang dikurangi Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu (siang hari) Persentase volume sampah yang ditangani Persentase volume sampah yang tertangani	100 % 1 % 66,67 % 50 % 100 % 95 % 27 % 100 % 72 % 58 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah	305 orang	172,247,238	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase areal publik bebas sampah Persentase cakupan area pelayanan Persentase cakupan area pelayanan Persentase jumlah desa/kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah Persentase jumlah fasilitas pengelolaan sampah (bank sampah, TPS 3R, rumah kompos) yang beroperasi aktif Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan Persentase sampah yang dikurangi Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu (siang hari) Persentase volume sampah yang ditangani Persentase volume sampah yang tertangani	100 % 1 % 66,67 % 50 % 100 % 95 % 27 % 100 % 72 % 58 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah	305 orang	147,792,360	
TOTAL									19,907,003,834				

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
2	12	01								6,322,804,471			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
2	12	01	2.01							28,357,232			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kategori Minimal Hasil Evaluasi SAKIP	A Score	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang di susun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	28,357,232	
2	12	01	2.02									3,298,947,680	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyerapan Anggaran	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 Orang/bulan	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan	100 %	3,295,951,880	
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyerapan Anggaran	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan	100 %	1,497,900	
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Penyerapan Anggaran	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan	100 %	1,497,900	
2	12	01	2.06									1,721,252,064	
Administrasi Umum Perangkat Daerah													
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat/keahlian sesuai dengan jabatannya Persentase Pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100 %	373,400	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat/keahlian sesuai dengan jabatannya Persentase Pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100 %	311,032,208	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat/keahlian sesuai dengan jabatannya Persentase Pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100 %	166,805,550	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat/keahlian sesuai dengan jabatannya Persentase Pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100 %	17,013,026	
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat/keahlian sesuai dengan jabatannya Persentase Pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100 %	16,638,880	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat/keahlian sesuai dengan jabatannya Persentase Pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100 %		1,209,389,000	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								638,231,858	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %		495,870,368	
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %		142,361,490	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								479,787,408	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100 %		219,515,980	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100 %		260,271,428	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								156,228,229	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset Tercatat Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Persentase Aset Terpelihara	100 %		45,953,849	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset Tercatat Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Persentase Aset Terpelihara	100 %		14,500,000	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Aset Tercatat Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Persentase Aset Terpelihara	100 %		95,774,380	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								297,700,496	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk								288,695,732	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	IKM Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	89.19 poin	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	Persentase Permohonan KTP, KIA dan Pindah datang yang diselesaikan tepat waktu	100 %		288,695,732	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk								9,004,764	
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	IKM terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	89,19 poin	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	2 Dokumen	Persentase laporan Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan PendaftaranPenduduk yang disusun tepat waktu	100 %		9,004,764	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								435,942,607	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil								435,942,607	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	IKM Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	89,17 poin	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	7 Dokumen	Persentase Permohonan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Perubahan Status Anak yang diselesaikan tepat waktu	100 %		65,426,610	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	89,17 poin	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	Persentase Permohonan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Perubahan Status Anak yang diselesaikan tepat waktu	100 %		280,625,557	
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	IKM Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	89,17 poin	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	7 Dokumen	Persentase Permohonan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Perubahan Status Anak yang diselesaikan tepat waktu	100 %		89,890,440	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								397,474,402	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								121,499,200	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Jumlah Instansi Yang Bekerjasama dalam Bidang Pelayanan Kependudukan Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	Persentase PKS/MOU/OPD/Instansi yang ditindaklanjuti dan Persentase OPD yang memanfaatkan data Kependudukan sesuai Peraturan yang berlaku	100 %		121,499,200	
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								81,819,540	
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	33,81 %	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	Persentase Persebaran Wilayah Informasi Layanan Kependudukan di Wilayah Kab. Tapin	100 %		81,819,540	
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								194,155,662	
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Akurasi Data Orang lahir, mati, pindah, dan datang Tingkat Akurasi Data Perorangan Pada Kartu Keluarga	99,45 % 95,08 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	Persentase dokumen laporan data yang disampaikan tepat waktu	100 %		194,155,662	
TOTAL													7,453,921,976	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 13 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,266,477,195	
2 13 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							7,540,812	
2 13 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	7,540,812	
2 13 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,957,369,804	
2 13 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,949,008,014	
2 13 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,892,958	
2 13 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5,468,832	
2 13 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,705,939,876	
2 13 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	50,797,290	
2 13 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	81,357,510	
2 13 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	28,513,920	
2 13 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	21,992,456	
2 13 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	4,985,200	
2 13 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	1,518,293,500	
2 13 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							275,200,421	
2 13 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 Bulan	249,971,921	
2 13 01	2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 Bulan	25,228,500	
2 13 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							227,743,626	
2 13 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Bulan	8,634,228	
2 13 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Bulan	64,993,398	
2 13 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Bulan	154,116,000	
2 13 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							92,682,656	
2 13 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Bulan	50,372,656	
2 13 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Bulan	32,160,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Bulan		10,150,000	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA								23,222,666	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa								23,222,666	
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar Persentase PKK aktif Persentase posyandu aktif Program Penataan Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	70 % 97 % 90 % 126 Desa 94 %	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	12 Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	126 Desa		23,222,666	
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								36,885,260,491	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa								36,885,260,491	
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Persentase BUMDes menghasilkan laba Persentase BUMDes yang aktif Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase PKK aktif Persentase posyandu aktif Program Peningkatan Kerjasama Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	2 % 85 % 84 % 97 % 2 % 100 Persen 85 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Jumlah terlaksananya fasilitas kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	126 Desa		36,885,260,491	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								1,183,484,587	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								1,183,484,587	
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase BUMDES yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	12 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan Aset Desa	126 Desa		45,133,023	
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase BUMDES yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	12 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan Aset Desa	126 Desa		75,888,899	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase BUMDES yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	Jumlah dokumen pengelolaan Aset Desa	126 Desa	265,260,547		
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase BUMDES yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	12 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan Aset Desa	126 Desa	256,679,274		
2 13 04 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase BUMDES yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan	Jumlah dokumen pengelolaan Aset Desa	126 Desa	49,999,959		
2 13 04 2.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase BUMDES yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	12 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan Aset Desa	126 Desa	180,799,149		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 13 04 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase BUMDES yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	Jumlah dokumen pengelolaan Aset Desa	126 Desa	24,592,428		
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase BUMDES yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	85 % 85 % 84 % 70 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan Aset Desa	126 Desa	285,131,308		
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								1,006,461,994	
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								1,006,461,994	
2 13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase PKK aktif Persentase PKK aktif Persentase posyandu aktif Persentase posyandu aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	85 % 85 Persen 97 % 74 % 74 Persen 90 % 97 % 97 Persen 90 % 90 Persen 100 % 100 Persen 85 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	126 Desa	232,364,756		
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase PKK aktif Persentase PKK aktif Persentase posyandu aktif Persentase posyandu aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	85 % 85 Persen 97 % 74 % 74 Persen 90 % 97 % 97 Persen 90 % 90 Persen 100 % 100 Persen 85 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	126 Lembaga	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	126 Desa	363,150,380		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase PKK aktif Persentase PKK aktif Persentase posyandu aktif Persentase posyandu aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	85 % 85 Persen 85 Persen 97 % 74 % 74 Persen 90 % 97 % 97 Persen 90 % 90 Persen 100 % 100 Persen 85 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 Dokumen	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	126 Desa	187,250,838	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang aktif Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase Bumdes yang menghasilkan laba Persentase PKK aktif Persentase PKK aktif Persentase posyandu aktif Persentase posyandu aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	85 % 85 Persen 85 Persen 97 % 74 % 74 Persen 90 % 97 % 97 Persen 90 % 90 Persen 100 % 100 Persen 85 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Laporan	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	126 Desa	223,696,020	
TOTAL									44,364,906,933				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 14 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6,170,454,083	
2 14 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4,999,988	
2 14 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	Persentase Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun n+1 yang di akomodir dalam dokumen Perencanaan	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,999,988
2 14 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,133,947,778	
2 14 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	Persentase Laporan Keuangan dan Semesteran yang di tindak lanjuti dan sesuai standar	100 %		3,129,048,106
2 14 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase Laporan Keuangan dan Semesteran yang di tindak lanjuti dan sesuai standar	100 %		2,449,836
2 14 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase Laporan Keuangan dan Semesteran yang di tindak lanjuti dan sesuai standar	100 %		2,449,836
2 14 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							2,258,580,029	
2 14 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100 %		4,136,400
2 14 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,667,511
2 14 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100 %		62,912,148
2 14 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100 %		19,230,030
2 14 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100 %		4,014,090

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100 %		8,214,250	
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,080,405,600	
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							292,734,464		
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Persentase Sarana dan Prasarana yang di manfaatkan SKPD	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,296,164	
2	14	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Persentase Sarana dan Prasarana yang di manfaatkan SKPD	100 %		36,053,300	
2	14	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Persentase Sarana dan Prasarana yang di manfaatkan SKPD	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,385,000	
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							265,772,096		
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan tepat waktu	100 %		1,526,328	
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan tepat waktu	100 %		71,895,288	
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan tepat waktu	100 %		192,350,480	
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							214,419,728		
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142,286,748	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 14 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %		5,100,000	
2 14 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja > 90% Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Realisasi anggaran 100%	90 % 90 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,032,980	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								421,197,225	
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								226,568,562	
2 14 02 2.01 03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	85 % 50 %	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam program KKBPK	70 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	207,224,247	
2 14 02 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	85 % 50 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	6 Satuan Pendidikan	Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam program KKBPK	70 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,490,479	
2 14 02 2.01 12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	85 % 50 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	2 Organisasi	Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam program KKBPK	70 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,853,836	
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								194,628,663	
2 14 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	85 % 50 %	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	Persentase stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,663,789	
2 14 02 2.02 08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	85 % 50 %	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	6 Unit	Persentase stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,399,877	
2 14 02 2.02 10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	85 % 50 %	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen	Persentase stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,687,665	
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	85 % 50 %	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	Persentase stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,581,809	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	85 % 50 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	12 Laporan	Persentase stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,295,523	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								744,478,936	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								161,610,694	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 Tahun) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	24 Organisasi	Persentase Akseptor KB yang dibina	85 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158,702,176	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 Tahun) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	Persentase Akseptor KB yang dibina	85 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,908,518	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								13,210,353	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 Tahun) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	24 Organisasi	Persentase petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan KKBPK	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,210,353	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								492,437,663	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 Tahun) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Laporan	Persentase Alat, Obat dan Kontrasepsi (Alokon) yang didistribusikan ke Sasaran tepat Waktu	85 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,556,962	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 Tahun) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	500 Orang	Persentase Alat, Obat dan Kontrasepsi (Alokon) yang didistribusikan ke Sasaran tepat Waktu	85 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,911,653	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 Tahun) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	Persentase Alat, Obat dan Kontrasepsi (Alokon) yang didistribusikan ke Sasaran tepat Waktu	85 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,613,904	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 Tahun) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	Persentase Alat, Obat dan Kontrasepsi (Alokon) yang didistribusikan ke Sasaran tepat Waktu	85 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,039,996	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 Tahun) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 Laporan	Persentase Alat, Obat dan Kontrasepsi (Alokon) yang didistribusikan ke Sasaran tepat Waktu	85 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,315,148	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								77,220,226	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerjanya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 Tahun) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerjanya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	46 Organisasi	Persentase alat Kontrasepsi yang terpasang	80 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,676,697	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 Tahun) Persentase Peserta KB Aktif MKJP	2,07 Rata-rata anak per Wanita 15 %	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	24 Kampung	Persentase alat Kontrasepsi yang terpasang	80 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,543,529	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								1,184,954,844	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								869,952,404	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	600 Orang	Persentase Kelompok BKB yang terbina	72 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,651,730	
2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	152 Orang	Persentase Kelompok BKB yang terbina	72 %		343,157,364	
2 14 04 2.01 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	16 Laporan	Persentase Kelompok BKB yang terbina	72 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	248,361,380	
2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	11 Laporan	Persentase Kelompok BKB yang terbina	72 %		104,136,260	
2 14 04 2.01 09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	12 Dokumen	Persentase Kelompok BKB yang terbina	72 %		33,645,670	
2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								315,002,440	
2 14 04 2.02 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	Persentase Kelompok UPPKA yang terbina	70 %		59,143,712	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi	Persentase Kelompok UPPKA yang terbina	70 %		9,291,241	
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	71,12 % 84,07 % 73,66 % 92,19 % 92,80 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	Persentase Kelompok UPPKA yang terbina	70 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	246,567,487	
TOTAL										8,521,085,088				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 15 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,310,925,009	
2 15 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							46,512,740	
2 15 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1	1 1	46,512,740	
2 15 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,163,968,795	
2 15 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		1 1	3,097,461,495	
2 15 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	1	1 1	3,499,300	
2 15 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1	1 1	63,008,000	
2 15 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							719,017,537	
2 15 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1 1	12,049,164	
2 15 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1 1	31,707,828	
2 15 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1 1	73,448,141	
2 15 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1	1 1	23,422,904	
2 15 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1	1 1	578,389,500	
2 15 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							209,050,000	
2 15 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1	1 1	143,200,000	
2 15 01	2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1	1 1	24,850,000	
2 15 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1	1 1	41,000,000	
2 15 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							172,375,937	
2 15 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	1	1 1	142,191,937	
2 15 01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1	1 1	30,184,000	
2 15 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							5,462,563,162	
2 15 02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							55,418,760	
2 15 02	2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase angkutan umum yang memiliki izin trayek Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar Persentase penurunan rasio kecelakaan lalu-lintas darat terhadap jumlah kendaraan bermotor	100 % 100 % 85 %	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	1	1 1	22,322,760	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Persentase angkutan umum yang memiliki izin trayek Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar Persentase penurunan rasio kecelakaan lalu-lintas darat terhadap jumlah kendaraan bermotor	100 % 100 % 85 %	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	1	1 1		33,096,000	
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								89,974,440	
2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	12 Bulan	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	1	1 1		89,974,440	
2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								339,692,600	
2 15 02 2.04 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	12 Bulan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	1	1 1		106,843,700	
2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	12 Bulan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1	1 1		232,848,900	
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								4,038,298,014	
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Bulan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit	1	1 1		3,879,420,000	
2 15 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Bulan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang	1	1 1		55,000,000	
2 15 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1 Unit	1	1 1		103,878,014	
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								542,372,218	
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1	1 1		10,886,920	
2 15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Unit	1	1 1		279,155,408	
2 15 02 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1	1 1		16,790,710	
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	1	1 1		192,000,000	
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	1	1 1		43,539,180	
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								81,743,250	
2 15 02 2.07 02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	1	1 1		41,031,750	
2 15 02 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Laporan	1	1 1		40,711,500	
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								115,150,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	12 Bulan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5 Laporan	1	1		115,150,000	
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							199,913,880		
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	1	1		199,913,880	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							1,064,588,136		
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal							135,174,220		
2	15	03	2.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar	100 %	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Dokumen	1	1		135,174,220	
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau							929,413,916		
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Bulan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	1	1		45,300,916	
2	15	03	2.13	06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Bulan	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	3 Unit	1	1		884,113,000	
TOTAL												10,838,076,307		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 16 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,854,165,323	
2 16 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							73,578,680	
2 16 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disampaikan tepat Waktu	10 Dokumen	73,578,680	
2 16 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,483,153,816	
2 16 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan Tepat Waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3,427,579,166	
2 16 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan Tepat Waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	23,301,560	
2 16 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan Tepat Waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	32,273,090	
2 16 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,225,643,557	
2 16 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN	36 Orang	31,934,577	
2 16 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN	36 Orang	178,499,230	
2 16 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN	36 Orang	38,723,700	
2 16 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN	36 Orang	8,003,050	
2 16 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN	36 Orang	968,483,000	
2 16 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							491,857,064	
2 16 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	491,857,064
2 16 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							399,275,711	
2 16 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	281,043,071
2 16 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		118,232,640
2 16 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							180,656,495	
2 16 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		63,992,626
2 16 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		16,000,000
2 16 01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100,663,869
2 16 02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							1,599,980,550	
2 16 02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1,599,980,550	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %		80,755,450	
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %		51,708,000	
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %		29,570,000	
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI	100 %	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %		1,405,148,880	
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI	100 %	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	2 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %		32,798,220	
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								2,606,551,172	
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								1,416,397,448	
2 16 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin	100 %	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	619,640,000	
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin	100 %	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	796,757,448	
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								1,190,153,724	
2 16 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan EGovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	738,173,084	
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin	100 %	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan EGovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		226,800,000	
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan EGovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158,721,770	
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan EGovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		66,458,870	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								95,627,800	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								95,627,800	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Persentase Layanan Data Statistik Sektor yang disajikan	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	4 Dokumen	Jumlah Buku Statistik Sektor, KDA, PDRB, Ekonomi Makro Yang dicetak	150 Buah		95,627,800	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								100,518,197	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								100,518,197	
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Layanan Pengamanan Informasi dan Persandian	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100,518,197	
TOTAL									10,256,843,042	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.18.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2 18 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,850,204,665	
2 18 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								35,493,558	
2 18 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Predikat nilai evaluasi SAKIP	70 Poin	35,493,558		
2 18 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,952,739,127	
2 18 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	Persentase penyerapan anggaran SKPD	100 %	2,921,439,485	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2 18 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Persentase penyerapan anggaran SKPD	100 %	31,299,642		
2 18 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,210,204,453	
2 18 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	185,722,884		
2 18 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	102,764,800		
2 18 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	14,399,883		
2 18 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	36,481,886		
2 18 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	870,835,000		
2 18 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,036,441,572	
2 18 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	160 Unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100 %	798,962,052	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2 18 01	2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100 %	237,479,520		
2 18 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								272,569,024	
2 18 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD	100 %	161,597,024	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2 18 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD	100 %	110,972,000	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2 18 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								342,756,931	
2 18 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Persentase aset yang tercatat	100 %	96,926,931		
2 18 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	Persentase aset yang tercatat	100 %	16,550,000	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2 18 01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase aset yang tercatat	100 %	229,280,000		
2 18 02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								393,625,521	
2 18 02	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								294,166,595	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Nilai Investasi Persentase dokumen RUPM yang tersedia Persentase rekomendasi PM (investor baru) Pertumbuhan Penanaman Modal	541 Rp Milyar 541 Rp Milyar 100 % 541 Rp Milyar	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Persentase Kegiatan Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha	100 %		288,671,545	
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Nilai Investasi Persentase dokumen RUPM yang tersedia Persentase rekomendasi PM (investor baru) Pertumbuhan Penanaman Modal	541 Rp Milyar 541 Rp Milyar 100 % 541 Rp Milyar	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kegiatan Usaha	Persentase Kegiatan Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha	100 %		5,495,050	
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								99,458,926	
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Nilai Investasi	541 Rp Milyar	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapin	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,458,926	
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								92,425,140	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								92,425,140	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Investasi Persentase jenis investasi/promosi yang dipublikasikan Persentase stakeholder yang menggunakan informasi/promosi investasi yang dipublikasikan	541 Rp Milyar 541 Rp Milyar 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase Peluang Penanaman Modal yang Dipromosikan	100 %		92,425,140	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								742,944,046	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								742,944,046	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan Persentase investasi yang lolos izin lingkungan Persentase izin yang update Persentase Pelaku Usaha yang berizin Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu Persentase perizinan yang diterbitkan Persentase terlaksananya SOP Pelayanan	85,5 Poin 100 % 100 % 100 % 100 % 85,5 Poin 100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	600 Pelaku Usaha	Persentase Perizinan yang Diterbitkan	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	271,199,910	
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan Persentase investasi yang lolos izin lingkungan Persentase izin yang update Persentase Pelaku Usaha yang berizin Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu Persentase perizinan yang diterbitkan Persentase terlaksananya SOP Pelayanan	85,5 Poin 100 % 100 % 100 % 100 % 85,5 Poin 100 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	0 Kegiatan Usaha 50 Kegiatan Usaha	Persentase Perizinan yang Diterbitkan	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	362,229,525	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.18.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan Persentase investasi yang lolos izin lingkungan Persentase izin yang update Persentase Pelaku Usaha yang berizin Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu Persentase perizinan yang diterbitkan Persentase terlaksananya SOP Pelayanan	85,5 Poin 100 % 100 % 100 % 100 % 85,5 Poin 100 %	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 Orang	Persentase Perizinan yang Diterbitkan	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109,514,611	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								51,048,475	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								51,048,475	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Persentase pelaku usaha yang memiliki izin Persentase Perumbuhan Investasi Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu Persentase Rasio angka kerja yang terserap terhadap nilai investasi	541 Rp Milyar 3 % 3 % 0,00000027 % 0,00000027 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Kegiatan Usaha.	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	100 %		856,750	
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Persentase pelaku usaha yang memiliki izin Persentase Perumbuhan Investasi Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu Persentase Rasio angka kerja yang terserap terhadap nilai investasi	541 Rp Milyar 3 % 3 % 0,00000027 % 0,00000027 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	100 %		49,334,975	
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Persentase pelaku usaha yang memiliki izin Persentase Perumbuhan Investasi Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu Persentase Rasio angka kerja yang terserap terhadap nilai investasi	541 Rp Milyar 3 % 3 % 0,00000027 % 0,00000027 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	10 Kegiatan Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	100 %		856,750	
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								39,359,160	
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								39,359,160	
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang update Persentase perizinan yang diterbitkan Persentase terlaksananya SOP Pelayanan	100 % 100 % 1 %	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	Peningkatan Pelayanan Informasi Pendukung Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	100 %		39,359,160	
TOTAL									7,169,607,007	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2 19 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,370,783,347	
2 19 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								14,469,504	
2 19 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14,469,504		
2 19 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,930,925,452	
2 19 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	2,919,375,830		
2 19 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	6,324,738		
2 19 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	5,224,884		
2 19 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,107,525,631	
2 19 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1 1	59,419,548		
2 19 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1 1	101,306,990	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2 19 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1	1 1	8,895,393		
2 19 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1	1 1	22,974,000		
2 19 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1	1 1	914,929,700	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2 19 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								128,165,628	
2 19 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1	1 1	70,260,582		
2 19 01	2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1	1 1	57,905,046		
2 19 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								865,517,676	
2 19 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1	1 1	6,868,476		
2 19 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1	1 1	203,550,000		
2 19 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1	1 1	655,099,200	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2 19 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								324,179,456	
2 19 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1	1 1	78,780,456		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1	1 1		39,480,000		
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	1 1		205,919,000		
2 19 02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								2,480,429,624	
2 19 02 2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								1,224,966,403	
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 % 100 %	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	12 Orang	1	1 1		25,939,514		
2 19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 % 100 %	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	12 Orang	1	1 1		60,052,215		
2 19 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 % 100 %	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	40 Orang	1	1 1		28,324,044		
2 19 02 2.01 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 % 100 %	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	12 Orang	1	1 1		131,248,000		
2 19 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 % 100 %	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	50 Orang	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,927,310		
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 % 100 %	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	53 Orang	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	926,475,320		
2 19 02 2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,255,463,221	
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	12 Dokumen	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,255,463,221		
2 19 03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								12,651,925,607	
2 19 03 2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								2,075,869,470	
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	27 cabor 18 cabor 1 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 Unit	1	1 1		2,075,869,470		
2 19 03 2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,060,161,054	
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1	1 1		801,335,834		
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	200 Orang	1	1 1		258,825,220		
2 19 03 2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								961,128,830	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 Orang	1	1 1		80,523,844	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	200 Orang	1	1 1		880,604,986	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							1,567,865,394		
2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	12 Dokumen	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,567,865,394	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							6,986,900,859		
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	12 Dokumen	1	1 1		911,642,580	
2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	12 Laporan	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,159,600,000	
2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	12 Dokumen	1	1 1		463,925,050	
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	12 Dokumen	1	1 1		451,733,229	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							1,041,754,948		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							1,041,754,948		
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 %	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100 %	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	1	1 1		41,754,948	
TOTAL												21,544,893,526		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
2	22	01												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									5,051,845,372					
2	22	01	2.01							10,335,650				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
2	22	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	1	1	1	10,335,650	
2	22	01	2.02										3,232,460,358	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 Orang/bulan		1	1	3,223,864,558	
2	22	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	1	1	4,297,900	
2	22	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1	1	1	4,297,900	
2	22	01	2.06										1,386,969,177	
Administrasi Umum Perangkat Daerah														
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks kepuasan pelayanan ASN Disudpar	4.3 Score	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	6,995,336	
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks kepuasan pelayanan ASN Disudpar	4.3 Score	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1	1	1	164,317,707	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks kepuasan pelayanan ASN Disudpar	4.3 Score	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1	1	1	85,753,548	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks kepuasan pelayanan ASN Disudpar	4.3 Score	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	1	1	1	18,049,406	
2	22	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Indeks kepuasan pelayanan ASN Disudpar	4.3 Score	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	4,029,180	
2	22	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks kepuasan pelayanan ASN Disudpar	4.3 Score	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	1	1	1	5,665,000	
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks kepuasan pelayanan ASN Disudpar	4.3 Score	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	1	1	1	1,102,159,000	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	01	2.07										93,072,134	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
2	22	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1	1	1	82,274,534	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1	1	1	10,797,600	
2	22	01	2.08										251,671,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Penunjang yang tersedia	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1	1	1	94,555,000	
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang yang tersedia	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1	1	1	157,116,000	
2	22	01	2.09										77,337,053	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1	1	1	29,526,973	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	1	1	1	12,600,000	
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	1	1	35,210,080	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								975,393,936	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								65,086,548	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif	100 % 100 % 80 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	1	1	1	48,047,142	
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif	100 % 100 % 80 %	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25 Orang	1	1	1	17,039,406	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								583,495,380	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase Sanggar/Seni Budaya yang mengikuti event seni dan budaya	40 %	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	1	1	1	127,543,500	
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase Sanggar/Seni Budaya yang mengikuti event seni dan budaya	40 %	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	1	1	1	387,748,500	
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Persentase Sanggar/Seni Budaya yang mengikuti event seni dan budaya	40 %	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Sertifikat	1	1	1	68,203,380	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								326,812,008	
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Persentase Pemangku Adat Dayak yang Aktif	80 %	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	1	1	1	326,812,008	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional								523,286,080	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								523,286,080	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina	80 % 80 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	1	1	1	103,887,060	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina	80 % 80 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	1	1	1	303,883,100	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina	80 % 80 %	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	1	1	1	115,515,920	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								192,791,636	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								22,556,436	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik	100 %	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	1	1	1	22,556,436	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								170,235,200	
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara	100 %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	27 Objek	1	1	1	170,235,200	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								130,073,892	
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota								130,073,892	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 22 06 2.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,073,892	
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								839,703,524	
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								14,640,940	
3 26 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang terpenuhi	30 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	1 1		14,640,940	
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								397,397,584	
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang terpelihara dengan baik	75 %	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Unit	1	1 1		354,626,044	
3 26 02 2.02 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang terpelihara dengan baik	75 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1	1 1		42,771,540	
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								355,100,000	
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang terpenuhi	30 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	10 Unit	1	1 1		355,100,000	
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota								72,565,000	
3 26 02 2.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	30 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,565,000	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								875,609,082	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								875,609,082	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,502,910	
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	539,141,678	
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,800,000	
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah	100 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,164,494	
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								60,398,534	
3 26 04 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif								60,398,534	
3 26 04 2.02 09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pokdarwis yang mengikuti pelatihan/bimtek kepariwisataan	80 %	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1	1 1		60,398,534	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								703,659,138	
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								677,615,318	
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50 Orang	1	1 1		103,310,152	
3 26 05 2.01 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	50 Orang	1	1 1		58,522,450	
3 26 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1	1 1		515,782,716	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif										26,043,820	
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku usaha yang mengikuti pelatihan/bimtek usaha pariwisata	80 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	1		1 1		26,043,820		
TOTAL												9,352,761,194				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
2	23	01								3,088,316,225			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
2	23	01	2.01							19,011,360			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang wajib dibuat	100 %		19,011,360
2	23	01	2.02										3,066,121,743
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	Persentase penyelesaian dokumen keuangan yang wajib dibuat	100 %		3,046,871,853
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase penyelesaian dokumen keuangan yang wajib dibuat	100 %		884,940
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase penyelesaian dokumen keuangan yang wajib dibuat	100 %		18,364,950
2	23	01	2.06										909,237,087
Administrasi Umum Perangkat Daerah													
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SKPD	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,265,226
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SKPD	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,937,201
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SKPD	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,307,437
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SKPD	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,968,833
2	23	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SKPD	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,886,390
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SKPD	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,708,000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SKPD	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	703,164,000
2	23	01	2.07										642,759,264
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	136,641,410
2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	73 Unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	506,117,854
2	23	01	2.08										367,683,581
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %		2,244,600
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %		182,759,804

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	182,679,177	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							83,503,190		
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,628,190	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	80 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 10 Unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,875,000	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							765,814,608		
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							612,891,612		
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan Persentase Pemustaka (pengunjung perpustakaan)	76 Poin 12,83 %	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan	Persentase peningkatan perpustakaan yang aktif sesuai NSP	25 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,566,252	
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan Persentase Pemustaka (pengunjung perpustakaan)	76 Poin 12,83 %	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	204 Orang	Persentase peningkatan perpustakaan yang aktif sesuai NSP	25 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,236,120	
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan Persentase Pemustaka (pengunjung perpustakaan)	76 Poin 12,83 %	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	13 Layanan	Persentase peningkatan perpustakaan yang aktif sesuai NSP	25 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	266,881,400	
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan Persentase Pemustaka (pengunjung perpustakaan)	76 Poin 12,83 %	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	900 Eksemplar	Persentase peningkatan perpustakaan yang aktif sesuai NSP	25 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156,155,000	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan Persentase Pemustaka (pengunjung perpustakaan)	76 Poin 12,83 %	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	900 Eksemplar	Persentase peningkatan perpustakaan yang aktif sesuai NSP	25 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,626,440	
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan Persentase Pemustaka (pengunjung perpustakaan)	76 Poin 12,83 %	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase peningkatan perpustakaan yang aktif sesuai NSP	25 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,426,400	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							152,922,996		
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan Persentase Pemustaka (pengunjung perpustakaan)	76 Poin 12,83 %	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2 Lokus	Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka	5.97 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,086,996	
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan Persentase Pemustaka (pengunjung perpustakaan)	76 Poin 12,83 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	215 Orang	Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka	5.97 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,836,000	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							374,828,184		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							244,700,418		
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK	3,85 %	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1150 Berkas	Persentase SKPD dan Unit kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK	60 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158,871,268	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK	3,85 %	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	589 Berkas	Persentase SKPD dan Unit kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK	60 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,844,000	
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK	3,85 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	Persentase SKPD dan Unit kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK	60 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,985,150	
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							130,127,766		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK	3,85 %	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	Persentase SKPD dan Unit kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK	60 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,127,766	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							84,609,394		
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun							84,609,394		
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK	3,85 %	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	420 Arsip	Persentase SKPD dan Unit kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK	60 %		84,609,394	
TOTAL												6,313,568,411		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 25 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6,894,392,796	
3 25 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							67,586,760	
3 25 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1	1 1	67,586,760	
3 25 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,065,612,301	
3 25 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		1 1	4,000,364,571	
3 25 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	waktu penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	1	1 1	28,302,160	
3 25 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	waktu penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1	1 1	36,945,570	
3 25 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,093,426,017	
3 25 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1	1 1	25,319,040	
3 25 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1	1 1	139,853,967	
3 25 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1	1 1	319,459,470	
3 25 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1	1 1	9,046,440	
3 25 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Waktu penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	1	1 1	2,254,350	
3 25 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1	1 1	4,248,750	
3 25 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1	1 1	593,244,000	
3 25 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							428,451,852	
3 25 01	2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bulan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	238,487,400
3 25 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bulan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	1	1 1		189,964,452
3 25 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							313,776,400	
3 25 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1	1 1		170,476,400
3 25 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1	1 1		143,300,000
3 25 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							925,539,466	
3 25 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor dan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	1	1 1		274,564,278
3 25 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor dan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	1	1 1		52,185,188

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor dan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	1	1	1	598,790,000	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								242,694,302	
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								195,188,220	
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap Presentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas	100 % 100 % 100 %	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	1	1	1	135,588,225	
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap Presentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	12 Unit	1	1	1	59,599,995	
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								47,506,082	
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Waktu pemanfaatan sumberdaya perairan (bulan)	12 Bulan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	12 Orang	1	1	1	47,506,082	
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								1,779,471,801	
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								22,730,000	
3 25 04 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap	100 % 100 %	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	12 Kelompok	1	1	1	22,730,000	
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								1,756,741,801	
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	12 Bulan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,332,796,142	
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	12 Bulan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit	1	1	1	404,889,683	
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	12 Bulan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	12 Dokumen	1	1	1	19,055,976	
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								156,634,988	
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota								156,634,988	
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap Presentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1	1	1	156,634,988	
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								478,400,521	
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil								54,395,010	
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu pengolahan informasi data atas hasil perikanan (Bulan)	12 Bulan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	12 Dokumen	1	1	1	54,395,010	
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								5,783,834	
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	jumlah waktu Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	12 Bulan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	12 Unit Usaha	1	1	1	5,783,834	
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								418,221,677	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	12 Bulan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Ton				408,807,299	
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	12 Bulan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 Pelaku Usaha				9,414,378	
TOTAL												9,551,594,408		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						16,867,266,290			
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						82,802,340			
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	82,802,340	
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13,216,676,499			
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/bulan	Persentase Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	13,115,877,399	
3	27	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Persentase Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	39,600,000	
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Persentase Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	61,199,100	
3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2,247,230,417			
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	112,551,543	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	240,665,874	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	53,874,000	
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	37,392,000	
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	10,837,500	
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,791,909,500	
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							110,940,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	33,540,000	
3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	77,400,000	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							618,508,832	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	291,908,832	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	326,600,000	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							591,108,202	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	111 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	413,608,202	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	29,500,000		
3 27 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Persentase Aset yang tercatat Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Persentase penyerapan Anggaran SKPD Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85 Poin 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	148,000,000		
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								4,468,692,440	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								3,402,000,000	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Angka konsumsi daging per kapita Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	4 kg/kapita 24,30 %	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 Laporan	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	12 Bulan	2,700,000,000		
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Angka konsumsi daging per kapita Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	4 kg/kapita 24,30 %	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	12 Bulan	702,000,000		
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota								21,600,000	
3 27 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Produksi Daging (Ton) Jumlah Produksi Telur (Ton) Persentase Peningkatan Produksi Daging (%) Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)	4.737 Ton 6.945 Ton 0,34 % 2,69 %	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	21,600,000		
3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota								1,045,092,440	
3 27 02 2.05 01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Produksi Daging (Ton) Jumlah Produksi Telur (Ton) Persentase Peningkatan Produksi Daging (%) Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)	4.737 Ton 6.945 Ton 0,34 % 2,69 %	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	1700 Ekor	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	1,019,676,440		
3 27 02 2.05 04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Produksi Daging (Ton) Jumlah Produksi Telur (Ton) Persentase Peningkatan Produksi Daging (%) Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)	4.737 Ton 6.945 Ton 0,34 % 2,69 %	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	75000 Ton	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	18,000,000		
3 27 02 2.05 06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Produksi Daging (Ton) Jumlah Produksi Telur (Ton) Persentase Peningkatan Produksi Daging (%) Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)	4.737 Ton 6.945 Ton 0,34 % 2,69 %	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	7,416,000		
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								8,340,400,000	
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian								39,600,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan								
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target											
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Angka konsumsi daging per kapita Jumlah luas lahan fungsional Luas Panen Bawang Merah Luas Panen Cabe Rawit Hiyung Luas Panen Jagung Luas Panen Jeruk Luas Panen Kedelai Luas Panen Padi Persentase Kelas Kelompok Tani Madya Persentase lahan sawah fungsional yang terairi Persentase penyakit hewan yang tertangani Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis Populasi kambing Populasi sapi Populasi unggas Produktivitas Bawang Merah Produktivitas Cabe Rawit Produktivitas Jagung Produktivitas Jeruk Produktivitas Kedelai	4 kg/kapita 63163 Ha 160 Ha 114 Ha 2003 Ha 488 Ha 124 Ha 83746 Ha 25 % 15 % 100 % 75 % 4920 ekor 7495 ekor 2364135 ekor 8 Ku/Ha 9 Ku/Ha 51 Ku/Ha 1 Ku/Ha 10 Ku/Ha	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1	1	1	39,600,000					
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian											8,300,800,000		
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah luas lahan fungsional yang ditanami (Ha)	63163 Ha	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	5 Unit	1	1	1				21,600,000		
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah luas lahan fungsional yang ditanami (Ha)	63163 Ha	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	30 Unit	1	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8,200,000,000		
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah luas lahan fungsional yang ditanami (Ha)	63163 Ha	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	1	1	1				79,200,000		
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER											667,919,000		
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota												66,000,000	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Angka konsumsi daging per kapita Persentase penyakit hewan yang tertangani Populasi kambing Populasi sapi Populasi unggas	4 kg/kapita 100 % 4920 ekor 7495 ekor 2364135 ekor	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	1	1	1				66,000,000		
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota												5,956,500	
3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1	1	1				5,956,500		
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota												24,000,000	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Waktu Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1	1	1				24,000,000		
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner												571,962,500	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Waktu Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 Bulan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1	1	1				571,962,500		
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN												126,000,000	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota												126,000,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
3	27	05	2.01	01	Jumlah kemitraan pemasaran hasil hortikultura Luas Panen Jagung Luas Panen Kedelai Luas Panen Padi Luas Tanaman Karet Luas Tanaman Sawit Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan Persentase Kelas Kelompok Tani Madya Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hortikultura Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis Produktivitas Jagung Produktivitas Kedelai Produktivitas Padi Produktivitas Tanaman Karet Produktivitas Tanaman Sawit	1 % 2003 Ha 124 Ha 83746 Ha 15890 Ha 3646 Ha 3 % 25 % 18 % 75 % 51 Ku/Ha 10 Ku/Ha 52 Ku/Ha 691 Ku/Ha 3646 Ku/Ha	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	47.5 Ha	1	1 1	126,000,000	
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					43,200,000		
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					43,200,000		
3	27	06	2.01	03	Luas Tanaman Karet Luas Tanaman Sawit Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan Produktivitas Tanaman Karet Produktivitas Tanaman Sawit	15890 Ha 3646 Ha 3 % 691 Ku/Ha 3646 Ku/Ha	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	1	1 1	43,200,000	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					491,500,000		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					491,500,000		
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Persentase Kelas Kelompok Tani Madya Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis	25 % 75 %	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1	1 1	426,500,000	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Persentase Kelas Kelompok Tani Madya Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis	25 % 75 %	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	1	1 1	39,600,000	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Persentase Kelas Kelompok Tani Madya Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis	25 % 75 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	23 Unit	1	1 1	22,400,000	
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani Persentase Kelas Kelompok Tani Madya Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis	25 % 75 %	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1 Unit	1	1 1	3,000,000	
TOTAL									31,004,977,730			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									5,184,065,009	
3 30 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									11,213,210	
3 30 01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian ASN Persentase Penyerapan Anggaran	A Nilai 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	11,213,210	
3 30 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3,720,108,115
3 30 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan			3,709,819,639	
3 30 01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			3,988,520	
3 30 01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan			6,299,956	
3 30 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									680,336,864
3 30 01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			17,995,232	
3 30 01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			67,998,618	
3 30 01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket			10,000,000	
3 30 01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			91,849,074	
3 30 01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			21,562,798	
3 30 01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			6,300,642	
3 30 01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan			6,798,000	
3 30 01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			457,832,500	
3 30 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									164,807,264
3 30 01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			138,436,764	
3 30 01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit			26,370,500	
3 30 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									360,733,540
3 30 01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			135,038,740	
3 30 01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			225,694,800	
3 30 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									246,866,016
3 30 01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit			86,346,284	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit				32,500,000	
3	30	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit				6,657,900	
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit				121,361,832	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								49,407,304	
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan								49,407,304	
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen		49,407,304	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								3,037,563,876	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								2,886,308,074	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah Persentase informasi harga Barang Pokok dan Penting yang akurat Persentase pasar tradisional yang dibangun Persentase pasar tradisional yang direvitalisasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	100 % 100 % 100 % 95 % 79 poin	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 unit		768,707,285	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah Persentase informasi harga Barang Pokok dan Penting yang akurat Persentase pasar tradisional yang dibangun Persentase pasar tradisional yang direvitalisasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	100 % 100 % 100 % 95 % 79 poin	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 unit		2,117,600,789	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								151,255,802	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen				151,255,802	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								76,415,582	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								61,415,630	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah Persentase Informasi Harga Barang Pokok dan Penting yang Akurat Persentase pasar tradisional yang dibangun Persentase pasar tradisional yang direvitalisasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	100 % 100 % 100 % 90 % 79 poin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan		46,442,830	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah Persentase Informasi Harga Barang Pokok dan Penting yang Akurat Persentase pasar tradisional yang dibangun Persentase pasar tradisional yang direvitalisasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	100 % 100 % 100 % 90 % 79 poin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan		14,972,800	
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								14,999,952	
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan				14,999,952	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								173,105,215	
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								173,105,215	
3 30 05 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipasarkan Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30 pelaku usaha		26,590,984	
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipasarkan Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30 pelaku usaha		89,987,091	
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipasarkan Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30 pelaku usaha		56,527,140	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								224,966,294	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								224,966,294	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI	100 % 95 %	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500 Unit	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500 unit		199,997,831	
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang Tidak Sesuai SNI	100 % 95 %	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	400 Orang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500 unit		24,968,463	
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								305,939,920	
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								305,939,920	
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipasarkan	100 %	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 umkm		305,939,920	
TOTAL									9,051,463,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2 17 03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								17,070,900	
2 17 03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								17,070,900	
2 17 03	2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	87.59 % 70 %	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 unit usaha	17,070,900		
2 17 05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								20,387,694	
2 17 05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								20,387,694	
2 17 05	2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	87.59 % 70 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20 Orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20 orang	20,387,694		
2 17 06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								51,866,250	
2 17 06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								51,866,250	
2 17 06	2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	87.59 % 70 %	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	20 orang	51,866,250		
2 17 08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								75,426,311	
2 17 08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								75,426,311	
2 17 08	2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Mikro Persentase UMKM Yang Memilikiizin Usaha	20.90 % 16.91 %	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3 Kegiatan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3 Kegiatan	75,426,311		
3 31 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,002,837,762	
3 31 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7,500,189	
3 31 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	7,500,189		
3 31 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,054,277,175	
3 31 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan			3,046,776,613		
3 31 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			4,250,343		
3 31 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			3,250,219		
3 31 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,496,580,458	
3 31 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			3,830,500		
3 31 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			61,992,696		
3 31 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			87,908,814		
3 31 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			36,868,668		
3 31 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			1,354,830		
3 31 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			4,495,950		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 31 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan				1,300,129,000	
3 31 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								212,156,698	
3 31 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit				212,156,698	
3 31 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								186,452,800	
3 31 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan				81,320,000	
3 31 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan				105,132,800	
3 31 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45,870,442	
3 31 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit				31,290,442	
3 31 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit				14,580,000	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								731,031,362	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								731,031,362	
3 31 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka Persentase bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	0,29 % 3,38 % 0 0 3,08 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1	1 1		10,999,850	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka Persentase bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	0,29 % 3,38 % 0 0 3,08 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1	1 1		108,792,156	
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka Persentase bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	0,29 % 3,38 % 0 0 3,08 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1	1 1		151,153,530	
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka Persentase bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	0,29 % 3,38 % 0 0 3,08 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1	1 1		460,085,826	
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								63,995,342	
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								63,995,342	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3 31 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	3,38 % 3,08 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen		63,995,342	
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								143,350,512	
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								143,350,512	
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	3,38 % 3,08 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		98,616,708	
3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	3,38 % 3,08 %	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		35,401,378	
3 31 04 2.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Persentase bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka Persentase bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	3,38 % 3,08 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		9,332,426	
TOTAL									6,105,966,133	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
4	01	01							44,030,990,867				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						37,972,000			
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<p>Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu</p> <p>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian</p> <p>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</p> <p>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin</p> <p>Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu</p> <p>Persentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilayani</p> <p>Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan</p> <p>Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu</p> <p>Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran</p> <p>Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%</p> <p>Tingkat efisiensi penggunaan anggaran</p>	85 85 85 85 1 % 1 poin 100 % 100 % 1 % 1 % 1 % 1 poin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang sesuai standart	100 %	37,972,000	
4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17,398,927,248			
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<p>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian</p> <p>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</p> <p>Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%</p> <p>Tingkat efisiensi penggunaan anggaran</p>	85 85 85 100 % efisien	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	17,242,798,268	
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<p>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian</p> <p>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</p> <p>Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%</p> <p>Tingkat efisiensi penggunaan anggaran</p>	85 85 85 100 % efisien	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10000 Dokumen	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	150,321,460	
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<p>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian</p> <p>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</p> <p>Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%</p> <p>Tingkat efisiensi penggunaan anggaran</p>	85 85 85 100 % efisien	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	2,903,760	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100% Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	85 85 85 100 % efisien	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %		2,903,760	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								3,151,585,609	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100% Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	85 85 85 100 % efisien	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dilayani tepat waktu dan sesuai standar kepegawaian	100 %		2,932,423,209	
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100% Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	85 85 85 100 % efisien	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	86 Dokumen	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dilayani tepat waktu dan sesuai standar kepegawaian	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	219,162,400	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								11,925,104,943	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (Baik) Predikat 88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %		114,997,400	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (Baik) Predikat 88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %		452,109,861	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (Baik) Predikat 88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %		342,375,000	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (Baik) Predikat 88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %		74,452,800	
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (Baik) Predikat 88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %		10,228,784	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (Baik) Predikat 88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %		2,468,134,098	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (Baik) Predikat 88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %		8,462,807,000	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								287,235,144	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang terlaksana sesuai standart	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,157,444	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang terlaksana sesuai standart	100 %		147,077,700	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4,274,981,372	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (baik) Predikat 88,3 (baik) Predikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Persentase acara Kedinasan yang terlayani Sarana dan Prasarananya dengan baik, lengkap dan tepat waktu	100 %		129,585,920	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (baik) Predikat 88,3 (baik) Predikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase acara Kedinasan yang terlayani Sarana dan Prasarananya dengan baik, lengkap dan tepat waktu	100 %		2,573,101,624	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (baik) Predikat 88,3 (baik) Predikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase acara Kedinasan yang terlayani Sarana dan Prasarananya dengan baik, lengkap dan tepat waktu	100 %		747,322,194	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (baik) Predikat 88,3 (baik) Predikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase acara Kedinasan yang terlayani Sarana dan Prasarananya dengan baik, lengkap dan tepat waktu	100 %		824,971,634	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,461,318,234	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %		1,738,670,884	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %		352,968,950	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (Baik) Predikat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	95 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	369,678,400	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								1,327,196,829	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	85 0	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Persentase pelayanan Kedinasan KDH/WKDH yang dilayani dengan baik	100 %		168,541,206	
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakai Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	85 0	Jumlah Paket Pakai Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Persentase pelayanan Kedinasan KDH/WKDH yang dilayani dengan baik	100 %		758,655,623	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	85 0	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Persentase pelayanan Kedinasan KDH/WKDH yang dilayani dengan baik	100 %		400,000,000	
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								1,773,285,328	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana kedinasan Kdh/Wkdh	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	Persentase layanan kedinasan Kdh/Wkdh yang diakomodir dengan baik dan lengkap	100 %		1,025,909,188	
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana kedinasan Kdh/Wkdh	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	Persentase layanan kedinasan Kdh/Wkdh yang diakomodir dengan baik dan lengkap	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	633,556,140	
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana kedinasan Kdh/Wkdh	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 Paket	Persentase layanan kedinasan Kdh/Wkdh yang diakomodir dengan baik dan lengkap	100 %		113,820,000	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi								200,245,797	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Inovasi yang lolos penilaian seleksi skala nasional Persentase SKPD binaan dengan kinerja pelayanan berkategori baik Persentase SKPD binaan dengan nilai RB SKPD berkategori sangat baik Persentase SKPD binaan dengan nilai SAKIP SKPD berkategori sangat baik Persentase SKPD dengan Tingkat Kematangan Level Tinggi	11 Buah 92 % 100 % 100 % 50 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil evaluasi RB yang ditindaklanjuti	100 %		85,928,911	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Inovasi yang lolos penilaian seleksi skala nasional Persentase SKPD binaan dengan kinerja pelayanan berkategori baik Persentase SKPD binaan dengan nilai RB SKPD berkategori sangat baik Persentase SKPD binaan dengan nilai SAKIP SKPD berkategori sangat baik Persentase SKPD dengan Tingkat Kematangan Level Tinggi	11 Buah 92 % 100 % 100 % 50 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi RB yang ditindaklanjuti	100 %		26,364,136	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Inovasi yang lolos penilaian seleksi skala nasional Persentase SKPD binaan dengan kinerja pelayanan berkategori baik Persentase SKPD binaan dengan nilai RB SKPD berkategori sangat baik Persentase SKPD binaan dengan nilai SAKIP SKPD berkategori sangat baik Persentase SKPD dengan Tingkat Kematangan Level Tinggi	11 Buah 92 % 100 % 100 % 50 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil evaluasi RB yang ditindaklanjuti	100 %		87,952,750	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							1,193,138,363		
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan								213,558,288	
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan								888,591,771	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan								90,988,304	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							34,397,619,502		
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan							168,310,394		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	<p>Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu</p> <p>Persentase Capaian Penerapan SPM Kabupaten Tapin</p> <p>Persentase informasi pembangunan daerah terhadap publik melalui media massa dan media elektronik</p> <p>persentase kebijakan administrasi pemerintahan yang ditindak lanjuti</p> <p>Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel</p> <p>Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu</p> <p>Persentase kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel</p> <p>Persentase Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) SKPD</p> <p>Persentase Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang ditinjau lanjut SKPD</p> <p>Persentase Usulan Raperda/Perbup/Keppub yang diharmonisasi</p> <p>Persentasi Batas Wilayah Kabuapten yang Terseslesaikan</p>	<p>1 %</p> <p>98 %</p> <p>100 %</p> <p>1 %</p> <p>77 %</p> <p>100 %</p> <p>98 %</p> <p>77 %</p> <p>100 %</p> <p>1 %</p> <p>100 %</p>	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1	1 1	43,779,600	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	<p>Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu</p> <p>Persentase Capaian Penerapan SPM Kabupaten Tapin</p> <p>Persentase informasi pembangunan daerah terhadap publik melalui media massa dan media elektronik</p> <p>persentase kebijakan administrasi pemerintahan yang ditindak lanjuti</p> <p>Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel</p> <p>Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu</p> <p>Persentase kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel</p> <p>Persentase Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) SKPD</p> <p>Persentase Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang ditinjau lanjut SKPD</p> <p>Persentase Usulan Raperda/Perbup/Keppub yang diharmonisasi</p> <p>Persentasi Batas Wilayah Kabuapten yang Terseslesaikan</p>	<p>1 %</p> <p>98 %</p> <p>100 %</p> <p>1 %</p> <p>77 %</p> <p>100 %</p> <p>98 %</p> <p>77 %</p> <p>100 %</p> <p>1 %</p> <p>100 %</p>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1	1 1	47,051,728	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu Persentase Capaian Penerapan SPM Kabupaten Tapin Persentase informasi pembangunan daerah terhadap publik melalui media massa dan media elektronik persentase kebijakan administrasi pemerintahan yang ditindak lanjuti Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu Persentase kegiatan sosial masyarakat yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel Persentase Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) SKPD Persentase Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang ditindak lanjuti SKPD Persentase Usulan Raperda/Perbup/Keppub yang diharmonisasi Persentasi Batas Wilayah Kabuapten yang terselesaikan	1 % 98 % 100 % 1 % 77 % 100 % 98 % 77 % 100 % 1 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	1	1 1	77,479,066	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						33,907,856,768		
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual Persentasi Hasil Rekomendasi Lembaga Keagamaan dan Sosial Masyarakat yang ditindaklanjuti	84,00 baik 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	14 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dan Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	17 Dokumen	6,497,822,368	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual Persentasi Hasil Rekomendasi Lembaga Keagamaan dan Sosial Masyarakat yang ditindaklanjuti	84,00 baik 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dan Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	17 Dokumen	27,410,034,400	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							321,452,340	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	258 Dokumen	- Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah - Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum - Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100 %	97,041,600	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	- Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah - Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum - Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100 %	104,404,140	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	258 Dokumen	- Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah - Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum - Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100 %		120,006,600	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								325,053,276	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								91,165,800	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase BUMD yang sehat dan profitable Persentase data dan informasi bidang perekonomian daerah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan perekonomian Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) di bidang perekonomian yang difasilitasi Persentase paket pekerjaan yang dapat diselesaikan proses lelangnya Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	100 % 100 % 1 % 1 % 95 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	Jumlah item hasil pemeriksaan auditor eksternal yang selesai ditindaklanjuti oleh BUMD & BLUD dibagi jumlah item hasil pemeriksaan auditor eksternal terhadap BUMD & BLUD	100 %		46,259,600	
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase BUMD yang sehat dan profitable Persentase data dan informasi bidang perekonomian daerah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan perekonomian Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) di bidang perekonomian yang difasilitasi Persentase paket pekerjaan yang dapat diselesaikan proses lelangnya Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	100 % 100 % 1 % 1 % 95 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	Jumlah item hasil pemeriksaan auditor eksternal yang selesai ditindaklanjuti oleh BUMD & BLUD dibagi jumlah item hasil pemeriksaan auditor eksternal terhadap BUMD & BLUD	100 %		44,906,200	
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								34,865,000	
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase data dan informasi bidang perekonomian daerah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan perekonomian	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	Jumlah kegiatan CSR yang dilaksanakan perusahaan dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah kegiatan CSR yang dilaksanakan perusahaan	100 %		34,865,000	
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								165,054,976	
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	jumlah pengadaan barang dan jasa melalui LPSE dibagi jumlah pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui SIRUP di kali 100 %	100 %		165,054,976	
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								33,967,500	
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase data dan informasi bidang perekonomian daerah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan perekonomian	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	Jumlah rekomendasi pelaksanaan strategi pengendalian inflasi yang selesai ditindaklanjuti SKPD dibagi jumlah rekomendasi pelaksanaan strategi pengendalian inflasi dari TPID	100 %		33,967,500	
TOTAL									78,753,663,645	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							24,941,790,846	
4 02 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							89,382,897	
4 02 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80% %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100 %	89,382,897	
4 02 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,454,649,275	
4 02 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 % 80% %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu (%)	100 %	5,265,700,584	
4 02 01	2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 % 80% %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu (%)	100 %	103,782,897	
4 02 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 % 80% %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu (%)	100 %	2,982,897	
4 02 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 % 80% %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu (%)	100 %	82,182,897	
4 02 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							2,078,981,100	
4 02 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%) Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 % 80 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	19,839,404	
4 02 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%) Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 % 80 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	62,072,550	
4 02 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%) Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 % 80 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	243,959,950	
4 02 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%) Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 % 80 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	83,726,676	
4 02 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%) Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 % 80 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1460 Dokumen	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	125,800,000	
4 02 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%) Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 % 80 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	15,249,520	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%) Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 % 80 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %		79,310,000	
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%) Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 % 80 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %		1,449,023,000	
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								415,477,200	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	80 %		7,482,000	
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	80 %		199,980,000	
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	80 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	228 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	80 %		208,015,200	
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								557,285,674	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Persentase pemeliharaan BMD dalam kondisi baik	100 %		294,324,498	
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Persentase pemeliharaan BMD dalam kondisi baik	100 %		159,528,526	
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Persentase pemeliharaan BMD dalam kondisi baik	100 %		22,332,650	
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase pemeliharaan BMD dalam kondisi baik	100 %		81,100,000	
4 02 01 2.13	Penataan Organisasi								57,487,500	
4 02 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	80 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Persentase kegiatan Penataan Organisasi/Pergantian antarwaku	100 %		57,487,500	
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								16,288,527,200	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 nilai 80 %	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	Persentase Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang selesai tepat waktu (%)	100 %		15,983,657,200	
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 nilai 80 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	Persentase Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang selesai tepat waktu (%)	100 %		229,870,000	
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80 nilai 80 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	Persentase Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang selesai tepat waktu (%)	100 %		75,000,000	
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								11,845,298,610	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								530,953,143	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Persentase Naskah Akademik yang terfasilitasi Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	1 % 1 % 80 % 1 % 1 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang selesai tepat waktu	100 %		120,539,405	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Persentase Naskah Akademik yang terfasilitasi Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	1 % 1 % 80 % 1 % 1 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang selesai tepat waktu	100 %		205,206,869	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Persentase Naskah Akademik yang terfasilitasi Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	1 % 1 % 80 % 1 % 1 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang selesai tepat waktu	100 %		205,206,869	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								164,866,217	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80 %		41,390,969	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80 %		27,625,019	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80 %		34,140,930	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80 %		34,140,930	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80 %		27,568,369	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								706,920,340	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 nilai	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	Persentase Kegiatan Dewan yang Terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80 %		158,055,600	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 nilai	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	Persentase Kegiatan Dewan yang Terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80 %		258,000,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 nilai	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	Persentase Kegiatan Dewan yang Terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80 %		290,864,740	
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								322,226,910	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	300 Laporan	Persentase Kegiatan Reses Anggota DPRD yang terfasilitasi	100 %		9,900,000	
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	Persentase Kegiatan Reses Anggota DPRD yang terfasilitasi	100 %		312,326,910	
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah								29,670,000	
4 02 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepada Anggota DPRD	80 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah yang selesai tepat waktu	80 %		29,670,000	
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD								10,090,662,000	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2500 Dokumen	Persentase Kegiatan Dewan yang Terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80 %		8,485,026,000	
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	600 Dokumen	Persentase Kegiatan Dewan yang Terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80 %		1,605,636,000	
TOTAL									36,787,089,456	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan					
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10,790,179,601		
5 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								64,267,074		
5 01 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	80 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,128,810	
5 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	80 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,138,264	
5 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,451,588,186	
5 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	90 %		5,400,000,546	
5 01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,393,600	
5 01 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,194,040	
5 01 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								3,724,993,381	
5 01 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89,455,070	
5 01 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,206,947,669	
5 01 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	202,810,027	
5 01 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %		32,086,380	
5 01 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142,332,235	
5 01 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,827,500	
5 01 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %		2,031,534,500	
5 01 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								254,275,844	
5 01 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	254,275,844	
5 01 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								915,280,648	
5 01 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rata-rata capaian kinerja kegiatan bappellitbang	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	558,298,328	
5 01 01	2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan bappellitbang	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90 %		205,250,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan bappelitbang	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90%	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151,732,320	
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								379,774,468	
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90%	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	312,438,848	
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90%	90 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,335,620	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								2,462,544,686	
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								1,667,276,921	
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	<p>Indeks Kualitas Perencanaan</p> <p>Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar</p> <p>Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur</p> <p>Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM</p> <p>Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah</p> <p>Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD</p> <p>Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur</p> <p>Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM</p> <p>Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD</p> <p>Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD</p> <p>Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD</p> <p>Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah</p> <p>Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD</p>	<p>8.1 score</p> <p>8.1 score</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,536,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 score 8.1 score 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,429,375	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	<p>Indeks Kualitas Perencanaan</p> <p>Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar</p> <p>Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur</p> <p>Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM</p> <p>Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah</p> <p>Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD</p> <p>Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur</p> <p>Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM</p> <p>Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD</p> <p>Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD</p> <p>Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD</p> <p>Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah</p> <p>Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD</p>	<p>8.1 score</p> <p>8.1 score</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	318,855,700	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<p>Indeks Kualitas Perencanaan</p> <p>Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar</p> <p>Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur</p> <p>Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM</p> <p>Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah</p> <p>Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD</p> <p>Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur</p> <p>Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM</p> <p>Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD</p> <p>Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD</p> <p>Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD</p> <p>Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah</p> <p>Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD</p>	<p>8.1 score</p> <p>8.1 score</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPIPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	709,120,000	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					242,512,500				
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<p>Indeks Kualitas Perencanaan</p> <p>Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah</p> <p>Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD</p>	<p>8.1 score</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	70 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	242,512,500	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					552,755,265				
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	<p>Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti</p> <p>Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah</p> <p>Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD</p>	<p>8.1 Score</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	70 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	404,310,265	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<p>Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti</p> <p>Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah</p> <p>Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD</p>	<p>8.1 Score</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	70 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	148,445,000	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1,028,339,800				
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					546,398,300				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Indeks Kualitas Perencanaan Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,993,500	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Indeks Kualitas Perencanaan Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,838,500	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Indeks Kualitas Perencanaan Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,033,500	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Indeks Kualitas Perencanaan Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	128,116,550	
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Indeks Kualitas Perencanaan Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,026,750	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Indeks Kualitas Perencanaan Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 score 8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,389,500	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								224,789,000	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Indeks Kualitas Perencanaan Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,283,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Indeks Kualitas Perencanaan Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,521,000	
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Indeks Kualitas Perencanaan Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	8.1 score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,985,000	
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								257,152,500	
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Indeks Kualitas Perencanaan Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	9.1 score 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118,270,000	
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Indeks Kualitas Perencanaan Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	9.1 score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,842,500	
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Indeks Kualitas Perencanaan Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	9.1 score 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,040,000	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								1,141,382,736	
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								264,361,576	
5 05 02 2.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Persentase hasil kelitbangan yang disitasi Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPDP Persentase rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan Persentase sasaran dan program RKPDP yang konsisten dengan RPJMD:	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	264,361,576	
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								170,481,000	
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Persentase hasil kelitbangan yang disitasi	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 %		170,481,000	
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi								706,540,160	
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Persentase hasil kelitbangan yang disitasi	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 %		231,007,300	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Persentase hasil kelitbangan yang disitasi0	100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 %		297,137,860	
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Persentase hasil kelitbangan yang disitasi0	100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100 %		178,395,000	
TOTAL									15,422,446,823	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									10,797,990,262	
5 02 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									31,671,500	
5 02 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Waktu dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di susun	12 Bulan		3,801,500	
5 02 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	Waktu dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di susun	12 Bulan		27,870,000	
5 02 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									6,479,179,283
5 02 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		6,440,747,283	
5 02 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		4,382,000	
5 02 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		34,050,000	
5 02 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									54,810,359
5 02 01	2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen		54,810,359	
5 02 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									2,300,324,752
5 02 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		133,238,820	
5 02 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		447,186,298	
5 02 01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		9,532,760	
5 02 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		426,351,554	
5 02 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		154,678,860	
5 02 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		55,789,840	
5 02 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		99,037,620	
5 02 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		974,509,000	
5 02 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									174,076,484
5 02 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	Persentase pengadaan peralatan dan mesin kantor	100 Persen		174,076,484	
5 02 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									953,713,720
5 02 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		22,607,400	
5 02 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		368,683,600	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		562,422,720	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							804,214,164		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen		123,630,404	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen		144,050,000	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen		536,533,760	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							3,204,136,020		
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							1,684,197,671		
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen		73,470,100	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen		72,769,700	
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen		10,328,000	
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen		10,286,800	
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen		37,025,910	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen		37,067,110	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen		911,564,240	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen		146,291,812	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen		385,393,999	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								970,882,391	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	52 Dokumen	Persentase ketidakjadian kejadian complain	100 Persen		224,859,000	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	Persentase ketidakjadian kejadian complain	100 Persen		43,533,692	
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen	Persentase ketidakjadian kejadian complain	100 Persen		15,369,700	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	Persentase ketidakjadian kejadian komplain	100 Persen	110,339,862	
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	Persentase ketidakjadian kejadian komplain	100 Persen	81,182,417	
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	17 Dokumen	Persentase ketidakjadian kejadian komplain	100 Persen	177,640,800	
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	116 Orang	Persentase ketidakjadian kejadian komplain	100 Persen	317,956,920	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							549,055,958	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen	81,491,553	
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen	23,539,400	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen	20,461,530	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen	101,029,000	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen	71,496,245	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen	48,353,400	
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen	48,353,400	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	12 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen	154,331,430	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							1,248,850,250	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah							1,248,850,250	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	323,773,700	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	11,416,200	
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	84,418,200	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	121,619,450	
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	13,494,670	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	82,941,700	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	113,245,480	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	257,982,800	
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	90 Laporan	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	37,511,320	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	24 Laporan	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	20,171,200	
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100 Persen	182,275,530	
TOTAL									15,250,976,532				

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0001 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0001 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									101,096,982,100	
5	02	02	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									101,096,982,100	
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	1 1	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan				5,000,000,000	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	1 1	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan				68,882,235,600	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	1 1	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan				24,690,000,000	
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Perbub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	1 1	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan				2,524,746,500	
											TOTAL	101,096,982,100		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8,859,255,029		
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13,013,859		
5	02	01	2.01	01	Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100 %	1,999,629	
5	02	01	2.01	03	Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100 %	1,999,629	
5	02	01	2.01	05	Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100 %	1,999,629	
5	02	01	2.01	06	Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100 %	1,999,629	
5	02	01	2.01	07	Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100 %	5,015,343	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,626,438,563	
5	02	01	2.02	01	Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264 Orang/bulan	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %	5,452,117,194	
5	02	01	2.02	03	Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1749 Dokumen	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %	168,721,479	
5	02	01	2.02	05	Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %	2,799,945	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %		2,799,945	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,171,054,474	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		67,296,430	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		303,694,953	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		118,778,654	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		643,219,245	
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		6,130,892	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		5,665,000	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		1,026,269,300	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								184,363,250	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	Persentase Pengadaan peralatan dan mesin kantor	100 %		74,723,250	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Persentase Pengadaan peralatan dan mesin kantor	100 %		109,640,000	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								542,101,952	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		488,935,872	
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		53,166,080	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								322,282,931	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		67,392,931	
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	338 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		54,970,000	
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Persentase efisiensi penggunaan anggaran Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	90 % 90 % 80 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		199,920,000	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								2,186,157,733	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								2,186,157,733	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun Persentase Penerimaan Piutang Daerah Persentase peningkatan objek pajak baru Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,5 %	71,983,526	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun Persentase Penerimaan Piutang Daerah Persentase peningkatan objek pajak baru Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,5 %	74,985,356	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun Persentase Penerimaan Piutang Daerah Persentase peningkatan objek pajak baru Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,5 %	161,274,284	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun Persentase Penerimaan Piutang Daerah Persentase peningkatan objek pajak baru Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	24 Laporan	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,5 %	775,053,036	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun Persentase Penerimaan Piutang Daerah Persentase peningkatan objek pajak baru Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3000 Obyek Pajak	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,5 %	389,887,937	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun Persentase Penerimaan Piutang Daerah Persentase peningkatan objek pajak baru Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8000 Dokumen	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,5 %	267,232,991	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun Persentase Penerimaan Piutang Daerah Persentase peningkatan objek pajak baru Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1200 Layanan	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,5 %	38,458,129	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun Persentase Penerimaan Piutang Daerah Persentase peningkatan objek pajak baru Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1900 Dokumen	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,5 %	185,956,237	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun Persentase Penerimaan Piutang Daerah Persentase peningkatan objek pajak baru Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60 % 1,60 % 80 % 100 % 5,00 % 1,60 % 1,60 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,5 %	221,326,237	
TOTAL									11,045,412,762				

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,543,126,953	
5 03 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								83,585,633	
5 03 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							42,760,253	
5 03 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							2,649,788	
5 03 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan			38,175,592	
5 03 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,863,273,255	
5 03 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							3,768,855,000	
5 03 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							5,119,621	
5 03 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							48,278,859	
5 03 01	2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							41,019,775	
5 03 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								92,666,280	
5 03 01	2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							92,666,280	
5 03 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,135,660,639	
5 03 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							24,893,050	
5 03 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							127,853,049	
5 03 01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							28,085,580	
5 03 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							117,387,000	
5 03 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							27,081,560	
5 03 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							810,360,400	
5 03 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								234,516,000	
5 03 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							141,600,000	
5 03 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							92,916,000	
5 03 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								133,425,146	
5 03 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							34,459,864	
5 03 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							62,850,000	
5 03 01	2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			36,115,282	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								3,181,366,363	
5 03 02	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								944,654,219	
5 03 02	2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	99 % 90 % 95 %			1	1 1	3,290,181	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	99 % 90 % 95 %			1	1 1		706,833,007	
5 03 02 2.01 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	99 % 90 % 95 %			1	1 1		88,218,581	
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	99 % 90 % 95 %			1	1 1		20,142,450	
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	99 % 90 % 95 %			1	1 1		82,700,000	
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	99 % 90 % 95 %			1	1 1		43,470,000	
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN								616,582,598	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN								39,568,269	
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN								144,539,829	
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN								432,474,500	
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN								1,257,850,829	
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN								82,769,225	
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN								100,899,775	
5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat								1,033,885,229	
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional								40,296,600	
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								362,278,717	
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								172,335,680	
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai								16,096,916	
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN								173,846,121	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								517,709,931	
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								517,709,931	
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	90 %			1	1 1		517,709,931	
TOTAL									9,242,203,247	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								12,162,506,619	
6 01 01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3,560,850	
6 01 01	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 % 100 Persentase	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen				539,100	
6 01 01	2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 % 100 Persentase	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen				539,100	
6 01 01	2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 % 100 Persentase	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen				539,100	
6 01 01	2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 % 100 Persentase	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen				268,200	
6 01 01	2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 % 100 Persentase	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen				268,200	
6 01 01	2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 % 100 Persentase	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan				926,100	
6 01 01	2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100 % 100 Persentase	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan				481,050	
6 01 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,443,378,026	
6 01 01	2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	40 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan				8,369,854,916	
6 01 01	2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	40 Orang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen				65,159,910	
6 01 01	2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	40 Orang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan				4,181,600	
6 01 01	2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	40 Orang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen				4,181,600	
6 01 01	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								1,188,090	
6 01 01	2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pengadaan BMD dalam kondisi baik	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan				1,188,090	
6 01 01	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								502,136,380	
6 01 01	2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen				65,628,180	
6 01 01	2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang				198,795,900	
6 01 01	2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang				237,712,300	
6 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,358,046,047	
6 01 01	2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket				29,152,450	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket				99,064,740	
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket				7,728,614	
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket				133,640,670	
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket				44,996,193	
6 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan				24,291,380	
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				2,019,172,000	
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								259,245,492	
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit				61,115,382	
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit				198,130,110	
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								258,159,440	
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				201,710,000	
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				56,449,440	
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								336,792,294	
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit				90,376,048	
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit				134,609,998	
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit				66,650,000	
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit				45,156,248	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								3,910,818,560	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								2,955,393,280	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase Self Assessment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	13 Laporan	1	1 1		791,911,500	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase Self Assessment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	1	1 1	750,080,800	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase Self Assessment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	1 % 1 % 1 % 1 % 1 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	1	1 1	405,972,480	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase Self Assessment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	1 % 1 % 1 % 1 % 1 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1	1 1	83,199,230	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase Self Assessment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	1	1	1	492,700,240	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase Self Assessment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	1 % 1 % 1 % 1 % 1 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	1	1	1	431,529,030	
6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						955,425,280				
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan				245,391,650	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan				710,033,630	
6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						1,114,171,343				
6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						28,290,873				

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase Self Assessment per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 1	26,777,008		
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu Persentase Self Assessment per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 1	1,513,865		
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi						1,085,880,470		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53 perangkat daerah			179,563,560	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan dan Asistensi	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53 perangkat daerah			215,505,540	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pendampingan dan Asistensi	100 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan			576,537,990	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan dan Asistensi	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53 perangkat daerah				114,273,380	
TOTAL												17,187,496,522		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,811,060,395	
7 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								6,149,765	
7 01 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	750,018		
7 01 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	750,018		
7 01 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	750,018		
7 01 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	750,018		
7 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	3,149,693		
7 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,391,468,167	
7 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen	1,389,268,075		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen		1,100,046	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen		1,100,046	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								381,085,557	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen		3,749,940	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen		18,805,863	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen		37,081,890	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen		11,702,914	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	2,435,950	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	307,309,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							49,878,858	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	47,040,858	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	2,838,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							61,027,200	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	1,795,680	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	15,681,600	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	43,549,920	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						921,450,848		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 1 Persen 1 Persen 100 Persen 1 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	58,838,896	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 1 Persen 1 Persen 100 Persen 1 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	7,200,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,04 Persen 1 Persen 1 Persen 100 Persen 1 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	855,411,952	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						43,433,280		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						43,433,280		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 Persen	43,433,280	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						267,623,408		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						260,039,208		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	87 point 87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100 Persen	4,065,400	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	87 point 87 point 100 Persen 100 Persen 87 point 100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan 4 Laporan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100 Persen	255,973,808		
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								7,584,200	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100 Persen	3,937,300		
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100 Persen	3,646,900		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								9,932,500	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								9,932,500	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Persentase laporan bidang trantib	100 Persen	5,446,900		
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Persentase laporan bidang trantib	100 Persen	4,485,600		
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								38,754,800	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								38,754,800	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70 Orang	Persentase laporan bidang trantib	100 Persen	34,443,500		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	Persentase laporan bidang trantib	100 Persen		4,311,300	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								62,848,480	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								62,848,480	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen		39,937,080	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen		4,303,800	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen		4,303,800	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Piani

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 point 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen	14,303,800	
TOTAL									3,233,652,863				

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,546,567,590	
7 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							9,522,140	
7 01 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,124,920	
7 01 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,124,920	
7 01 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,274,904	
7 01 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,274,904	
7 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	4,722,492	
7 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,832,216,161	
7 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,825,209,177	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,364,564	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4,642,420	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							355,122,327	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8,458,730	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	15,694,677	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	46,980,772	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7,149,048	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		276,839,100	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								72,786,594	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		9,424,488	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		63,362,106	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								185,966,364	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		1,990,212	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		32,926,392	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		151,049,760	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								90,954,004	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	37,742,004	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6,000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	47,212,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						36,233,280		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						36,233,280		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Point 100 % 100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	36,233,280	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						358,767,176		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						220,776,852		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	86,8 Point 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	3,999,992	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	86,8 Point 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan 3 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	216,776,860		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							132,000,000		
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	132,000,000		
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							5,990,324		
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	2,990,548		
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	2,999,776		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							2,999,776		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							2,999,776		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	2,999,776		
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							40,620,900		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							40,620,900		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Point 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %		35,668,700	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Point 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %		4,952,200	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								15,023,664	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								15,023,664	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Point 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		4,499,884	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Point 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		4,499,680	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Point 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		4,499,700	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Point 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	1,524,400	
TOTAL									4,000,212,386				

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tapin Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 KELURAHAN TAMBARANGAN

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								669,999,700	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								669,999,700	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	86,8 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %		337,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	86,8 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	332,999,700	
TOTAL											669,999,700			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	01								3,971,023,746			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
7	01	01	2.01							6,008,000			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 persen	6,008,000	
7	01	01	2.02							3,430,939,684			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	Persentase Penyerapan Anggaran dan Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 persen	3,426,141,284	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase Penyerapan Anggaran dan Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 persen	2,399,200	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase Penyerapan Anggaran dan Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 persen	2,399,200	
7	01	01	2.06							328,530,674			
Administrasi Umum Perangkat Daerah													
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 persen	1,484,190	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 persen	21,052,368	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 persen		66,483,776	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 persen		4,991,540	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 persen		234,518,800	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							8,000,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen		4,500,000	
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen		3,500,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							149,839,200		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen		4,489,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen		43,150,320	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen		102,199,680	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								47,706,188	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen		45,506,188	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan kondisi yang baik Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen		2,200,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								36,226,000	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								36,226,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	88 Point 100 Persen 100 Persentase 100 Persentase	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 persen		36,226,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								564,916,186	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								113,716,186	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	88 Point 100 Persentase 88 Point 100 Persentase 100 Persentase			Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan dan Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	100 persen		2,208,750	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	88 Point 100 Persentase 88 Point 100 Persentase 100 Persentase	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan 12 Laporan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan dan Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	100 persen	111,507,436		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							451,200,000		
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan	100 persen	451,200,000		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							4,417,500		
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							4,417,500		
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Persentase laporan bidang trantib	100 persen	2,208,750		
7 01 04 7.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	Persentase laporan bidang trantib	100 persen	2,208,750		
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							23,065,490		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							23,065,490		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	Persentase laporan bidang trantib	100 persen	23,065,490		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							18,968,000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							18,968,000		
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 persen	2,208,750		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 persen	2,208,750	
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 persen	2,208,750	
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 persen	2,208,750	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 persen	10,133,000	
TOTAL										4,618,616,922			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN BINUANG

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								636,005,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								636,005,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	88 point 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 persen		347,200,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	88 point 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 persen		288,805,000	
TOTAL											636,005,000			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN KARANGAN PUTIH

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								635,798,539	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								635,798,539	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	88 point 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 persen		362,800,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	88 point 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 persen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	272,998,539	
TOTAL											635,798,539			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 KELURAHAN RAYA BELANTI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
7	01	03							643,719,724					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
7	01	03	2.02						643,719,724					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	88 point 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 persen		354,400,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	88 point 100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 persen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	289,319,724	
TOTAL									643,719,724					

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,815,591,966	
7 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								8,611,560	
7 01 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Aset Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Peanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,017,500		
7 01 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Aset Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Perencanaan, Peanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,017,500		
7 01 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Aset Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Perencanaan, Peanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,017,500		
7 01 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Aset Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Perencanaan, Peanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,017,500		
7 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Aset Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Perencanaan, Peanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	4,541,560		
7 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,859,639,495	
7 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1,856,792,995		
7 01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1,520,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		1,326,500	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								379,321,393	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		5,366,984	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		22,139,139	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		47,632,670	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		12,769,600	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		291,413,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								123,378,026	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	84,678,026	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	38,700,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							83,110,360	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	2,476,800	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	44,167,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	36,466,560	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							361,531,132	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	49,201,132	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	15,540,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	296,790,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						41,148,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						41,148,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Peningkatan Efektivitas, Pelaksanaan Playanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Persen	41,148,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						123,904,300		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						117,508,100		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 %			Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	100 Persen	3,786,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	100 Persen	113,722,100	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						6,396,200		
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Poin 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 Persen	3,198,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Poin 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 Persen	3,198,100	
7	01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							3,198,100	
7	01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							3,198,100	
7	01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Poin 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	3,198,100	
7	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							25,256,950	
7	01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							25,256,950	
7	01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Poin 10 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	20,076,100	
7	01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Poin 10 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	5,180,850	
7	01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							26,962,500	
7	01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							26,962,500	
7	01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Poin 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Persen	4,442,250	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bungur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Poin 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen				100 Persen	7,185,000	
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Poin 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen				100 Persen	4,635,750	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,8 Poin 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen				100 Persen	10,699,500	
TOTAL									3,036,061,816				

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,462,538,925	
7 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							15,108,088	
7 01 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Peanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,124,866	
7 01 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Peanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,124,866	
7 01 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Peanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,274,928	
7 01 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Peanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,274,928	
7 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Terlaksananya Perencanaan, Peanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	10,308,500	
7 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,967,047,667	
7 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4,964,497,811	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1,274,928	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1,274,928	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							305,047,717	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	3,465,630	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	33,092,184	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	30,405,434	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	10,561,080	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	6,222,789	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	221,300,600	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						17,972,454		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	11,610,000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	6,362,454	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						119,950,376		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	31,445,336	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	88,505,040	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						37,412,623		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	16,637,623		
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	5,975,000		
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	14,800,000		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								39,735,600	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								39,735,600	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas, Pelaksanaan Playanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Persen	39,735,600		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								591,714,816	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								103,136,316	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	100 Persen	3,882,900		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan 4 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	100 Persen	99,253,416		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								482,659,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Persen		2,659,500	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Persen		480,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						5,919,000			
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 Persen		2,959,500	
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 Persen		2,959,500	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2,959,500			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						2,959,500			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen		2,959,500	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						9,787,900			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						9,787,900			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen		4,893,950	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen		4,893,950	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							26,850,900	
7 01 06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							26,850,900	
7 01 06	2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Persen	5,151,500	
7 01 06	2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Persen	5,151,500	
7 01 06	2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Persen	5,151,500	
7 01 06	2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Persen	1,198,200	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Persen	10,198,200	
TOTAL									6,133,587,641				

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN RANGDA MALINGKUNG

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								640,673,700	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								640,673,700	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Persentase Pembangunan Sarana dan Prsarana Kelurahan	100 %		291,019,164	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Persentase Pembangunan Sarana dan Prsarana Kelurahan	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	349,654,536	
TOTAL											640,673,700			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN KUPANG

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								617,325,800	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								617,325,800	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %		287,570,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	329,755,800	
TOTAL											617,325,800			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0003 KELURAHAN RANTAU KANAN

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								622,718,300	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								622,718,300	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	87 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %		303,281,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	87 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %		319,437,300	
TOTAL											622,718,300			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tapin Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN RANTAU KIWA

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								559,563,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								559,563,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Persentase Pembangunan Sarana dan Prsarana Kelurahan	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	259,922,050	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Persentase Pembangunan Sarana dan Prsarana Kelurahan	100 %	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	299,640,950	
TOTAL												559,563,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,897,484,285	
7 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								29,349,788	
7 01 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	999,940		
7 01 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	999,940		
7 01 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	1,500,000		
7 01 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	999,940		
7 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	24,849,968		
7 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,913,078,710	
7 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Presentase Penyerapan Anggaran dan Presentase Laporan Tepat Waktu	100 Persen	1,905,811,310		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase Penyerapan Anggaran dan Presentase Laporan Tepat Waktu	100 Persen	4,267,400	
7	01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase Penyerapan Anggaran dan Presentase Laporan Tepat Waktu	100 Persen	3,000,000	
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							359,647,753	
7	01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	5,000,000	
7	01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	14,992,905	
7	01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	44,346,000	
7	01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	7,999,848	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen		2,472,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen		284,837,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							142,370,244		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen		40,673,460	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen		101,696,784	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							76,137,240		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen		5,237,400	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen		27,000,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen		43,899,840	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						376,900,550			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen		38,856,550	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen		10,920,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen		327,124,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						36,298,320			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						36,298,320			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,80 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani dan keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen		36,298,320	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						171,779,536			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						171,779,536			
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,80 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan 3 Laporan	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen		171,779,536	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5,131,800			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						5,131,800			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,80 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Persentase laporan bidang trantib dan keluhan/pengaduan masyarakat dibidang trantib yang ditindaklanjuti	100 Persen		5,131,800	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								25,122,600	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								25,122,600	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	Persentase laporan bidang trantib dan Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang ditindaklanjuti	100 Persen		20,403,500	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	Persentase laporan bidang trantib dan Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang ditindaklanjuti	100 Persen		4,719,100	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								25,210,500	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								25,210,500	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,80 Persen 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	24 Dokumen	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen		4,270,500	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,80 Persen 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa	24 Dokumen	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen		4,270,500	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bakarangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,80 Persen 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik 100 Persen	4,270,500	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86,80 Persen 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik 100 Persen	12,399,000	
TOTAL									3,161,027,041			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,646,777,399	
7 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							11,766,120	
7 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	11,766,120	
7 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,958,832,217	
7 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1,942,890,625	
7 01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4,258,892	
7 01 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	11,682,700	
7 01 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							346,253,940	
7 01 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase aset dengan kondisi baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu persentase penyerapan anggaran persentase sarana dan prasarana yang di butuhkan SKPD persentase unit kerja yang mendapatkan pelayan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	9,940,754	
7 01 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase aset dengan kondisi baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu persentase penyerapan anggaran persentase sarana dan prasarana yang di butuhkan SKPD persentase unit kerja yang mendapatkan pelayan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	39,644,304	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase aset dengan kondisi baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu persentase penyerapan anggaran persentase sarana dan prasarana yang di butuhkan SKPD persentase unit kerja yang mendapatkan pelayan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		53,291,032	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase aset dengan kondisi baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu persentase penyerapan anggaran persentase sarana dan prasarana yang di butuhkan SKPD persentase unit kerja yang mendapatkan pelayan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		16,179,300	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase aset dengan kondisi baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu persentase penyerapan anggaran persentase sarana dan prasarana yang di butuhkan SKPD persentase unit kerja yang mendapatkan pelayan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		4,480,500	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase aset dengan kondisi baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu persentase penyerapan anggaran persentase sarana dan prasarana yang di butuhkan SKPD persentase unit kerja yang mendapatkan pelayan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		222,718,050	
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							135,761,810			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase aset dengan kondisi baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu persentase penyerapan anggaran persentase sarana dan prasarana yang di butuhkan SKPD persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		84,740,964	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase aset dengan kondisi baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu persentase penyerapan anggaran persentase sarana dan prasarana yang di butuhkan SKPD persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		51,020,846	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							49,722,696			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 persentase aset dengan kondisi baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu persentase penyerapan anggaran persentase sarana dan prasarana yang di butuhkan SKPD persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan 100 % 100 % 100 % 100 %			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		6,494,376	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 persentase aset dengan kondisi baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu persentase penyerapan anggaran persentase sarana dan prasarana yang di butuhkan SKPD persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan 100 % 100 % 100 % 100 %			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		19,008,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 persentase aset dengan kondisi baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu persentase penyerapan anggaran persentase sarana dan prasarana yang di butuhkan SKPD persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan 100 % 100 % 100 % 100 %			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		24,220,320	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								144,440,616	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								44,635,616	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								18,320,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								81,485,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								36,233,280	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								36,233,280	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								36,233,280	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								144,564,662	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								128,716,224	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100 % 100 %			1	1 1		6,599,576	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100 % 100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122,116,648	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								15,848,438	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,660,192	
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,188,246	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								10,799,608	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Candi Laras Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,799,608	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,998,200	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,744,524	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %			1	1 1		26,476,208	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %			1	1 1		12,144,504	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %			1	1 1		24,162,872	
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %			1	1 1		6,612,886	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %			1	1 1		7,512,842	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,837,936	
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %			1	1 1		7,512,842	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,232,894	
TOTAL									3,101,610,657	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2,692,173,990	
7 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									11,837,440	
7 01 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen				1,609,750		
7 01 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen				1,609,750		
7 01 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen				514,370		
7 01 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen				514,370		
7 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan				7,589,200		
7 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2,054,779,594
7 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan				2,046,725,186		
7 01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan				2,002,408		
7 01 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan				6,052,000		
7 01 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									380,811,294
7 01 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				8,163,770		
7 01 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket				17,680,998		
7 01 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket				77,968,035		
7 01 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				6,172,491		
7 01 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan				4,635,000		
7 01 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				266,191,000		
7 01 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									53,098,176
7 01 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,873,176		
7 01 01	2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,225,000		
7 01 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									90,149,782
7 01 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan				5,387,040		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				23,116,992	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				61,645,750	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								101,497,704	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit				55,569,102	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,331,042	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,597,560	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								79,200,000	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								79,200,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,200,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								178,631,040	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								165,347,790	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100 % 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Desa	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,352,050	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100 % 100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158,995,740	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								13,283,250	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,855,500	
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan				4,427,750	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								15,584,350	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								15,584,350	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,584,350	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								43,049,400	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								43,049,400	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,049,400	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								51,102,582	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								51,102,582	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Candi Laras Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	26 Dokumen	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,375,856	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,223,498	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 Dokumen	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,761,300	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	13 Dokumen	1	1		7,951,678	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,278,950	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	1	1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,511,300	
TOTAL									3,059,741,362	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,708,042,405	
7 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								14,166,572	
7 01 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	1,000,384		
7 01 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	1,000,384		
7 01 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	1,000,384		
7 01 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	1,000,384		
7 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	10,165,036		
7 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,802,932,178	
7 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	Persentase penyerapan anggaran dan Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	1,799,931,448		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Persentase penyerapan anggaran dan Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	1,500,365	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Persentase penyerapan anggaran dan Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	1,500,365	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							475,094,213	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	15,000,020	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	30,000,030	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	50,001,083	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Persentase pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	10,000,080	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Persentase pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	370,093,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						105,036,632		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	105,036,632	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60,734,320		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	5,000,040	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	26,701,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	29,033,280	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						250,078,490		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	65,088,490	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	14,990,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	170,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						36,233,280		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						36,233,280		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani dan Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	36,233,280	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						130,080,423		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						123,079,757		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan 100 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen 85 % 100 %			Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Kesra yang ditindaklanjuti	100 Persen	3,500,333	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan 100 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen 85 % 100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Kesra yang ditindaklanjuti	100 Persen	119,579,424	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						7,000,666		
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100 Persen	3,500,333	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100 Persen		3,500,333	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								7,000,666	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								7,000,666	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Persentase laporan bidang Trantib	100 Persen		3,500,333	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	88 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Persentase laporan bidang Trantib	100 Persen		3,500,333	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								33,500,630	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								33,500,630	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	Persentase laporan bidang Trantib	100 Persen		30,000,297	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	Persentase laporan bidang Trantib	100 Persen		3,500,333	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								26,501,665	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								26,501,665	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	88 Point 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen		3,500,333	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Hatungun

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	88 Point 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	3,500,333	
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	88 Point 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	3,500,333	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	88 Point 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	3,500,333	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	88 Point 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat di bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	12,500,333	
TOTAL									2,941,359,069				

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2,858,253,823		
7 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									39,551,908		
7 01 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen				2,541,970		
7 01 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen				2,426,644		
7 01 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen				2,508,688		
7 01 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen				2,422,000		
7 01 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen				2,475,406		
7 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan				27,177,200		
7 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1,965,427,345	
7 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan				1,953,020,439		
7 01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan				4,020,000		
7 01 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan				8,386,906		
7 01 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									463,599,565	
7 01 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				8,697,180		
7 01 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket				61,374,558		
7 01 01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket				7,017,650		
7 01 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket				77,250,000		
7 01 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket				31,219,677		
7 01 01	2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan				8,497,500		
7 01 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	269,543,000		
7 01 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									59,872,891	
7 01 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit				59,872,891		
7 01 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									64,313,902	
7 01 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan				11,971,200		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				11,157,168	
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan				3,183,540	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				38,001,994	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								265,488,212	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit				53,253,212	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit				12,435,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit				199,800,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								72,000,000	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								72,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan				72,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								116,858,448	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								111,673,708	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100 % 100 %			1		1 1	6,557,870	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100 % 100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1		1 1	105,115,838	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								5,184,740	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan				2,592,370	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan				2,592,370	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								5,751,240	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								5,751,240	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan				3,158,870	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan				2,592,370	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								56,837,820	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								56,837,820	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Salam Babaris

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang				53,525,080	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang				3,312,740	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								26,670,754	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								26,670,754	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Dokumen	1	1 1		2,592,370	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	34 Dokumen	1	1 1		2,592,370	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	17 Dokumen	1	1 1		4,858,370	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	1	1 1	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,627,644	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	1	1 1		15,000,000	
TOTAL									3,136,372,085	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
7	01	01							2,664,859,507			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
7	01	01	2.01						18,848,280			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen		Terlaksananya laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	1 Dokumen	1,952,900	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen		Terlaksananya laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	1 Dokumen	1,952,900	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen		Terlaksananya laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	1 Dokumen	1,952,900	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen		Terlaksananya laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	1 Dokumen	1,952,900	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen		Terlaksananya laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	1 Dokumen	11,036,680	
7	01	01	2.02								1,934,483,413	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100- Persen 100 Persen 100 Persen		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1,926,138,713	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100- Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		3,534,900	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100- Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		4,809,800	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								391,012,184	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		5,768,958	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		46,845,426	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		45,639,240	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		20,988,560	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		1,545,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		270,225,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								16,074,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen		16,074,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								106,772,456	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen		1,705,896	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen		32,600,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen		72,466,560	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								197,669,174	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen		37,519,066	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen		7,675,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen		152,475,108	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						41,327,880			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						41,327,880			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen		41,327,880	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						312,654,570			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						297,789,470			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen			Terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen		8,847,400	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	Terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288,942,070	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan						14,865,100			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 100 Persen 87 Point				100 Persen		8,914,400	
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 100 Persen 87 Point				100 Persen		5,950,700	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								4,757,200	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								4,757,200	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen				100 Persen		4,757,200	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								40,984,400	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								40,984,400	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen				100 Persen		36,527,200	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen				100 Persen		4,457,200	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								29,271,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								29,271,000	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase Desa dengan Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen				100 Persen		5,067,750	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tapin Tengah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase Desa dengan Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen				100 Persen		5,067,750	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase Desa dengan Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen				100 Persen		5,067,750	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase Desa dengan Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	87 Point 100 Persen 87 Point 100 Persen 100 Persen 100 Persen				100 Persen		14,067,750	
TOTAL									3,093,854,557	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat
Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	01							3,576,215,594				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7,498,684			
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88,9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Laporan Kinerja	100 %	749,416	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88,9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Laporan Kinerja	100 %	749,868	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88,9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Laporan Kinerja	100 %	749,868	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88,9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Laporan Kinerja	100 %	749,868	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88,9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Laporan Kinerja	100 %	4,499,664	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,640,993,322			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	100 %	2,638,543,930	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat
Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	100 %		1,299,728	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	100 %		1,149,664	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								394,275,269	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		9,999,204	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		31,881,789	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		58,907,966	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,037,310	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat
Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		278,449,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						141,600,000			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran 100 Persen 3 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelay Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	88.9 % 100 100 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118,084,000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran 100 Persen 3 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelay Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	88.9 % 100 100 100 % 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		23,516,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						113,961,128			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		3,471,648	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		46,673,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		63,816,480	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						277,887,191			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat
Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	59,167,191	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	17,260,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu Persentase Penyerapan Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.9 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	201,460,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						43,200,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						43,200,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86.8 Point 100 % 100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	43,200,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						238,541,712		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						231,690,612		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	86.8 Point 100 % 100 % 100 %			Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	5,834,834	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	86.8 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	225,855,778	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan						6,851,100		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat
Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86.8 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	4,275,300	
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86.8 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	2,575,800	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								26,797,530		
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								26,797,530	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86.8 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	22,597,714	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	86.8 Point 100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	4,199,816	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								42,273,422		
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								42,273,422	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	4,349,880	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat
Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	4,149,796	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	4,349,880	
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	4,349,880	
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	4,274,668	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat
Sub Unit Organisasi : 7.01.7.01.0.00.12.0000 Kecamatan Lokpaikat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target						
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	4,849,608	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Persentase desa dengan administrasi yang baik Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	15,949,710	
TOTAL									3,927,028,258				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
8 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,822,739,898	
8 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7,400,750	
8 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Persentase Penyusunan Laporan	100 %		7,400,750	
8 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,626,065,084	
8 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		2,620,717,464	
8 01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		3,537,560	
8 01 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		1,810,060	
8 01 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								622,021,032	
8 01 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Administrasi Perkantoran	100 %		7,029,928	
8 01 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Administrasi Perkantoran	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,344,949	
8 01 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Administrasi Perkantoran	100 %		50,306,925	
8 01 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Persentase Administrasi Perkantoran	100 %		15,267,150	
8 01 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Persentase Administrasi Perkantoran	100 %		2,818,080	
8 01 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Persentase Administrasi Perkantoran	100 %		6,643,500	
8 01 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Persentase Administrasi Perkantoran	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	464,610,500	
8 01 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								200,000,000	
8 01 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		200,000,000	
8 01 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								295,004,320	
8 01 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		2,992,800	
8 01 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		47,095,200	
8 01 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	244,916,320	
8 01 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								72,248,712	
8 01 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		32,302,472	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,020,000	
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,996,000	
8 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		930,240	
8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								216,638,100	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								216,638,100	
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Persentase Kehadiran Masyarakat yang diundang dalam Mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	80 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	ersentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175,928,900	
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Persentase Kehadiran Masyarakat yang diundang dalam Mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	80 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	ersentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,709,200	
8 01 03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik								1,303,091,980	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								1,303,091,980	
8 01 03 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku	100 % 100 %	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksaaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dn Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	80 %		1,092,770,000	
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku	100 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksaaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dn Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	80 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145,075,200	
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku	100 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksaaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dn Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	80 %		39,243,600	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku	100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 Laporan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	80 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,003,180	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								68,422,000	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								68,422,000	
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas yang terdata	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80 %		37,965,200	
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas yang terdata	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80 %		30,456,800	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								163,859,500	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								163,859,500	
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Persentase masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya Persentase Ormas yang terdata Persentase terlaksananya rakor FKUB	90 % 80 % 90 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	190 Orang	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	80 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119,496,400	
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Persentase masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya Persentase Ormas yang terdata Persentase terlaksananya rakor FKUB	90 % 80 % 90 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	126 Orang	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	80 %		44,363,100	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								254,914,900	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								254,914,900	
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang ditangani	80 % 80 %	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1735 Orang	Persentase perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152,713,800	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tapin**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang ditangani	80 % 80 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	69 Orang	Persentase perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,576,050	
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang ditangani	80 % 80 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	Persentase perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,470,250	
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang ditangani	80 % 80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %		52,154,800	
TOTAL									5,829,666,378	



4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Pada tahun 2023 Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp.428.432.765.954,00 mengalami kenaikan sebesar 8,98% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp506.900.663.842,00, Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2023 Rp.420.882.154.459,00 juga mengalami kenaikan sebesar 7,06% dibanding tahun 2022 sebesar Rp393.117.455.035,00, Belanja Bunga pada tahun 2023 Rp.5.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar 35,75% dibanding tahun 2022 sebesar Rp.7.782.683.508,00, Belanja Hibah Rp.44.263.705.490,00 pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,41% dibanding tahun 2022 sebesar Rp.41.598.820.050,00, Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2023 Rp.11.605.000.000,00 juga mengalami penurunan sebesar 2,28% dibanding tahun 2022 sebesar Rp4.828.207.628,00.

Adapun Belanja Modal pada tahun 2023 Rp.255.015.507.659,00 mengalami penurunan sebesar 52,75% dibanding tahun 2022 sebesar Rp.539.670.179.941,00 yang terdiri dari; Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya. Sedangkan Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 sebesar Rp.25.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar 1,24% dibanding tahun 2022 sebesar Rp.25.000.000.000,00 dan selanjutnya untuk Belanja Bagi Hasil pada tahun 2023 Rp.2.524.746.500,00 mengalami kenaikan sebesar 5,11% dibanding tahun 2022 sebesar Rp2.402.046.500,00,



Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2023 sebesar Rp.68.882.235.600,00 mengalami penurunan sebesar 57,55% dibanding tahun 2022 sebesar Rp162.250.951.600,00 Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari **tabel 4.2** dibawah ini.

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA,
BUNGA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA MODAL,
BELANJA TIDAK TERDUGA, BELANJA BAGI HASIL DAN BELANJA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	910,183,625,603
5.1.01	Belanja Pegawai	428,432,765,954
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420,882,154,159
5.1.03	Belanja Bunga	5,000,000,000
5.1.05	Belanja Hibah	44,263,705,490
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11,605,000,000
5.2	BELANJA MODAL	255,015,507,659
5.2.01	Belanja Modal Tanah	13,308,565,900
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23,556,753,308
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54,351,584,308
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163,367,609,143
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	370,995,000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60,000,000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24,690,000,000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24,690,000,000
5.4	BELANJA TRANSFER	71,406,982,100
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2,524,746,500
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	68,882,235,600
	JUMLAH BELANJA	1,261,296,115,362

**Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	428.432.765.954
2	Belanja Barang dan Jasa	420.882.154.159
3	Belanja Bunga	5.000.000.000
4	Belanja Hibah	44.263.705.490
5	Belanja Bantuan Sosial	11.605.000.000
6	BELANJA MODAL	255.015.507.659
	Belanja Modal Tanah	13.308.565.900
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.556.753.308
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.351.584.308
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163.367.609.143
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	370.995.000
	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000
7	Belanja Tidak Terduga	24.690.000.000
8	Belanja Bagi Hasil	2.524.746.500
9	Belanja Bantuan Keuangan	68.882.235.600
	TOTAL	1.261.296.115.362



BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Pembiayaan Daerah pada tahun 2023 adalah melakukan upaya-upaya peningkatan jumlah pembiayaan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).
2. Penerimaan Pinjaman Daerah
3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Rencana Penerimaan Pembiayaan pada PPAS tahun 2023 yang diperkirakan sebesar Rp.501.594.735.336,00 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.500.094.735.336,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.1.500.000.000,00. Jumlah Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 24,12% dari tahun 2022 yang sebesar Rp.661.045.895.844,00 .



5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan bersumber dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal Daerah
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Rencana Pengeluaran Pembiayaan pada PPAS tahun 2023 yang diperkirakan sebesar Rp. **98,157,565,500,00** mengalami kenaikan sebesar 12,30% dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp.78.500.000.000,00 hal ini dikarenakan adanya Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp10.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan lainnya adalah Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.16.000.000.000,00, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp70.657.565.500,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp1.500.000.000,00. Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan dapat dilihat pada **Tabel 5.1**

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	501,594,735,336
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	500,094,735,336
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,500,000,000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	501,594,735,336
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	98,157,565,500
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	10,000,000,000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16,000,000,000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	70,657,565,500
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1,500,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	98,157,565,500
	Pembiayaan Netto	403,437,169,836

**Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023**

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	501.594.735.336	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	500.094.735.336	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	501.594.735.336	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	98.157.565.500	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.000.000.000	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	70.657.565.500	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	98.157.565.500	
	Pembiayaan Netto	403.437.169.836	

**BAB VI
PENUTUP**

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 disusun dan selanjutnya dibahas, disepakati dalam bentuk dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023. PPAS APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023.

Rantau, September 2022

PIMPINAN DPRD,

H. YAMANI

BUPATI TAPIN.

H. M. ARIFIN ARPAN